

Efek Booming AI, Ekonomi Malaysia Q3-2026 Tumbuh 5,3%

Jumat, 16 Oktober 2026 14:20 WIB

Danial Azhar

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124830/efek-booming-ai-ekonomi-malaysia-q3-2026-tumbuh-5-3/2>

Bloomberg, Pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat, tetapi tetap melampaui ekspektasi seiring lonjakan industri kecerdasan buatan (AI) yang terus menopang ekspor dan permintaan domestik yang tetap kuat.

Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 5,3% pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut estimasi awal Departemen Statistik Malaysia pada Jumat (16/10). Angka tersebut melampaui median perkiraan sebesar 5,1% dalam survei Bloomberg. Namun, pertumbuhan pada kuartal III melambat dibandingkan ekspansi 6% pada kuartal sebelumnya.

Departemen tersebut menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertumbuhan pada kuartal III ditopang oleh kinerja positif di sebagian besar sektor ekonomi. Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi.

Data yang lebih baik dari perkiraan ini menegaskan ketahanan ekonomi Malaysia meskipun pertumbuhannya mulai melambat setelah mencatat kinerja kuat pada paruh pertama tahun ini. Konsumsi domestik yang solid dan permintaan terhadap perangkat elektronik yang digunakan dalam teknologi AI membantu melindungi perekonomian Malaysia yang bergantung pada perdagangan dari gangguan akibat perang AS melawan Iran.

“Hasil ini secara umum sejalan dengan perkiraan kami dan menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan masih kuat, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan yang tinggi pada paruh pertama 2026,” kata Lavanya Venkateswaran, ekonom di Oversea-Chinese Banking Corp. “Hal ini membuka peluang bagi Bank Negara Malaysia untuk menormalisasi suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin. Kami memperkirakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pada Januari, tetapi keputusan dalam rapat November masih menjadi pertimbangan yang ketat.”

Ringgit stabil di level 4,08 per dolar AS setelah data PDB dirilis, sementara saham-saham domestik masih mencatat pelemahan.

Departemen statistik menyatakan sektor jasa tumbuh 5,4%, didukung perdagangan grosir dan eceran, informasi dan komunikasi, serta keuangan. Sementara itu, sektor manufaktur menguat 7,5%, sebagian ditopang industri berorientasi ekspor, terutama produk listrik dan elektronik.

Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed Ghaffour mengatakan dalam wawancara pekan ini bahwa ekonomi Malaysia kemungkinan tumbuh sekitar 5% tahun ini. Menurutnya, sumber pertumbuhan negara yang beragam membantu meredam dampak perlambatan yang mungkin terjadi pada industri AI.

Departemen statistik menyatakan ekonomi Malaysia tumbuh 5,5% selama tiga kuartal pertama 2026, melampaui proyeksi pertumbuhan pemerintah yang telah direvisi menjadi 4,8%–5,3% untuk tahun ini. Pemerintah menaikkan proyeksi tersebut pada bulan ini dari perkiraan sebelumnya sebesar 4%–5%.

Belanja rumah tangga tetap kuat, antara lain karena subsidi bahan bakar membantu melindungi konsumen dari tingginya biaya energi. Awal bulan ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengumumkan tambahan bantuan tunai dan kenaikan upah minimum untuk tahun depan guna meringankan tekanan biaya hidup.

Pemerintah memperkirakan ekonomi Malaysia tumbuh 4,2%–5,2% pada 2027, didukung oleh permintaan domestik dan aktivitas investasi yang berkelanjutan.

Data awal PDB yang memuat analisis terperinci mengenai kinerja ekonomi pada kuartal III akan dirilis pada 18 November.

Biaya Energi Melonjak, Inflasi IHP AS Naik Tercepat dalam 4 Tahun

Jumat, 16 Oktober 2026 07:00 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124763/biaya-energi-melonjak-inflasi-ihp-as-naik-tercepat-dalam-4-tahun/2>

Bloomberg, Harga produsen di AS naik pada September dengan laju tercepat dalam lebih dari empat tahun, seiring kenaikan biaya energi yang berdampak pada berbagai sektor perekonomian negara tersebut.

Indeks Harga Produsen (IHP) naik 1,3% dibandingkan bulan sebelumnya, kenaikan terbesar sejak Maret 2022, dan melonjak 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis pada Kamis (15/10). Tidak termasuk makanan dan energi, indeks tersebut naik 0,7% pada bulan lalu dan 5% secara tahunan. Kedua angka itu melampaui seluruh perkiraan dalam survei Bloomberg.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi yang mendasari masih kuat di tengah kenaikan harga bahan bakar. Kondisi ini terjadi menjelang pemilihan paruh waktu pada November, ketika keterjangkauan harga barang dan jasa menjadi isu utama. Data tersebut juga kemungkinan membuat para pejabat Federal Reserve (The Fed) tetap berada di jalur untuk kembali menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, terutama setelah laporan terpisah pada Rabu menunjukkan bahwa salah satu indikator utama harga konsumen meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada September.

Obligasi pemerintah AS (Treasury) tetap menguat, sementara kontrak berjangka saham masih melemah setelah data tersebut dirilis.

Salah satu pertanyaan utama bagi pembuat kebijakan adalah apakah guncangan harga energi mulai merembet ke harga barang dan jasa lainnya. Laporan IHP menunjukkan harga energi naik 10,8% pada September, sementara harga jasa transportasi dan pergudangan meningkat 3,4%, kenaikan terbesar sejak April. Harga makanan naik 1,2%.

“Lonjakan harga transportasi berdampak pada setiap barang dalam perekonomian. Pasalnya, bahan baku untuk manufaktur harus diangkut ke pabrik, sementara barang pada setiap tahap produksi dipindahkan dari produsen ke pedagang grosir hingga pengecer menggunakan truk, kereta api, atau moda transportasi lainnya,” kata Carl Weinberg, kepala ekonom di High Frequency Economics, dalam sebuah catatan. “Inilah cara kenaikan harga energi ‘merembet’ ke harga barang inti.”

Faktor Pendorong Lain

Namun, ada pula faktor lain yang mendorong kenaikan harga produsen melampaui perkiraan. Data menunjukkan margin jasa perdagangan grosir dan eceran melonjak 1,4%, kenaikan terbesar sejak April. Margin tersebut menjadi perhatian karena dapat memberikan petunjuk mengenai sejauh mana perusahaan menyerap biaya terkait tarif atau meneruskannya kepada konsumen.

Meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan banyak tarif yang diberlakukan Donald Trump pada awal tahun ini, pemerintahannya menggunakan kewenangan lain untuk mengenakan pungutan terhadap barang impor. Perang dagang dengan Kanada juga semakin memanas setelah perundingan kedua negara terhenti pada Agustus.

Sejumlah komponen PPI yang menjadi perhatian khusus The Fed karena turut diperhitungkan dalam indikator inflasi pilihan bank sentral tersebut, yakni indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures atau PCE), menunjukkan hasil yang beragam. Indeks harga tiket pesawat melonjak 5% dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi berbagai kategori layanan kesehatan mencatat kenaikan yang relatif rendah.

Sejumlah ekonom sedikit menaikkan perkiraan mereka untuk deflator PCE inti setelah laporan tersebut dirilis. Mereka memperkirakan indikator itu akan naik 0,3% atau 0,4%. Biro Analisis Ekonomi AS dijadwalkan merilis data harga PCE September, beserta data pendapatan dan belanja, pada 29 Oktober.

Data Kamis juga menunjukkan sedikit perlambatan pada sejumlah kategori yang berkaitan dengan pembangunan pusat data. Biaya komponen dan aksesoris elektronik turun 0,3% pada bulan lalu, harga komputer dan peralatan komputer naik tipis 0,1%, sementara indeks biaya konstruksi secara lebih luas relatif tidak berubah.

Sementara itu, laporan terpisah yang dirilis pada Kamis menunjukkan penjualan ritel AS meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada September. Kenaikan pengeluaran di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) menutupi pola belanja yang beragam di sejumlah peritel lainnya.

The Fed New York juga melaporkan bahwa aktivitas manufaktur di negara bagian tersebut tumbuh paling kuat dalam hampir lima tahun, disertai peningkatan signifikan pada pesanan baru dan pengiriman barang. Indeks kondisi bisnis umum bank tersebut naik 17,9 poin menjadi 25,5 pada Oktober, melampaui seluruh perkiraan ekonom dalam survei Bloomberg.

Menurut laporan The Fed New York, tekanan harga juga diperkirakan tetap tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Indikator ekspektasi harga yang harus dibayar dalam enam bulan ke depan naik ke level tertinggi sejak 2022.

Dolar AS Melemah, Pasar Mulai Ragu The Fed Bakal Naikkan Suku Bunga

Jumat, 16 Oktober 2026 22:46 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-melemah-pasar-mulai-ragu-the-fed-bakal-naikkan-suku-bunga>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan Jumat (16/10/2026) dan menuju penurunan mingguan pertama dalam lebih dari sebulan terhadap euro dan yen. Pelemahan ini terjadi di tengah meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) serta kekhawatiran berkelanjutan akibat aksi jual saham yang dipicu sektor kecerdasan buatan (AI).

Data inflasi konsumen dan produsen AS yang lebih tinggi dari perkiraan sempat mengguncang pasar pada pekan ini. Namun, pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang mengindikasikan tidak adanya urgensi untuk kembali memperketat kebijakan moneter membantu menstabilkan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan mengurangi daya tarik dolar.

Saham-saham AI mengalami tekanan tajam sepanjang pekan ini. Tekanan tersebut turut merembet ke sejumlah segmen pasar kredit ketika investor yang telah menumpuk investasi di berbagai rantai pasok AI mulai mengkhawatirkan kemampuan operator pusat data untuk menghasilkan keuntungan sebelum jatuh tempo pembayaran utang mereka.

"Sejak pertengahan Juni, dengan sikap hawkish Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), suku bunga menjadi penggerak dolar. Kini, kekhawatiran mengenai keberlanjutan bisnis AI tampaknya mengimbangi faktor tersebut," kata Marc Chandler, kepala strategi pasar Bannockburn Capital Markets di New York.

Indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,42% menjadi 101,61. Indeks tersebut berada di jalur penurunan mingguan sebesar 0,6%.

Pound sterling dan franc Swiss menjadi mata uang dengan penguatan terbesar terhadap dolar sepanjang pekan ini. Franc Swiss mendapat dukungan dari permintaan aset lindung nilai (safe haven) serta ekspektasi bahwa Swiss kemungkinan tidak akan memangkas suku bunga acuannya di bawah level nol saat ini, meskipun suku bunga global bergerak lebih rendah.

Pound sterling naik 0,60% ke US\$ 1,3353 dan menguat 0,92% sepanjang pekan. Sementara itu, dolar melemah 0,48% terhadap franc Swiss menjadi 0,8228, sehingga mencatatkan penurunan mingguan sebesar 0,92%. Franc Swiss telah menguat lebih dari 1,4% dalam dua sesi perdagangan terakhir.

Berdasarkan CME FedWatch Tool, pelaku pasar memperkirakan probabilitas sebesar 85% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan akhir bulan ini.

"Saya tidak melihat dukungan yang cukup di dalam komite, terutama dari para gubernur, untuk menaikkan suku bunga pada Oktober. Namun, keputusan pada Desember masih menjadi pertanyaan terbuka, dan masih banyak hal yang bisa terjadi antara sekarang dan saat itu," kata John Velis, ahli strategi makro Amerika di BNY, New York.

Risiko fiskal di Prancis masih membayangi pasar setelah premi risiko utang negara tersebut melonjak pada awal Oktober.

Euro naik 0,33% menjadi US\$ 1,1255 setelah menguat 0,56% pada Kamis (15/10/2026). Kenaikan harian tersebut merupakan yang terbesar dalam dua bulan terakhir dan membawa euro menuju penguatan mingguan sebesar 0,48%.

Investor juga memperkirakan Presiden AS Donald Trump akan menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah maupun Ukraina. Konflik yang meluas berpotensi memperburuk posisinya menjelang pemilihan paruh waktu AS karena dapat mendorong inflasi.

Terhadap yen Jepang, dolar melemah 0,12% menjadi 157,79 yen. Pergerakan ini menempatkan yen di jalur penguatan mingguan sebesar 0,33%, setelah mata uang Jepang tersebut melemah selama empat pekan berturut-turut ketika konflik Iran menopang dolar.

Harga minyak yang lebih tinggi cenderung mendukung dolar, tetapi menekan mata uang negara pengimpor energi seperti euro dan yen.

Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda pada Jumat kembali menegaskan risiko inflasi yang mendasari perekonomian dapat melampaui target bank sentral sebesar 2%.

Manufaktur AS pada September Tumbuh Melambat, Produksi Semikonduktor Melonjak 28,4%

Jumat, 16 Oktober 2026 21:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/manufaktur-as-pada-september-tumbuh-melambat-produksi-semikonduktor-melonjak-284>

KONTAN.CO.ID – WASHINGTON. Produksi manufaktur Amerika Serikat (AS) kembali meningkat pada September 2026. Namun, momentum pertumbuhan sektor industri tersebut melambat tajam sepanjang kuartal III-2026 di tengah tekanan konflik Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok dan mendorong kenaikan harga energi.

Mengutip Reuters, Jumat (16/10/2026), Federal Reserve (The Fed) melaporkan produksi manufaktur naik 0,3% pada September, setelah terkoreksi 0,2% pada Agustus. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi ekonom. Sebelumnya, penurunan produksi manufaktur pada Agustus diperkirakan mencapai 0,3%.

Secara tahunan, produksi manufaktur AS tumbuh 1,1% pada September. Namun, sepanjang kuartal III-2026, produksi hanya tumbuh pada tingkat tahunan 0,7%, jauh melambat dibandingkan pertumbuhan 5,6% pada kuartal II-2026.

Sektor manufaktur menyumbang sekitar 9,4% terhadap perekonomian AS. Aktivitas pabrik masih mendapat dukungan dari pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta upaya perusahaan menambah persediaan untuk memenuhi permintaan domestik yang kuat.

Meski demikian, sejumlah risiko membayangi prospek produksi. Kenaikan harga energi, perang dagang dengan Kanada, serta meningkatnya biaya pinjaman berpotensi menekan aktivitas manufaktur.

Harga diesel bahkan melonjak ke rekor tertinggi ketika perang AS-Israel melawan Iran terus berlangsung. Para ekonom menilai dampak kenaikan biaya energi berpotensi segera terasa pada harga berbagai barang, termasuk produk yang dijual di supermarket. Kondisi tersebut dapat membebani permintaan konsumen.

Produksi semikonduktor melonjak

Berdasarkan jenis produknya, produksi barang tahan lama (durable goods) naik tipis 0,1% pada September. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan produksi logam dasar, mesin, serta peralatan listrik, perangkat rumah tangga, dan komponennya.

Sebaliknya, produksi kendaraan bermotor dan suku cadangnya turun 3% pada bulan tersebut.

Secara keseluruhan, produksi manufaktur barang tahan lama tumbuh pada tingkat tahunan 3,8% selama kuartal III-2026. Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang lonjakan produksi semikonduktor dan komponen elektronik terkait sebesar 28,4%, seiring meningkatnya belanja infrastruktur AI.

Sementara itu, produksi barang tidak tahan lama (nondurable goods) meningkat 0,4% pada September, didukung kenaikan produksi percetakan dan bahan kimia. Namun, secara keseluruhan, produksi barang tidak tahan lama justru turun 1,6% pada kuartal III-2026.

Di luar manufaktur, produksi pertambangan meningkat 0,2% pada September dan tumbuh pada tingkat tahunan 5% selama kuartal Juli-September 2026.

Produksi utilitas, termasuk penyediaan listrik, gas, dan layanan terkait, melonjak 3,5% pada September seiring meningkatnya kebutuhan pendingin udara. Sepanjang kuartal III-2026, produksi utilitas tumbuh pada tingkat tahunan 14,8%.

Secara keseluruhan, produksi industri AS meningkat 0,7% pada September, setelah tumbuh 0,1% pada Agustus. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, produksi industri naik 2,2%.

Namun, pertumbuhan produksi industri pada kuartal III-2026 melambat menjadi 2,8% pada tingkat tahunan, dari 4,8% pada kuartal sebelumnya.

The Fed juga melaporkan tingkat utilisasi kapasitas industri, yang mengukur seberapa optimal perusahaan menggunakan sumber daya produksinya, meningkat menjadi 76,9% pada September dari 76,4% pada Agustus.

Meski membaik, tingkat utilisasi tersebut masih 2,5 poin persentase di bawah rata-rata periode 1972-2025.

Adapun tingkat utilisasi kapasitas sektor manufaktur naik tipis menjadi 75,9% pada September dari 75,8% pada Agustus. Angka ini masih 2,3 poin persentase di bawah rata-rata jangka panjangnya.

IMF Peringatkan Risiko AI Bisa Lebih Besar daripada Manfaatnya, Ini Alasannya

Jumat, 16 Oktober 2026 17:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-peringatkan-risiko-ai-bisa-lebih-besar-daripada-manfaatnya-ini-alasannya>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa risiko kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi lebih besar daripada manfaatnya apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai dan kerangka etika yang kuat.

Karena itu, Kepala IMF Kristalina Georgieva mendorong kombinasi pengaturan mandiri oleh industri dan keterlibatan pemerintah negara-negara utama.

Dalam pernyataannya pada Jumat (16/10/2026), Georgieva mengatakan AI telah memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi global. Namun, teknologi yang berkembang pesat tersebut juga berpotensi memicu guncangan negatif apabila tidak mampu menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar yang diharapkan dalam waktu dekat.

Risiko tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pekan ini.

Pada Selasa (13/10/2026), IMF juga menyoroti sejumlah risiko signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan global. Risiko tersebut mencakup kemungkinan berakhirnya lonjakan investasi AI, tingginya tingkat utang, serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Dalam diskusi panel yang melibatkan salah satu pendiri Anthropic, Jack Clark, Georgieva menekankan pentingnya membangun fondasi etika sebelum penggunaan AI semakin meluas.

"Jika tidak ada perlindungan, maka risikonya mungkin melebihi peluang yang ada. Dan yang terpenting, kita memang membutuhkan landasan etika, dan saya tidak yakin kita sebagai masyarakat sudah sampai pada tahap itu," kata Georgieva.

Investasi AI Berpotensi Memperlebar Ketimpangan Global

Risiko AI terhadap perekonomian juga disoroti oleh Presiden Bundesbank Joachim Nagel. Dalam diskusi panel terpisah, Nagel menyatakan bahwa perkembangan AI berpotensi meningkatkan ketidakseimbangan ekonomi global.

Menurut dia, ketimpangan tersebut dapat muncul karena pengembangan AI membutuhkan investasi besar, baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak.

"Hal itu jelas jika kita mempertimbangkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk AI, baik dalam pengembangan perangkat keras maupun perangkat lunak," ujar Nagel.

Georgieva menambahkan, agar masyarakat di berbagai negara dapat menikmati manfaat AI, sejumlah prasyarat perlu dipenuhi. Hal tersebut mencakup akses terhadap infrastruktur digital, ketersediaan listrik, serta regulasi yang memadai.

Tanpa dukungan infrastruktur dan akses teknologi yang merata, manfaat AI berisiko terkonsentrasi pada negara atau kelompok usaha yang memiliki modal dan sumber daya lebih besar.

IMF Dorong Standar Etika dan Pengawasan AI

Georgieva menilai tantangan utama saat ini adalah menentukan mekanisme pengamanan yang tepat bagi teknologi yang berkembang sangat cepat.

Ia mengibaratkan perkembangan AI seperti mobil balap Formula One yang melaju tanpa pembatas untuk melindungi penonton. Analogi tersebut menggambarkan risiko perkembangan teknologi yang terlalu cepat tanpa sistem pengawasan yang memadai.

Menurut Georgieva, pengaturan mandiri oleh industri dapat menjadi salah satu pendekatan yang sesuai karena pemerintah belum tentu mampu mengikuti perubahan sektor AI yang berlangsung sangat dinamis.

Meski demikian, pengaturan mandiri tersebut harus tetap melibatkan masyarakat. Negara-negara dengan industri AI terbesar, termasuk Amerika Serikat, China, dan India, perlu ikut terlibat bersama negara-negara lain yang menjadi bagian dari rantai pasok AI global.

Jack Clark menilai pembentukan standar pengamanan AI sudah dapat dimulai melalui kerangka kebijakan awal di Uni Eropa dan komitmen sukarela di Amerika Serikat.

Ia mengatakan Anthropic secara rutin menguji sistem AI yang dikembangkan perusahaan, memublikasikan rincian pengujian, serta membagikan informasi terkait hasil pengujian tersebut. Namun, Clark tidak sepakat apabila pengawasan sepenuhnya hanya mengandalkan kesukarelaan perusahaan.

Ketika ditanya apakah ia mendukung regulasi dari negara-negara pengembang AI, Clark menjawab:

"Ya. Kita membutuhkan standar yang masuk akal, dan pada akhirnya itulah cara untuk membangun kepercayaan terhadap teknologi serta mengembangkan perekonomian."

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya standar yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam memanfaatkan AI.

Ekonom Harvard Soroti Ancaman Lapangan Kerja dan Krisis Keuangan

Ekonom Universitas Harvard Dani Rodrik menilai dampak ekonomi AI masih menyimpan ketidakpastian. Menurut dia, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah peningkatan produktivitas yang dijanjikan AI benar-benar akan terwujud.

Kondisi tersebut menciptakan dua kemungkinan risiko yang berbeda.

Jika AI berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan, perubahan tersebut berpotensi diikuti oleh hilangnya banyak pekerjaan dan pergeseran tenaga kerja di sektor-sektor yang terdampak otomatisasi.

Sebaliknya, apabila manfaat produktivitas yang diharapkan tidak terwujud, besarnya investasi pada pusat data atau data center dapat memicu koreksi keuangan yang mahal.

"Kita tidak tahu krisis mana dari kedua krisis tersebut yang harus kita hadapi, apakah krisis lapangan kerja atau krisis keuangan," kata Rodrik kepada Reuters setelah konferensi lintas disiplin WZB di Berlin pada pekan sebelumnya.

Peringatan tersebut menunjukkan bahwa dampak AI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga dengan risiko terhadap pasar tenaga kerja dan stabilitas investasi.

Investasi besar yang tidak menghasilkan imbal hasil sesuai harapan dapat meningkatkan tekanan keuangan. Sementara itu, otomatisasi yang berlangsung cepat berpotensi mengubah kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan di berbagai industri.

AS Dorong Istilah Superintelligence untuk AI

Di tengah peringatan mengenai risiko AI, pemerintah Amerika Serikat justru menekankan potensi positif teknologi tersebut bagi perekonomian.

Wakil Menteri Keuangan AS Erin Browne menilai IMF terlalu berfokus pada risiko ekonomi global dan seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap peluang terciptanya guncangan ekonomi positif, termasuk melalui perkembangan AI.

Pemerintah AS kini menggunakan istilah "superintelligence" untuk menyebut teknologi tersebut.

Pada Kamis (15/10), Browne mengatakan kepada Reuters bahwa Washington tengah berdiskusi dengan pemegang saham IMF lainnya mengenai kemungkinan penggunaan istilah baru tersebut dalam pernyataan bersama yang sedang disusun oleh komite pengarah IMF.

Namun, usulan perubahan istilah tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari sejumlah pejabat ekonomi negara lain.

Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil menegaskan, "Saya akan terus menyebutnya kecerdasan buatan."

Sementara itu, Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengaku lebih optimistis dibandingkan sebulan sebelumnya bahwa negara-negara dapat mencapai kesepakatan mengenai standar pengujian AI.

Dalam pertemuan Institute of International Finance, Bailey juga melontarkan komentar bernada humor mengenai perdebatan istilah tersebut.

"Saya tidak yakin apakah kita sekarang seharusnya membicarakan AI, bukan? Saya memang menggunakan ungkapan beberapa hari lalu, 'seniman yang sebelumnya dikenal sebagai AI'," ujarnya.

Ketua Federal Reserve Kevin Warsh turut menyinggung perbedaan penyebutan tersebut saat berbicara kepada Georgieva dalam panel terpisah.

"Kristalina, Anda menyebutnya AI. Di AS, sekarang kami menyebutnya SI," kata Warsh.

Ekonomi Malaysia Tumbuh Melambat, Tetapi Tetap di Atas Ekspektasi Ekonom

Jumat, 16 Oktober 2026 14:58 WIB

Sumber: Reuters,Bloomberg, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-malaysia-tumbuh-melambat-tetapi-tetap-di-atas-ekspektasi-ekonom>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perekonomian Malaysia melambat di kuartal tiga tahun ini. Kendati Departemen Statistik Malaysia mengumumkan, Jumat (16/10/2026), data awal menunjukkan ekonomi negeri jiran ini tumbuh 5,3% di kuartal tiga tahun ini

Kendati melambat dibanding kuartal sebelumnya, di mana ekonomi tumbuh 6%, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga tersebut masih lebih baik dari proyeksi analis. Konsensus proyeksi analis memprediksi ekonomi Malaysia cuma naik 5,1% di periode tersebut.

“Hasil yang tercapai secara garis besar sejalan dengan prakiraan kami dan menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan tetap kuat, meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan yang tinggi pada paruh pertama tahun 2026,” ujar Lavanya Venkateswaran, Ekonom Oversea-Chinese Banking Corp, seperti dikutip Bloomberg, Jumat (16/10/2026).

Reuters melaporkan, selama periode Juli hingga September, pertumbuhan tercatat di semua sektor ekonomi kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sektor tersebut mengalami penurunan 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga lebih didorong oleh sektor jasa yang naik 5,4%. Selain itu, aktivitas manufaktur juga tumbuh 7,5%, ditopang oleh industri berorientasi ekspor.

Sektor konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan 6%, yang sebagian didukung oleh peningkatan proyek pengembangan data center.

Malaysia, yang merupakan pusat data regional, telah memperoleh keuntungan dari lonjakan global dalam infrastruktur akal imitasi (AI), yang telah mendorong permintaan terhadap produk teknologi dan semikonduktor negara tersebut.

Pekan lalu, pemerintah Malaysia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 untuk kedua kalinya tahun ini. Pemerintah menargetkan ekonomi akan tumbuh mendekati batas atas kisaran prakiraan 4,8% hingga 5,3%.

Selain itu, Pemerintah Malaysia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan berada di kisaran 4,2% hingga 5,2% pada tahun 2027. Data final PDB kuartal ketiga akan dirilis pada 18 November.

Data pertumbuhan ekonomi ini juga membuka peluang kebijakan moneter yang lebih longgar oleh bank sentral Malaysia, yakni Bank Negara Malaysia. “Hal ini membuka lebar peluang bagi Bank Negara Malaysia menormalisasi suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin,” imbuh Lavanya.

Proyeksi dasar OCBC untuk penyesuaian tersebut adalah pada Januari, namun ada kemungkinan penyesuaian bisa terjadi pada pertemuan November. Bank sentral Malaysia telah mempertahankan suku bunga acuan sejak Mei tahun lalu. Saat itu, suku bunga diturunkan menjadi 2,75% di tengah ketidakpastian tarif global.

Rupiah Menutup Perdagangan Pekan Ini di Rp18.011/US\$

Jumat, 16 Oktober 2026 15:45 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124860/rupiah-menutup-perdagangan-pekan-ini-di-rp18-011-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pekan ini dengan pelemahan 0,41% ke Rp18.011/US\$, bersamaan dengan aksi jual di pasar surat utang dan penguatan yang terjadi di pasar valutas Asia.

Dari kawasan, mayoritas mata uang cenderung menguat hari ini, seiring tekanan di pasar obligasi global mereda. Yield US Treasury 10 tahun terpengkas ke 5,08% dan indeks dolar AS relatif landai dan turun 0,91% ke 101,8.

Won Korea Selatan menguat cukup tajam 0,71%, disusul dolar Singapura 0,14%, rupee India, yuan China, peso Filipina, yuan offshore, dan ringgit Malaysia. Sebaliknya rupiah melemah bersama dolar Taiwan sore ini.

Pergerakan rupiah hari ini menggenapi pelemahannya sepanjang pekan ini rupiah yang tercatat 0,71%. Rupiah sempat dibuka Rp17.888/US\$ pada sesi pembukaan spot Senin (12/10/2026), dan sore ini berada di Rp18.011/US\$.

Di pasar obligasi, aksi jual terjadi secara masif di hampir semua tenor, kecuali tenor 20 tahun. Tenor 4 tahun alami kenaikan yield paling tajam 25,2 bps jadi 7,29%, diikuti tenor 2 tahun naik 17 bps jadi 6,92%. Tenor 15 tahun juga menanjak ke 7,43%.

Perkembangan di pasar keuangan hari terakhir pekan ini dikejutkan oleh pengumuman MSCI soal pertimbangan potensi pasar saham Indonesia turun ke Standalone Market.

Sentimen ini menambah daftar panjang tekanan yang dihadapi rupiah hari ini. Mulai dari inflasi September yang menanjak jadi 3,28% yoy, daya beli melemah yang tercermin pada penurunan keyakinan konsumen, kondisi neraca dagang yang masih surplus tetapi tergerus banyak oleh defisit minyak dan gas (migas), serta utang luar negeri yang menembus Rp8.220 triliun, tertinggi sepanjang sejarah.

Meski demikian, pelemahan rupiah dan kenaikan yield di pasar surat utang tidak serta-merta menghilangkan semua penyangga fundamental ekonomi Indonesia.

Setidaknya, Indonesia masih punya cadangan devisa sebesar US\$146,5 miliar pada akhir Agustus, surplus perdagangan US\$3,55 miliar pada Agustus, dan inflasi September sebesar 3,28% masih memberikan landasan untuk menjaga ketahanan makroekonomi.

Selain itu, inflasi tercatat masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI) di 3,28%. Begitu juga ketahanan eksternal masih didukung oleh kinerja perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan RI sebesar US\$3,55 miliar pada Agustus 2026. Capaian angka ini masih berada di atas ekspektasi pasar di sekitar US\$630 juta.

Indikator-indikator tersebut memang belum cukup untuk membalikkan sentimen pasar secara langsung, tetapi setidaknya menunjukkan Indonesia masih memiliki modal ekonomi untuk merespons tekanan ini.

Saat ini persepsi investorlah yang membuat pasar keuangan terguncang. Credit Default Swap (CDS) INDON 5 tahun kembali terkerek naik ke 97. Padahal, awal pekan ini sempat bertengger di kisaran 92-93 seiring meredanya tekanan eksternal.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkecil jarak antara ketahanan fundamental dan persepsi risiko investor. Perbaikan tata kelola pasar modal perlu jadi prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti transparansi struktur kepemilikan saham, keakuratan data free float, pengawasan perdagangan, serta adanya penegakan aturan yang konsisten perlu diterjemahkan jadi langkah konkret yang bisa diverifikasi investor internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, termasuk dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

"OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait," kata Hasan.

RI Dorong Penguatan Transaksi Mata Uang Lokal di Forum G20

Jumat, 16 Oktober 2026 12:45 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124811/ri-dorong-penguatan-transaksi-mata-uang-lokal-di-forum-g20>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya standar hukum dan regulasi yang jelas untuk inovasi keuangan digital guna memberikan kepastian bagi pelaku pasar, sekaligus acuan bagi pembuat kebijakan.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2026).

Suahasil yang didampingi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan tiga hal utama terkait kebijakan dan arah kerja sama keuangan global.

Pertama, Indonesia mengapresiasi capaian dan peran Financial Stability Board (FSB) dalam mendorong modernisasi regulasi serta memetakan berbagai risiko material yang muncul dari perkembangan inovasi keuangan digital.

Kedua, Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendorong pengembangan pembayaran lintas batas (cross-border payment) berbasis QR dan penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency transaction).

"Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran, memfasilitasi aktivitas perdagangan, serta memperdalam inklusi keuangan," kata Suahasil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).

Ketiga, Indonesia menyambut baik fokus G20 pada modernisasi pasar uang dan pembayaran lintas batas.

Mengingat keberagaman kerangka regulasi, struktur pasar, dan tingkat perkembangan keuangan di antara negara-negara G20, dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengusulkan dilakukannya pemetaan (stock-taking exercise) pada tahap awal.

Menurut Suahasil, pemetaan tersebut menjadi fondasi diskusi untuk menentukan prioritas bersama serta memfasilitasi kerja sama yang relevan bagi setiap negara.

Seluruh Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai Paling Panas

Jumat, 16 Oktober 2026 09:55 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124800/seluruh-harga-pangan-hari-ini-naik-cabai-paling-panas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Seluruh harga komoditas pangan nasional yang dipantau lewat Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per hari ini, Jumat (16/10/2026) tercatat mengalami kenaikan. Cabai-cabaian melonjak paling tinggi.

Berdasarkan data per pukul 9.15 WIB, harga cabai merah besar naik 17,48% atau Rp12.400 menjadi Rp83.350/kg. Harga cabai merah keriting naik 73,13% atau Rp61.600 menjadi Rp145.950/kg, sekaligus menjadi kenaikan persentase dan nominal tertinggi.

Kemudian, harga cabai rawit hijau naik 12,75% atau Rp9.800 menjadi Rp86.650/kg. Begitu juga harga cabai rawit merah yang naik 26,05% atau Rp26.900 menjadi Rp130.400/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang juga naik 23,75% atau Rp8.800 menjadi Rp45.850/kg. Bawang putih ukuran sedang pun melonjak 7,99% atau Rp3.100 menjadi Rp41.900/kg.

Lalu, seluruh jenis beras juga naik. Beras kualitas bawah I atau SPHP tercatat naik 18,46% atau Rp2.750 menjadi Rp17.650/kg. Beras kualitas bawah II juga naik 16,95% atau Rp2.500 menjadi Rp17.250/kg.

Harga beras kualitas medium I naik 11,41% atau Rp1.900 menjadi Rp18.550/kg. Begitu juga beras kualitas medium II yang naik 10,98% atau Rp1.800 menjadi Rp18.200/kg.

Harga beras kualitas super I atau setara dengan premium pun mengalami kenaikan 8,64% atau Rp1.550 menjadi Rp19.500/kg. Beras kualitas super II juga naik 10,63% atau Rp1.850 menjadi Rp19.250/kg.

Harga daging ayam ras segar naik 8,59% atau Rp3.550 menjadi Rp44.900/kg. Daging sapi kualitas 1 juga naik 8,35% atau Rp12.750 menjadi Rp165.400/kg, serta daging sapi kualitas 2 naik 0,97% atau Rp1.400 menjadi Rp145.400/kg.

Harga telur ayam ras segar juga naik 9,6% atau Rp2.850 menjadi Rp32.550/kg. Gula pasir kualitas premium melonjak 12,93% atau Rp2.650 menjadi Rp23.150/kg, sementara gula pasir lokal naik 9,09% atau Rp1.750 menjadi Rp21.000/kg.

Terakhir, seluruh jenis minyak goreng juga naik. Harga minyak goreng curah naik 4,93% atau Rp1.000 menjadi Rp21.300/kg. Minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 8,61% atau Rp2.100 menjadi Rp26.500/kg, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 2,12% atau Rp500 menjadi Rp24.100/kg.

Rupiah Jebol Rp 18.000, Ekonom Ingatkan Defisit APBN Bisa Membengkak Rp 13,5 Triliun

Jumat, 16 Oktober 2026 18:18 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-jebol-rp-18000-ekonom-ingatkan-defisit-apbn-bisa-membengkak-rp-135-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gejolak pasar modal setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan merambat ke

pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Jumat (16/10/2026) ditutup melemah ke level Rp 18.027 per dolar AS di pasar spot (turun 0,50% atau 89 poin), sementara kurs acuan Jisdor Bank Indonesia berada di level Rp 18.052 per dolar AS

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, tekanan di pasar saham yang merembet ke pasar valuta asing dan obligasi dapat meningkatkan beban anggaran pemerintah melalui fiskal APBN.

Kondisi tersebut terjadi ketika Indonesia juga menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memperbesar belanja negara.

Juniman menjelaskan, gejolak yang awalnya terjadi di pasar saham berkaitan dengan kepercayaan investor global terhadap pasar keuangan Indonesia. Sentimen tersebut kemudian memicu arus modal keluar atau capital outflow yang turut menekan nilai tukar rupiah dan pasar Surat Berharga Negara (SBN)

"Jadi, dampaknya tidak terjadi secara langsung. Awalnya, sentimen MSCI menekan pasar modal dan memicu arus modal keluar. Arus modal keluar tersebut kemudian menekan rupiah dan pasar obligasi kita," ujar Juniman kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Ia menuturkan, pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) membuat nilai tukar berada jauh di atas asumsi APBN 2026 yang sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Menurut perhitungan Juniman, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS berpotensi menambah defisit APBN hampir Rp 900 miliar.

Dengan demikian, jika rupiah bertahan di level Rp 18.000 per dolar AS, terdapat selisih Rp 1.500 dari asumsi APBN. Selisih tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap defisit anggaran sekitar Rp 13,5 triliun.

Tekanan terhadap APBN juga berasal dari kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Juniman menyebut, asumsi imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun dalam APBN berada di kisaran 6,9%, sedangkan saat ini sudah berada di atas 7,3%.

Ia memperkirakan, setiap kenaikan yield SBN sebesar 10 basis poin berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Jadi, kenaikan imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN," katanya.

Selain nilai tukar dan imbal hasil obligasi, kenaikan harga minyak dunia turut menjadi risiko bagi anggaran negara. Juniman mencatat, harga minyak saat ini berada di kisaran US\$ 100 per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sekitar US\$ 70 per barel.

Menurut perhitungannya, setiap kenaikan harga minyak sebesar US\$ 1 per barel berpotensi menambah tekanan terhadap defisit sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dengan harga minyak yang berada US\$ 30 per barel di atas asumsi APBN, tekanan terhadap anggaran berpotensi semakin besar. Terlebih, pemerintah masih harus memperhitungkan kebutuhan belanja lain, termasuk pembayaran utang, subsidi, dan kompensasi.

Respon Pemerintah dan Otoritas Jadi Kunci

Juniman menilai, besarnya tekanan terhadap pasar keuangan dan APBN akan sangat bergantung pada respons pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, pemerintah perlu segera memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan kredibel.

Ia memperingatkan, respons yang tidak tegas justru berpotensi memperburuk kondisi pasar keuangan. Apalagi, persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sentimen jangka pendek, tetapi juga menyangkut kepercayaan investor terhadap regulasi dan struktur pasar modal Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memperjelas keterbukaan informasi (disclosure), serta menindak tegas praktik yang merusak integritas pasar modal.

Menurutnya penegakan hukum perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan kecurangan di pasar modal, termasuk transaksi terkoordinasi yang melanggar ketentuan dan praktik insider trading.

"Kalau pemerintah dan otoritas bisa meyakinkan investor bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan kredibel, setidaknya arus modal keluar dari pasar keuangan kita bisa dihentikan," ujarnya.

Juniman menambahkan, tekanan pasar berpotensi mulai mereda apabila otoritas memberikan respons yang tepat. Sebaliknya, apabila penyelesaian persoalan struktural pasar modal terkesan berlarut-larut, tekanan terhadap pasar keuangan bisa semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia belum serta-merta turun menjadi standalone market ataupun frontier market. Menurutnya, masih terdapat proses konsultasi sehingga perubahan klasifikasi tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan final.

Rupiah Diproyeksi Rp 18.000 Hingga per Dollar AS Akhir Tahun

Di tengah tekanan pasar keuangan, Juniman memperkirakan rupiah akan bertahan di kisaran Rp 17.900 hingga Rp 18.000 per dolar AS hingga akhir 2026.

Proyeksi tersebut bergantung pada respons kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Juniman menilai, BI perlu mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk kenaikan suku bunga, untuk menjaga daya tarik investasi di dalam negeri.

Menurutnya, kenaikan suku bunga dapat membantu memperbaiki daya tarik imbal hasil investasi Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diharapkan dapat menahan arus modal keluar, baik dari pasar saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya.

Ia juga mengingatkan agar BI tidak hanya mengandalkan intervensi pasar secara terus-menerus karena langkah tersebut berpotensi menguras cadangan devisa.

Defisit APBN Bisa Tembus 3% Jika Tak Efisiensi Belanja

Lebih lanjut, Juniman menilai target defisit APBN dalam outlook Lapsem 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dapat dipertahankan. Namun, pemerintah harus melakukan efisiensi, refocusing, dan meningkatkan efektivitas belanja negara.

Menurutnya, tanpa pengendalian belanja yang memadai, defisit APBN berpotensi menembus 3% terhadap PDB.

Tekanan tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, hingga kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

"Kalau seluruh belanja tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran dan perkembangan kondisi ekonomi, defisit APBN berpotensi menembus 3% dari PDB," kata Juniman.

Lebih lanjut menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas belanja agar anggaran tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, terutama pada kuartal IV-2026.

Pertumbuhan Ekonomi Minim Serap Tenaga Kerja

Jumat, 16 Oktober 2026 14:22 WIB

Reporter: Diki Mardiansyah, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-minim-serap-tenaga-kerja>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan teknologi di sektor industri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi 1% mampu menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, kini penyerapan sekitar 300.000 orang sudah dinilai cukup baik.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, kemampuan penyerapan tenaga kerja tersebut mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kalau dulu per 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, hari ini hampir bisa 300.000 itu sudah cukup bagus," kata Sarmuji di Balai Diklat Industri, Kamis (15/10/2026).

Menurut Sarmuji, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan karakter industri di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi membuat sejumlah industri yang sebelumnya padat karya mulai mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia.

"Yang dulu sangat padat karya, sekarang sudah memasukkan teknologi yang sangat mungkin untuk penyerapan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya," ujarnya.

Saat ini, industri pengolahan telah menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Namun, pertumbuhan sektor industri tidak serta-merta diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya.

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia masih memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Pemerintah pun melihat peluang untuk memperluas penyerapan tenaga kerja melalui pasar kerja internasional, terutama di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

Sarmuji menyebut sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Singapura, menghadapi stagnasi hingga penurunan jumlah penduduk. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pekerja Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan, sepanjang memiliki kompetensi yang sesuai.

"Salah satu solusinya adalah kita bisa mengirimkan tenaga kerja kita yang terampil untuk mengisi pos-pos yang sebenarnya dibutuhkan bagi negara lain," jelasnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan kapasitas pelatihan vokasi hingga 11.000 peserta per tahun bagi calon pekerja migran Indonesia.

Kemenperin juga akan memperluas kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pada tahun ini, kerja sama tersebut mencakup 1.066 peserta.

Ke depan, program tersebut akan diperluas melalui inisiatif SMK Go Global. Cakupan pelatihan juga akan dikembangkan ke sektor di luar manufaktur agar calon pekerja migran dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang lebih beragam di negara tujuan.

KP2MI mencatat terdapat sekitar 291.000 peluang kerja di luar negeri pada 2026. Namun, pekerja Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 25% dari total peluang tersebut.

Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja internasional, pemerintah menargetkan pelatihan sebanyak 140.000 peserta secara nasional pada 2027.

Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan. Pelaksanaannya didukung ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi Kemenperin yang mencakup politeknik, akademi komunitas, sekolah menengah kejuruan (SMK), serta balai diklat industri.

Rupiah Terus Melemah dan Sentuh Rp 18.000 per Dolar AS, Begini Respons Bank Indonesia

Jumat, 16 Oktober 2026 11:03 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-terus-melemah-dan-sentuh-rp-18000-per-dolar-as-begini-respons-bank-indonesia>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kurs rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kembali menembus level Rp 18.000 per dolar AS.

Mengutip Bloomberg, Jumat (16/10/2026) pukul 11.00 WIB, rupiah spot ada di level Rp 18.047 per dolar AS, melemah 0,60% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 17.938 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea membeberkan, pergerakan nilai tukar rupiah disebabkan meningkatnya sentimen risk-off global, yang akhirnya mendorong penguatan dolar AS dan menekan pasar keuangan domestik, arus keluar dana dari aset portofolio domestik diperkirakan masih berlanjut.

Meski demikian, ia menilai pergerakan pelemahan nilai tukar rupiah masih terbatas.

“Secara umum, pergerakan Rupiah masih sejalan dengan mata uang kawasan, dengan pelemahan terbatas sebesar 0,28% secara quarter-to-date (QTD),” tutur Erwin dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Sejalan dengan itu, Erwin mencatat, cadangan devisa tetap terjaga sebesar US\$ 146,3 miliar pada akhir September 2026.

Lebih lanjut, BI juga berkomitmen untuk terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya dan memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Intervensi terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas dan mengelola struktur suku bunga di pasar uang, serta terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya,” tandasnya.

Ruang Fiskal Asia Makin Terbatas, IMF Ingatkan Indonesia Perlu Waspada

Jumat, 16 Oktober 2026 10:57 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/ruang-fiskal-asia-makin-terbatas-imf-ingatkan-indonesia-perlu-waspada>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengingatkan negara-negara Asia untuk mewaspadai semakin terbatasnya ruang fiskal di tengah tingginya utang publik dan meningkatnya biaya pembiayaan.

Kondisi ini menjadi perhatian bagi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengatakan, utang publik di kawasan Asia masih berada di atas level sebelum pandemi. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas untuk merespons berbagai guncangan ekonomi.

“Utang publik masih berada di atas level sebelum pandemi dan ruang fiskal semakin terbatas,” ujar Krishna dalam konferensi pers peluncuran laporan Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific, Kamis (15/10/2026).

Menurut Krishna, kondisi tersebut menuntut negara-negara di kawasan untuk menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati.

Upaya tersebut perlu didukung kerangka fiskal jangka menengah yang kuat, terutama di tengah kenaikan imbal hasil obligasi global dan tekanan terhadap anggaran negara.

IMF mencatat, kondisi fiskal di kawasan Asia tidak seragam. Di negara-negara maju Asia, di luar Jepang, rasio utang diproyeksikan terus meningkat akibat konsolidasi fiskal yang tertunda.

Sementara itu, utang negara-negara berkembang Asia, di luar China, diperkirakan bertahan pada level tinggi.

Adapun negara-negara berpendapatan rendah dan negara kepulauan Pasifik memiliki rasio utang yang relatif lebih rendah.

Namun, bantalan fiskal mereka semakin menipis sehingga kemampuan untuk menghadapi guncangan baru turut terbatas.

"Negara-negara kepulauan Pasifik dan negara berpendapatan rendah memiliki rasio utang yang lebih rendah, tetapi penyangga fiskalnya semakin menipis," katanya.

Krishna menambahkan, berbagai guncangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kenaikan tarif perdagangan dan lonjakan harga energi, telah meningkatkan tantangan bagi perekonomian kawasan.

Ketergantungan terhadap impor energi membuat sejumlah negara rentan terhadap tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Secara khusus, Krishna menilai fundamental makroekonomi Indonesia masih cukup baik. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1% pada 2026.

Meski demikian, dia menekankan pentingnya mempertahankan batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, batas tersebut menjadi jangkar penting bagi kebijakan fiskal Indonesia karena turut diperhatikan oleh pasar keuangan.

"Saya pikir batas defisit 3% merupakan jangkar yang sangat penting. Indonesia harus mempertahankannya karena pasar memang mencermati batas 3% tersebut," kata Krishna.

Dia juga menilai pemberian subsidi masih dapat dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi.

Namun, penyalurannya perlu tepat sasaran dan tetap berada dalam kerangka fiskal yang tersedia.

IMF Ingatkan Indonesia untuk Jaga Defisit APBN Maksimal 3%

Jumat, 16 Oktober 2026 10:46 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/imf-ingatkan-indonesia-untuk-jaga-defisit-apbn-maksimal-3>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengingatkan Indonesia untuk mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengatakan, batas defisit fiskal tersebut merupakan jangkar penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, pasar keuangan turut mencermati komitmen pemerintah dalam menjaga batas defisit tersebut.

"Saya pikir batas defisit 3% merupakan jangkar yang sangat penting. Indonesia harus mempertahankannya karena pasar memang mencermati batas 3% tersebut," ujar Krishna dalam konferensi pers peluncuran laporan Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific, Kamis (15/10/2026).

Krishna menilai fundamental makroekonomi Indonesia secara umum masih cukup baik. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1% pada 2026.

Di tengah guncangan harga energi, Krishna mengatakan Indonesia telah mengambil langkah kebijakan, termasuk pengetatan moneter dan pemberian subsidi.

Namun, dia menekankan agar dukungan pemerintah tetap diberikan secara tepat sasaran dan tidak melampaui ruang fiskal yang tersedia.

"Kami melihat ada manfaat dari pemberian dukungan, tetapi dukungan tersebut harus diberikan dalam kerangka fiskal yang ada. Indonesia telah melakukan hal tersebut," katanya.

IMF sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga kehati-hatian fiskal di tengah meningkatnya risiko ekonomi global. Ketergantungan negara-negara Asia terhadap impor energi, terutama dari Timur Tengah, membuat kawasan tersebut rentan terhadap lonjakan harga minyak dan gas.

Guncangan energi yang berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan inflasi sekaligus membebani pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ruang fiskal sejumlah negara semakin terbatas setelah menghadapi berbagai guncangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, IMF mendorong negara-negara di kawasan Asia Pasifik memperkuat bantalan fiskal dan menerapkan kerangka fiskal jangka menengah yang kredibel.

Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah tetap memiliki ruang untuk merespons guncangan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan negara.

Kemdiktisaintek, Kemenko PM, dan Pemprov Jateng Perkuat Kolaborasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Jumat, 16 Oktober 2026 20.30 WIB

<https://kemdiktisaintek.go.id/en/news/article/kemdiktisaintek-kemenko-pm-dan-pemprov-jateng-perkuat-kolaborasi-percepatan-pengentasan-kemiskinan>

Salatiga - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perguruan tinggi memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengentaskan kemiskinan dan berkelanjutan.

Sinergi strategis tersebut ditegaskan dalam Seminar Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat bertema "Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh Kemenko PM di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10).

Melalui kolaborasi ini, potensi perguruan tinggi dioptimalkan tidak hanya dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai entitas penggerak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan di berbagai wilayah. Pemerintah telah menetapkan 16.550 desa sebagai lokasi prioritas pengentasan kemiskinan pada 2026. Sementara itu, di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,21 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Selain memiliki keunggulan dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset, perguruan tinggi juga mempunyai berbagai tradisi akademik yang berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Ada potensi yang belum dioptimalkan oleh perguruan tinggi dan itu menurut saya dalam konteks pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting. Kita punya tradisi akademik yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal," ujar Wamen Fauzan.

Dengan memanfaatkan potensi akademik yang dimiliki, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan pengetahuan dan inovasi, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kampus benar-benar menjadi satu ekosistem, menjadi entitas sosial yang tidak hanya berada di dalam menara gading, tetapi menjadi menara air yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Wamendiktisaintek.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, dari program yang berorientasi pada pemberian bantuan menuju pemberdayaan yang mampu membangun kemandirian masyarakat.

Menko Muhaimin menyebutkan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi agar kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berbasis ilmu pengetahuan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah mengurangi angka kemiskinan melalui penyediaan data, riset, serta pendampingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan sekitar 133 perguruan tinggi untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk melalui KKN tematik, penelitian, dan pendampingan masyarakat di desa.

Gubernur Luthfi juga menilai keterlibatan mahasiswa melalui KKN tematik menjadi salah satu langkah penting untuk membantu pemerintah daerah memahami kondisi masyarakat secara langsung. Data dan hasil pendampingan yang dilakukan perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kemdiktisaintek terus mendorong perguruan tinggi agar semakin aktif mengambil peran dalam pembangunan nasional melalui optimalisasi seluruh potensi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Melalui semangat Diktisaintek Berdampak, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperluas manfaat tridarma perguruan tinggi, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Jadi Tantangan Usaha, 57% Industri Mikro Kecil di Jawa Tengah Terjebak Masalah Modal

Jumat, 16 Oktober 2026 10.00 WIB

Zalfa Rona

<https://data.goodstats.id/statistic/jadi-tantangan-usaha-57-industri-mikro-kecil-di-jawa-tengah-terjebak-masalah-modal-T4LP8>

Sektor industri pengolahan memiliki peran penting terhadap perekonomian di Jawa Tengah. Dalam publikasi Profil Industri Mikro kecil Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tercatat bahwa sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 33,39% terhadap perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025.

Dalam hal ini, perkembangan globalisasi dan penyebaran informasi yang cepat telah mendorong perubahan struktur sosial ekonomi di masyarakat, usaha Industri Mikro Kecil (IMK) turut menjadi prioritas kebijakan ekonomi, karena dirasa mampu bertahan terhadap krisis.

Hasil survei IMK tahun 2025 memperlihatkan bahwa jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Jawa Tengah mencapai 843,89 ribu usaha. Dari total keseluruhan tersebut, 303 ribu merupakan usaha IMK, yang mana kelompok Industri makanan menjadi yang terbanyak.

Meskipun demikian, menjalankan usaha tak luput dari kendala dan kesulitan. Sebanyak 55,89% usaha IMK mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, kebanyakan dirasakan oleh kelompok industri logam dasar.

Kendala atau kesulitan yang paling banyak dirasakan oleh usaha IMK adalah terkait pemodal, persentasenya mencapai 57,72%. Permasalahan ini mayoritas dihadapi oleh kelompok industri makanan yang berkontribusi hingga 37,73% dari total.

Pemasaran atau penjualan menjadi kendala kedua yang dialami oleh usaha IMK di Jawa Tengah, sebanyak 36,60% IMK harus menghadapinya. Hal ini berkaitan erat dengan keterjaminan pasar yang harus tersedia, bukan hanya membuat atau memproduksi barang saja.

Industri makanan kembali menyumbang 36,42% untuk permasalahan ini, yang berarti hampir seluruhnya dirasakan oleh industri IMK tersebut.

Lebih lanjut, kesulitan akan bahan baku berada di urutan ketiga dengan persentase sebesar 33,48%. BPS Provinsi Jawa tengah menekankan bahwa semua usaha IMK memiliki ketergantungan terhadap bahan baku, karena proses produksi tidak dapat dilakukan jika tidak ada bahan baku.

Selain itu, kendala tenaga kerja menyusul di urutan keempat sebanyak 9,54%, diikuti oleh persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan gas yang menyentuh angka 5,16%.

Daftar kendala atau kesulitan yang dialami oleh IMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 ditutup oleh permasalahan infrastruktur dengan total 3,16%.

China Dukung IMF Perketat Pengawasan Risiko Fiskal Negara Maju

Sabtu, 17 Oktober 2026 21:26 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-dukung-imf-perketat-pengawasan-risiko-fiskal-negara-maju>

KONTAN.CO.ID - Bangkok. Gubernur bank sentral Tiongkok pada hari Sabtu (17/10) menyatakan bahwa Beijing mendukung langkah Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan pengawasan terhadap risiko fiskal di negara-negara maju utama beserta dampak rambatannya.

Melansir dari Reuters, Gubernur Bank Rakyat Tiongkok (People's Bank of China), Pan Gongsheng, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan Komite Moneter dan Keuangan Internasional (International Monetary and Financial Committee) yang berlangsung di sela-sela pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok.

Lonjakan biaya pinjaman, defisit fiskal yang tinggi secara kronis di negara-negara ekonomi utama, serta sentimen investor yang tidak stabil yang diperparah oleh pengeluaran modal besar-besaran di sektor kecerdasan buatan (AI) telah memicu gejolak luas di pasar obligasi global.

Menurut pernyataan dari bank sentral tersebut, Pan mendesak IMF untuk menganalisis ketidakseimbangan global dan memberikan penekanan lebih besar pada dampak faktor-faktor keuangan, seperti arus modal, terhadap ketidakseimbangan tersebut.

Kepala bank sentral Tiongkok itu menegaskan bahwa Tiongkok mendukung sistem perdagangan multilateral dan menentang segala bentuk tindakan proteksionisme.

Sebelumnya pada minggu ini, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan bahwa Tiongkok perlu beralih dari pertumbuhan yang didorong oleh ekspor menuju pertumbuhan yang lebih mengandalkan konsumsi domestik.

IMF Dorong Dukungan Pembiayaan bagi Negara yang Terdampak Perang

Sabtu, 17 Oktober 2026 15:27 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-dorong-dukungan-pembiayaan-bagi-negara-yang-terdampak-perang>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Negara-negara anggota Dana Moneter Internasional (IMF) menyerukan peningkatan dukungan bagi negara-negara yang menghadapi tantangan pembiayaan jangka pendek akibat dampak rambatan negatif dari perang dan tingginya harga energi.

Mereka juga menyatakan bahwa risiko ekonomi masih lebih condong ke arah penurunan.

Di sisi lain, meskipun terdapat peningkatan investasi dan perdagangan berkat teknologi intelijen canggih (advanced intelligence technologies), teknologi tersebut juga membawa risiko. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan di Bangkok.

“Konflik yang semakin memanas dan ketegangan perdagangan dapat semakin mengganggu jalur perdagangan penting, memperburuk tekanan harga komoditas, termasuk produk energi hasil pengolahan, serta memperburuk ketahanan energi dan pangan,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan selaku Ketua IMFC.

IMFC merupakan komite pengarah utama bagi IMF, lembaga pemberi pinjaman yang beranggotakan 191 negara dan berperan dalam menangani krisis.

Al-Jadaan mengatakan kepada Reuters bahwa redaksi pernyataan tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota.

Awal pekan ini, Amerika Serikat mendesak negara-negara anggota IMF lainnya untuk mengganti istilah kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi “superintelligence” dalam pernyataan tersebut.

Usulan itu sejalan dengan istilah yang lebih disukai Presiden AS Donald Trump untuk teknologi tersebut, kata seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS kepada Reuters.

Namun, versi final pernyataan Ketua IMFC tidak memuat referensi apa pun terhadap kecerdasan buatan.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa dampak yang belum pasti dari teknologi intelijen canggih, bersama dengan kenaikan imbal hasil obligasi di negara-negara ekonomi utama yang merambat ke negara-negara dengan tingkat utang tinggi, dapat memperbesar kerentanan makrofinansial.

“Perubahan teknologi yang berlangsung cepat, pergeseran demografi, semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan bencana alam, serta fragmentasi geoekonomi semakin memperumit pilihan kebijakan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Negara-negara anggota sepakat untuk mendukung negara-negara yang melakukan reformasi dan mengatasi kerentanan utang.

Perhatian khusus diberikan kepada negara-negara berpendapatan rendah, negara-negara berpendapatan menengah yang rentan, serta negara-negara yang terdampak konflik.

“Kami mendorong peningkatan dukungan bagi negara-negara dengan utang yang berkelanjutan serta agenda reformasi dan pertumbuhan yang kuat, tetapi menghadapi tantangan pembiayaan jangka pendek,” demikian pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga mencatat bahwa sejumlah negara anggota telah memberikan komitmen dukungan terhadap Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) milik IMF, yang mendukung negara-negara miskin dan berkembang.

Defisit Anggaran AS Tembus US\$ 1,99 Triliun pada 2026, Tertinggi dalam Lima Tahun

Sabtu, 17 Oktober 2026 09:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-anggaran-as-tembus-us-199-triliun-pada-2026-tertinggi-dalam-lima-tahun>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Defisit anggaran Amerika Serikat (AS) meningkat menjadi hampir US\$ 2 triliun pada tahun fiskal 2026. Kenaikan ini dipicu oleh pengembalian tarif impor, lonjakan biaya pembayaran utang, serta peningkatan belanja pemerintah untuk program sosial dan pertahanan.

Mengutip Reuters, Jumat (16/10/2026), berdasarkan data Departemen Keuangan AS, defisit anggaran pemerintah AS bertambah US\$ 217 miliar menjadi US\$ 1,99 triliun pada tahun fiskal yang berakhir 30 September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan defisit sebesar US\$ 1,78 triliun pada tahun fiskal 2025.

Defisit pada 2026 menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir, sekaligus mencatatkan kesenjangan anggaran tahunan terbesar ketiga sepanjang sejarah AS. Defisit terakhir kali mencapai angka yang lebih tinggi pada tahun fiskal 2021, yakni US\$ 2,77 triliun, ketika pemerintah menggelontorkan belanja besar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tahun fiskal 2026 juga merupakan tahun anggaran penuh pertama selama masa jabatan kedua Presiden AS Donald Trump.

Penerimaan dan Belanja Pemerintah AS Mencetak Rekor

Departemen Keuangan AS mencatat penerimaan pemerintah pada tahun fiskal 2026 mencapai rekor US\$ 5,40 triliun. Jumlah tersebut meningkat US\$ 169 miliar atau sekitar 3% dibandingkan penerimaan sebesar US\$ 5,24 triliun pada tahun fiskal sebelumnya.

Namun, belanja pemerintah meningkat lebih cepat. Total pengeluaran mencapai rekor US\$ 7,40 triliun, naik US\$ 386 miliar atau sekitar 6% dari US\$ 7,01 triliun pada tahun fiskal 2025.

Peningkatan pengeluaran tersebut antara lain didorong oleh kenaikan belanja program jaminan sosial, seperti Social Security dan Medicare, serta tambahan belanja pertahanan sebesar US\$ 48 miliar.

Di sisi lain, pemerintah AS menghadapi beban pembayaran bunga utang yang semakin besar seiring dengan meningkatnya total utang nasional.

Pengeluaran untuk pembayaran bunga utang mencapai rekor US\$ 1,36 triliun pada tahun fiskal 2026. Nilai tersebut melonjak US\$ 144 miliar atau 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pos pembayaran bunga utang kini menjadi komponen pengeluaran pemerintah terbesar ketiga, setelah Social Security serta gabungan belanja Medicare dan Medicaid.

Sementara itu, total utang AS telah menembus US\$ 40 triliun sekitar dua bulan sebelum laporan anggaran tersebut diterbitkan.

Pengembalian Tarif Impor Trump Menekan Penerimaan

Faktor lain yang memperlebar defisit anggaran AS adalah penurunan penerimaan bersih dari tarif impor setelah Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan yang membatalkan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump pada tahun pertamanya kembali menjabat.

Putusan tersebut memicu pengembalian tarif senilai US\$ 145 miliar sepanjang tahun fiskal 2026.

Akibatnya, penerimaan bersih dari tarif impor turun 11% menjadi sekitar US\$ 173 miliar. Secara keseluruhan, penerimaan bersih tarif tercatat turun US\$ 22 miliar dibandingkan periode sebelumnya.

Pengembalian tarif tersebut turut mengurangi penerimaan pemerintah di tengah peningkatan kebutuhan belanja, sehingga menambah tekanan terhadap posisi fiskal AS.

Belanja Pertahanan AS Naik 6%

Belanja pertahanan AS juga meningkat seiring dengan kebutuhan anggaran pemerintah. Pada tahun fiskal 2026, pengeluaran untuk sektor pertahanan mencapai US\$ 917 miliar, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan seberapa besar kenaikan belanja pertahanan tersebut berkaitan dengan perang yang dimulai oleh Trump dan Israel terhadap Iran pada awal tahun ini.

Kenaikan belanja pertahanan tersebut menambah tekanan terhadap anggaran pemerintah, terutama ketika biaya pembayaran bunga utang dan program sosial juga terus meningkat.

Departemen Keuangan AS memperkirakan rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 6,2% pada tahun fiskal 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio defisit aktual sebesar 5,8% pada tahun fiskal 2025.

Namun, pejabat Departemen Keuangan AS tidak mengungkapkan estimasi PDB yang digunakan untuk menghitung rasio defisit tersebut.

Anggaran AS September 2026 Berbalik Defisit

Pada September 2026, bulan terakhir tahun fiskal 2026, pemerintah AS mencatat defisit anggaran sebesar US\$ 27 miliar.

Kondisi tersebut berbalik dibandingkan September 2025, ketika pemerintah mencatat surplus anggaran sebesar US\$ 198 miliar.

Rupiah Tembus Rp 18.000, Defisit APBN 2026 Berisiko Membengkak

Sabtu, 17 Oktober 2026 06:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-tembus-rp-18000-defisit-apbn-2026-berisiko-membengkak>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi pemerintah, dan harga minyak dunia berpotensi memperberat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Jika tidak diimbangi dengan pengendalian belanja, defisit anggaran bahkan berisiko melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,50% atau 89 poin ke level Rp 18.027 per dolar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) berada di level Rp 18.052 per dolar AS.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, tekanan di pasar saham yang merambat ke pasar valuta asing dan obligasi berpotensi meningkatkan beban fiskal pemerintah.

Situasi tersebut semakin menantang karena Indonesia juga menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja negara.

Juniman menjelaskan, gejolak pasar keuangan yang berkaitan dengan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) berawal dari persoalan kepercayaan investor global terhadap pasar keuangan Indonesia. Sentimen tersebut kemudian mendorong arus modal keluar atau capital outflow, yang turut menekan rupiah dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Jadi, dampaknya tidak terjadi secara langsung. Awalnya, sentimen MSCI menekan pasar modal dan memicu arus modal keluar. Arus modal keluar tersebut kemudian menekan rupiah dan pasar obligasi kita," ujar Juniman kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Menurut Juniman, pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS membuat nilai tukar jauh lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Berdasarkan perhitungannya, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS berpotensi menambah defisit APBN hampir Rp 900 miliar.

Dengan asumsi rupiah bertahan di level Rp 18.000 per dolar AS, terdapat selisih Rp 1.500 dari asumsi APBN. Kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap defisit anggaran sekitar Rp 13,5 triliun.

Tekanan fiskal juga berasal dari kenaikan imbal hasil atau yield SBN. Juniman menyebut, asumsi imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun dalam APBN berada di kisaran 6,9%, sedangkan saat ini sudah melampaui 7,3%.

Ia memperkirakan, setiap kenaikan yield SBN sebesar 10 basis poin berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Jadi, kenaikan imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN," katanya.

Selain nilai tukar dan imbal hasil obligasi, kenaikan harga minyak dunia turut menjadi risiko bagi anggaran negara. Juniman mencatat, harga minyak saat ini berada di kisaran US\$ 100 per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sekitar US\$ 70 per barel.

Menurut perhitungannya, setiap kenaikan harga minyak sebesar US\$ 1 per barel berpotensi menambah tekanan terhadap defisit sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dengan harga minyak sekitar US\$ 30 per barel di atas asumsi APBN, tekanan terhadap anggaran berpotensi semakin besar. Terlebih, pemerintah masih perlu memperhitungkan kebutuhan belanja lainnya, termasuk pembayaran utang, subsidi, dan kompensasi.

Respons pemerintah dan otoritas jadi kunci

Juniman menilai, besarnya tekanan terhadap pasar keuangan dan APBN akan sangat bergantung pada respons pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, pemerintah perlu segera memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan kredibel.

Ia memperingatkan, respons yang tidak tegas justru berpotensi memperburuk kondisi pasar keuangan. Persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sentimen jangka pendek, tetapi juga menyangkut kepercayaan investor terhadap regulasi dan struktur pasar modal Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memperjelas keterbukaan informasi (disclosure), serta menindak tegas praktik yang merusak integritas pasar modal.

Menurut Juniman, penegakan hukum perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan kecurangan di pasar modal, termasuk transaksi terkoordinasi yang melanggar ketentuan dan praktik insider trading.

"Kalau pemerintah dan otoritas bisa meyakinkan investor bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan kredibel, setidaknya arus modal keluar dari pasar keuangan kita bisa dihentikan," ujarnya.

Juniman menambahkan, tekanan pasar berpotensi mulai mereda apabila otoritas memberikan respons yang tepat. Sebaliknya, jika penyelesaian persoalan struktural pasar modal terkesan berlarut-larut, tekanan terhadap pasar keuangan dapat semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia belum serta-merta turun menjadi standalone market ataupun frontier market. Menurutnya, masih terdapat proses konsultasi sehingga perubahan klasifikasi tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan final.

Rupiah diproyeksi bertahan di kisaran Rp 18.000 hingga akhir tahun

Di tengah tekanan pasar keuangan, Juniman memperkirakan rupiah akan bertahan di kisaran Rp 17.900 hingga Rp 18.000 per dolar AS sampai akhir 2026.

Proyeksi tersebut bergantung pada respons kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Juniman menilai, BI perlu mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk kenaikan suku bunga, untuk menjaga daya tarik investasi di dalam negeri.

Menurutnya, kenaikan suku bunga dapat membantu meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diharapkan mampu menahan arus modal keluar, baik dari pasar saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya.

Ia juga mengingatkan agar BI tidak hanya mengandalkan intervensi pasar secara terus-menerus karena langkah tersebut berpotensi menguras cadangan devisa.

Defisit APBN berisiko tembus 3% jika belanja tidak diefisienkan

Lebih lanjut, Juniman menilai target defisit APBN dalam outlook laporan semester (Lapsem) 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB masih dapat dipertahankan. Namun, pemerintah perlu melakukan efisiensi, refocusing, serta meningkatkan efektivitas belanja negara.

Menurutnya, tanpa pengendalian belanja yang memadai, defisit APBN berpotensi menembus 3% terhadap PDB.

Risiko tersebut muncul dari kombinasi sejumlah faktor, mulai dari pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, hingga lonjakan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

"Kalau seluruh belanja tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran dan perkembangan kondisi ekonomi, defisit APBN berpotensi menembus 3% dari PDB," kata Juniman.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas belanja agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, terutama pada kuartal IV-2026.

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, DEN Soroti Peran Swasta, Deregulasi hingga Hilirisasi

Sabtu, 17 Oktober 2026 05:15 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/genjot-pertumbuhan-ekonomi-den-soroti-peran-swasta-deregulasi-hingga-hilirisasi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut peningkatan peran sektor swasta menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 mendatang.

Untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah perlu mempercepat deregulasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong industrialisasi dan digitalisasi.

Anggota DEN sekaligus Direktur Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi Mochammad Firman Hidayat mengatakan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 6%–7% untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Namun, target tersebut menghadapi tantangan berupa perlambatan ekonomi global, penurunan arus investasi dunia, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan harga energi.

“Artinya, mau enggak mau kita harus melakukan reformasi,” ujar Firman dalam acara Outlook 2027: Winning the Next Growth Cycle di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurut Firman, kontribusi sektor swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) dan investasi mencapai sekitar 88%. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang mampu meningkatkan kepercayaan investor agar sektor swasta lebih aktif menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkah yang disoroti adalah deregulasi. Firman mencontohkan pengalaman Indonesia pada era 1980-an, ketika penyederhanaan perizinan dan pembukaan investasi yang lebih luas turut mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Upaya serupa dinilai perlu diperkuat untuk mendorong investasi dan aktivitas industri saat ini.

Kepastian Hukum

Selain penyederhanaan aturan, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam keputusan investasi. DEN, kata Firman, tengah mendorong perbaikan ketentuan hukum, termasuk terkait definisi kerugian negara dan penerapan business judgment rule.

Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta dalam mengambil keputusan bisnis, berinovasi, dan berinvestasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Prasetya Mulya (IKA Prasmul) sekaligus President CEO Club Edy Sutrisman. Menurut Edy, konsistensi regulasi menjadi salah satu pertimbangan investor ketika menentukan penanaman modal di Indonesia.

“Regulasi yang tidak berubah-ubah itu menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik investor ketika ingin memasukkan investasinya ke Indonesia,” ujar Edy dalam forum yang sama.

Ia menilai, daya tarik investasi tidak hanya bergantung pada besarnya pasar dan peluang pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha memperkirakan risiko.

Ketidakpastian aturan dapat menyulitkan perusahaan menyusun proyeksi bisnis, termasuk untuk pembangunan fasilitas produksi, ekspansi pasar, dan pengembangan produk.

CEO Prasetya Mulya Executive Learning Institute (Prasmul-ELI) Citra Junika Siregar menambahkan, kepercayaan pelaku usaha perlu dijaga melalui kebijakan yang memberikan kepastian. Kemampuan perusahaan membaca perubahan global, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan teknologi, juga menjadi bekal untuk menangkap peluang bisnis.

Hilirisasi

Di luar reformasi regulasi, DEN melihat hilirisasi sumber daya alam, pengembangan kawasan industri, dan investasi infrastruktur digital sebagai peluang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Firman mencontohkan nilai ekspor nikel dan produk turunannya yang meningkat dari sekitar US\$ 1,5 miliar menjadi mendekati US\$ 40 miliar pada 2025.

Menurut dia, pendekatan hilirisasi juga berpotensi dikembangkan pada komoditas lain, seperti bauksit dan aluminium, untuk memperkuat basis industri nasional. Selain itu, investasi pusat data dan infrastruktur komputasi awan menjadi peluang yang perlu diimbangi dengan kesiapan pasokan listrik serta pengelolaan dampak lingkungan.

DEN juga menyoroti potensi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dalam menarik investasi. Firman mencontohkan Batam dan Kendal yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga model pengembangan kawasan tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk mendorong investasi lebih luas.

Sementara itu, digitalisasi dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Adopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), diharapkan dapat mendukung produktivitas dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Bagi dunia usaha, kombinasi deregulasi, kepastian hukum, hilirisasi, dan digitalisasi menjadi bagian penting dalam menyiapkan strategi pertumbuhan pada 2027. Firman menegaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi di tengah kondisi global yang menantang, partisipasi sektor swasta perlu diperkuat melalui iklim investasi yang lebih kondusif.

Outlook 2027, Dunia Usaha Siapkan Jurus Ini untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Sabtu, 17 Oktober 2026 05:45 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/outlook-2027-dunia-usaha-siapkan-jurus-ini-untuk-hadapi-ketidakpastian-global>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha Indonesia menghadapi tantangan menjaga pertumbuhan bisnis pada 2027 di tengah ketidakpastian geopolitik, disrupsi teknologi, dan perubahan kebijakan.

Untuk menjaga minat investasi, pelaku usaha menilai penguatan daya saing dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menentukan arah ekspansi perusahaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dunia usaha perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.

Menurut dia, pelaku usaha perlu bertumpu pada tiga pilar, yakni crisis, competition, dan compassion atau ketahanan menghadapi krisis, peningkatan daya saing, serta kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif.

"Untuk menghadapi tantangan ini sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dunia usaha perlu berpijak pada tiga pilar utama: Crisis, Competition, dan Compassion," ujarnya acara Outlook 2027: Winning The Next Growth Cycle yang digelar di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Dalam pemaparannya bertajuk Winning the Next Growth Cycle, Anindya menjelaskan bahwa dunia usaha kini menghadapi tekanan secara bersamaan, mulai dari konfrontasi geoekonomi, perlambatan ekonomi, risiko iklim ekstrem, hingga disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Di tengah kondisi tersebut, perusahaan perlu menjaga struktur keuangan dan arus kas (cash flow) agar mampu bertahan sekaligus menangkap peluang baru. Anindya menilai krisis juga dapat memunculkan pergantian pemain yang unggul di pasar, bergantung pada kemampuan perusahaan beradaptasi.

Selain ketahanan bisnis, peningkatan daya saing menjadi tantangan bagi Indonesia. Anindya menyoroti posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-48 dari 70 negara dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026.

Menurut dia, peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi bisnis diperlukan untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

"Namun, strategi pertumbuhan tidak hanya bergantung pada kesiapan perusahaan. Kepastian regulasi juga menjadi perhatian pelaku usaha dalam menyusun rencana investasi jangka panjang," jelasnya.

Konsistensi Kebijakan

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Prasetya Mulya (IKA Prasmul) sekaligus President CEO Club Edy Sutrisman mengatakan, konsistensi regulasi menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

"Kalau saya melihatnya, yang pertama seperti tadi dibahas bahwa memang kepastian hukum itu penting. Regulasi yang tidak berubah-ubah itu menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik investor ketika ingin memasukkan investasinya ke Indonesia," ujar Edy.

Menurut Edy, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pasar dan peluang pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuan investor memperkirakan risiko bisnis. Perubahan regulasi

yang sulit diprediksi dapat menambah ketidakpastian dalam menyusun proyeksi usaha dan menentukan kelayakan investasi.

Kepastian tersebut dibutuhkan untuk berbagai keputusan strategis perusahaan, mulai dari pembangunan fasilitas produksi, perekrutan tenaga kerja, ekspansi pasar, hingga pengembangan produk. Dengan aturan yang lebih konsisten, pelaku usaha memiliki landasan lebih jelas untuk menyusun perencanaan bisnis jangka panjang.

Senada, CEO Prasetya Mulya Executive Learning Institute (Prasmul-ELI) Citra Junika Siregar menilai kepercayaan menjadi elemen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan pelaku usaha melalui keputusan serta kebijakan yang konsisten.

Citra juga menekankan pentingnya kemampuan perusahaan membaca perubahan global, termasuk perkembangan geopolitik dan teknologi. Menurut dia, perubahan lingkungan bisnis tetap dapat membuka peluang bagi perusahaan yang mampu merespons lebih cepat.

Di sisi lain, Kadin mendorong dunia usaha mempercepat adaptasi teknologi dan memperkuat kolaborasi untuk memperluas basis pertumbuhan. Salah satu fokusnya adalah penerapan human-centered AI, yakni pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung kemampuan manusia, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang pekerjaan berkualitas.

Kadin juga mendorong perusahaan besar memperkuat kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan sekitar 63 juta unit usaha, UMKM mencakup 98% dari total unit usaha di Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja nasional, dan menyumbang 61,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Penguatan kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar global, serta masuk ke dalam rantai pasok yang lebih luas.

Berbagai tantangan tersebut menjadi pembahasan dalam forum Outlook 2027: Winning the Next Growth Cycle yang diselenggarakan Prasmul-ELI bersama IKA Prasetya Mulya.

Forum yang dihadiri lebih dari 200 pemimpin perusahaan, pemilik bisnis, dan komisaris dari berbagai industri itu membahas prospek investasi, kepemimpinan, serta kapabilitas organisasi untuk menghadapi siklus pertumbuhan berikutnya.

Bagi dunia usaha, persiapan menghadapi 2027 tidak hanya menyangkut kemampuan membaca prospek pasar, tetapi juga kesiapan mengelola risiko, menjaga kepastian perencanaan investasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun daya saing di tengah perubahan ekonomi global.

MSCI Picu Sentimen Pasar, Airlangga Sebut Fundamental Ekonomi RI Masih Kuat

Sabtu, 17 Oktober 2026 11:30 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/msci-picu-sentimen-pasar-airlangga-sebut-fundamental-ekonomi-ri-masih-kuat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menilai gejolak pasar keuangan Indonesia yang ditandai pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat (15/10/2026) tidak terlepas dari sentimen investor menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 mengenai konsultasi usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi pasar.

"Ya pertama tentu ada akibat dari pengumuman MSCI itu merupakan suatu hal, yang katakanlah lebih cepat daripada ekspektasi yang sebetulnya mereka menjanjikannya di bulan November, tapi ini di Oktober," ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Jumat (16/10/2026).

Meski pasar keuangan mengalami tekanan, Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Ia meminta investor membedakan gejolak yang dipicu sentimen pasar dengan kondisi fundamental perekonomian nasional.

"Kembali lagi, kemarin kita sudah sampaikan bahwa sebetulnya kita punya fundamental ekonomi kuat, tetapi yang dimainkan kan sekarang faktor sentimental," ujar Airlangga merespon pelemahan rupiah dan IHSG trading halt pasca pengumuman MSCI.

Airlangga berharap investor dapat memahami perbedaan antara sentimen pasar dan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Ia juga menilai perkembangan penilaian MSCI terhadap pasar modal domestik perlu dicermati lebih lanjut.

"Faktor sentimen ini kita berharap para investor paham mana yang sentimen, mana yang fundamental," katanya.

Selain itu, Airlangga mempertanyakan alasan lembaga pemeringkat atau penyedia indeks lainnya tidak mempermasalahkan hal serupa. Ia juga menyoroti MSCI yang dinilainya secara sistematis kerap menetapkan tenggat waktu terkait pelaksanaan reformasi pasar modal Indonesia.

"Kenapa rating agency yang lain tidak mempersoalkan hal ini, dan kenapa MSCI secara sistematis selalu membuka atau membuat deadline?" tanya Airlangga.

Meski demikian, Airlangga menyebut MSCI memberikan tenggat waktu baru pada April dan Juni 2027. Pemerintah akan mencermati tuntutan MSCI, terutama yang berkaitan dengan implementasi regulasi dan langkah-langkah reformasi pasar modal yang telah dijanjikan.

Menurut Airlangga, salah satu persoalan yang menjadi perhatian MSCI adalah proses implementasi regulasi dan langkah perbaikan pasar modal Indonesia yang dinilai memerlukan waktu cukup lama.

Ia mengakui bahwa proses tersebut membutuhkan penjelasan, termasuk mengenai tahapan yang harus dilalui sebelum perubahan dapat diterapkan. Kondisi ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk

memastikan reformasi pasar modal berjalan sesuai rencana dan perkembangannya dapat dipantau oleh investor.

"Ini menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa reformasi itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan. Terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri," jelasnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna mendorong langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan reformasi pasar modal. Ia berharap upaya perbaikan tersebut dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan atau timeline yang jelas.

Airlangga juga menyinggung pertemuan dengan MSCI di Bangkok yang berlangsung sekitar sepekan sebelum pengumuman. Ia mempertanyakan mengapa persoalan yang kini menjadi perhatian pasar tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Apalagi kemarin yang ketemu di Bangkok kan pimpinannya, bukan analisnya," ujar Airlangga.

Kendati mempertanyakan hal tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk terhadap MSCI. Pemerintah akan mencermati perkembangan selanjutnya terkait penilaian dan tuntutan lembaga penyedia indeks tersebut terhadap pasar modal Indonesia.

"Ya tentu kita lihat saja, tapi kita tidak boleh suudzon," katanya.

Dilirik Jepang, Bupati Blora Minta Dukungan Masyarakat Soal Rencana Investasi Biometan

Sabtu, 17 Oktober 2026

Jurnalis: Eko Wicaksono, Editor: Ulfa Puspa

<https://lingkarjateng.id/dilirik-jepang-bupati-blora-minta-dukungan-masyarakat-soal-rencana-investasi-biometan/>

BLORA, Lingkarjateng.id - Bupati Blora, Arief Rohman, menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan potensi investasi energi hijau yang ramah lingkungan.

Berikut adalah transkripsi lengkap dari teks yang terdapat pada gambar:

BLORA, Lingkarjateng.id – Bupati Blora, Arief Rohman, menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan potensi investasi energi hijau yang ramah lingkungan.

Pesan tersebut disampaikan terkait kunjungan calon investor asal Jepang, Toho Gas, yang tertarik membangun pabrik biometana di Blora.

Bupati Arief menjelaskan pabrik biometana diproyeksikan menjadi salah satu proyek biometana pelopor di Indonesia yang memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, khususnya limbah pertanian dan kotoran ternak.

Oleh karena itu, keterlibatan petani, peternak, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai penyedia rantai pasok bahan baku sangat penting untuk mendukung rencana tersebut.

“Sinergi antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat krusial. Selain mendukung transisi energi bersih nasional, hadirnya investasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak perekonomian warga Blora,” tuturnya saat dimintai keterangan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Dalam pertemuan dengan Toho Gas, disebutkan bahwa limbah pertanian dan kotoran ternak akan diolah melalui teknologi canggih. Limbah yang selama ini belum terkelola optimal akan diubah menjadi sumber energi bersih (biometana) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menurutnya rencana investasi dari perusahaan raksasa energi asal Jepang ini kian mempertegas posisi Kabupaten Blora sebagai daerah yang ramah investasi dan siap menjadi pelopor pengembangan energi hijau berbasis pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah.

“Bismillah, semoga rencana investasi ini berjalan lancar dan memberikan kemanfaatan bagi daerah,” ungkapnya.

Dari pertemuan tersebut, Bupati Arief menyebutkan bahwa rencana investasi dari Jepang masih proses peninjauan dengan memetakan potensi bahan baku yang ada di Blora. (adv)

IMF Sebut PDB India dan Inggris Bakal Salip Jepang

Minggu, 18 Oktober 2026, 20:38 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3034679/imf-sebut-pdb-india-dan-inggris-bakal-salip-jepang>

Bangkok, Beritasatu.com – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan penurunan peringkat Jepang dalam daftar negara dengan produk domestik bruto (PDB) nominal terbesar di dunia pada 2027. Peringkat Jepang akan turun dari posisi keempat menjadi keenam.

Posisi Jepang diperkirakan disalip India dan Inggris di tengah pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta pertumbuhan ekonomi Jepang yang lesu.

Dilansir dari Kyodo, berdasarkan laporan World Economic Outlook yang dirilis IMF bulan ini, PDB nominal Jepang diperkirakan mencapai US\$ 4,3419 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi US\$ 4,4676 triliun pada 2027. Perhitungan tersebut tampaknya menggunakan asumsi nilai tukar di kisaran 158 yen per dolar AS.

Sementara itu, PDB nominal India diproyeksikan mencapai US\$ 4,5211 triliun pada 2027. Dengan capaian tersebut, India diperkirakan naik dari peringkat keenam menjadi keempat dalam daftar ekonomi terbesar dunia.

Inggris juga diperkirakan melampaui Jepang pada tahun yang sama. IMF memproyeksikan PDB nominal Inggris mencapai US\$ 4,4889 triliun pada 2027, lebih tinggi daripada proyeksi Jepang.

Perkiraan terbaru ini lebih cepat dibandingkan proyeksi IMF dalam laporan kuartalan yang dirilis April lalu. Saat itu, IMF memperkirakan Inggris baru akan menyalip Jepang pada 2029.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi riil, Jepang diproyeksikan tumbuh 0,7% pada 2026 dan 2027. Angka tersebut jauh di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi India yang diperkirakan mencapai 7% pada kedua tahun tersebut berdasarkan tahun fiskal.

IMF menyatakan India tetap menjadi salah satu ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, didukung permintaan domestik yang tangguh dan aktivitas sektor jasa yang kuat.

Adapun ekonomi Inggris diperkirakan tumbuh 1,3% pada 2026 dan melambat menjadi 1,2% pada 2027.

Jepang sebelumnya telah lama menempati posisi kedua dalam daftar ekonomi terbesar dunia. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi China membuat Jepang turun ke peringkat ketiga pada 2010. Posisi tersebut kembali merosot pada 2023 setelah Jerman menyalip Jepang, sehingga negara itu berada di peringkat keempat.

Jika proyeksi terbaru IMF terealisasi, Jepang akan kembali kehilangan dua posisi dalam daftar ekonomi terbesar dunia pada 2027, sementara India dan Inggris naik ke peringkat keempat dan kelima.

Minyak Dunia Naik dan Rupiah Melemah, Defisit APBN Berisiko Mendekati 3%

Minggu, 18 Oktober 2026 18:37 WIB

Reporter: Vivit Dewi, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/minyak-dunia-naik-dan-rupiah-melemah-defisit-apbn-berisiko-mendekati-3>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga minyak mentah dunia di tengah pelemahan rupiah berpotensi menambah beban impor energi Indonesia.

Kombinasi kedua faktor tersebut meningkatkan biaya pembelian minyak dalam rupiah sekaligus memperbesar kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Mengacu pada data Bloomberg, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup naik 3,51% ke level US\$ 101,41 per barel pada Jumat (16/10/2026). Secara mingguan, harga WTI menguat 10,41% berdasarkan data Trading Economics.

Pada periode yang sama, rupiah ditutup melemah ke level Rp 18.027 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan energi dan anggaran negara, terutama jika harga minyak bertahan tinggi.

Analisis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah meningkatkan kebutuhan dolar AS.

Permintaan valuta asing juga berasal dari pembayaran utang jatuh tempo serta pembagian dividen perusahaan.

“Karena kelemahan mata uang rupiah dan naiknya harga minyak mentah ini membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi, kemudian utang jatuh tempo pun juga harus dibayarkan, kemudian pembagian dividen oleh perusahaan-perusahaan yang ada di bursa ini pun juga harus dibayarkan,” ujar Ibrahim dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Menurut Ibrahim, tekanan harga minyak dan nilai tukar juga berpotensi memperberat beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia memperkirakan defisit APBN berpotensi mendekati 3%, lebih tinggi dari asumsi 2,85% yang disebutkan dalam APBN.

Di sisi lain, pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui program swasembada solar.

Namun, tingginya harga minyak mentah dan pelemahan rupiah masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik.

Ibrahim menilai, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, terutama ketika tekanan harga komoditas dan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi.

Risiko pasokan juga masih membayangi pergerakan harga minyak dunia. Ibrahim menyoroti perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, termasuk serangan terhadap fasilitas minyak Rusia serta ketegangan di sekitar Selat Hormuz.

Situasi tersebut berpotensi mengganggu pasokan minyak global dan menjaga harga tetap tinggi. Jika kondisi ini berlanjut, tekanan terhadap kebutuhan dolar AS untuk impor energi Indonesia juga dapat bertahan.

“Ini yang mengindikasikan kemungkinan besar masih akan terus melemah. Di sisi lain, masalah harga minyak yang tinggi dan impor energi yang cukup besar berdampak terhadap defisit APBN,” tuturnya.

Untuk perdagangan pekan depan, Ibrahim memperkirakan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran US\$ 94,20 hingga US\$ 104,80 per barel.

Dengan rentang tersebut, harga minyak masih berpeluang kembali menembus level US\$ 100 per barel.

BI Diproyeksi Kerek BI-Rate 25 bps pada RDG Oktober 2026

Minggu, 18 Oktober 2026 14:48 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-diproyeksi-kerek-bi-rate-25-bps-pada-rdg-oktober-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) diproyeksi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026. Sekedar mengingatkan, RDG BI akan digelar pada 20-21 Oktober 2026.

Kenaikan suku bunga tersebut dianggap diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan eksternal dan risiko arus keluar modal asing.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz memperkirakan, BI-Rate masih berpotensi meningkat hingga 6,25% pada akhir 2026.

Tekanan eksternal yang meningkat, termasuk risiko arus keluar modal setelah pengumuman proposal reklasifikasi Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), menjadi salah satu faktor yang memperkuat urgensi stabilisasi pasar keuangan domestik.

“Kami memperkirakan BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada RDG Oktober, dengan potensi mencapai 6,25% pada akhir 2026,” ujar Faiz kepada Kontan, Minggu (18/10/2026).

Menurutnya, pertimbangan utama kenaikan suku bunga mencakup tingginya imbal hasil aset global, risiko pelebaran premi risiko Indonesia, serta kebutuhan pembiayaan eksternal yang masih besar.

Faiz menjelaskan, Indonesia masih membutuhkan aliran modal asing untuk menopang pembiayaan eksternal. Pihaknya memproyeksikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sebesar 1,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan meningkat menjadi 1,6% pada 2027.

Dengan kondisi tersebut, selisih imbal hasil aset domestik terhadap aset berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) perlu tetap menarik untuk mempertahankan minat investor asing terhadap aset keuangan Indonesia.

Risiko tersebut semakin perlu diwaspadai seiring dengan potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Berdasarkan perhitungannya, apabila reklasifikasi tersebut terealisasi, potensi penjualan saham oleh investor asing diperkirakan mencapai US\$ 2,9 miliar hingga US\$ 5,8 miliar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi bersyarat apabila reklasifikasi benar-benar terjadi. Investor aktif juga berpotensi mengurangi eksposur terhadap pasar saham Indonesia sebelum keputusan final diumumkan.

Bagi BI, menurut Faiz, tekanan terhadap rupiah tidak hanya dinilai dari level nilai tukar, tetapi juga dari kecepatan pelemahan, persistensi arus keluar modal, serta dampaknya terhadap inflasi dan kepercayaan pasar.

Ia menambahkan, peluang kenaikan suku bunga kembali terbuka karena BI selama ini menerapkan kebijakan moneter yang bersifat pre-emptive atau antisipatif untuk merespons potensi tekanan terhadap stabilitas perekonomian.

“BI selalu menekankan bahwa kebijakan moneter pre-emptive yang tergambar dari sudah naiknya BI-Rate sebesar 100 bps beberapa waktu lalu. Sekarang ada shock faktor baru yang di luar perkiraan, sehingga menurut saya ada chance BI akan pre-emptive lagi terhadap dampak tekanan arus modal keluar ini,” jelasnya.

Namun, kenaikan suku bunga tetap perlu dilakukan secara terukur agar tidak menekan momentum pertumbuhan ekonomi. Menurut Irman, kebijakan moneter tersebut perlu dilengkapi dengan kebijakan makroprudensial yang tetap mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Ia bilang, ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan ruang penyesuaian kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45% pada semester I 2026.

Di sisi lain, membiarkan tekanan terhadap rupiah berlangsung berkepanjangan juga berisiko meningkatkan biaya impor, beban pembayaran utang dalam valuta asing, serta premi risiko Indonesia di mata investor.

Karena itu, ia menjelaskan, stabilisasi nilai tukar yang kredibel menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

BI Dorong Kerja Sama Internasional Melalui Penguatan Mata Uang Lokal

Minggu, 18 Oktober 2026 11:46 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-dorong-kerja-sama-internasional-melalui-penguatan-mata-uang-lokal>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Destry Damayanti dalam angkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank). Pertemuan ini mencakup pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (FMCBG), yang berlangsung pada 12-18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.

Destry menyampaikan, penguatan kerja sama internasional tersebut dapat dilakukan antara lain melalui perluasan penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam perdagangan dan investasi.

Menurutnya, transaksi menggunakan mata uang lokal mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga dan menekan paparan terhadap gejolak nilai tukar global. Dengan demikian, perluasan transaksi mata uang lokal dapat mendukung ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi gejolak eksternal.

Selain melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal, penguatan ketahanan ekonomi juga memerlukan sistem keuangan digital yang inovatif dan tepercaya. Destry mengapresiasi capaian Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital, sehingga inovasi dapat berkembang dengan tetap menjaga perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.

Bank Indonesia juga mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.

“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” kata Destry dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, BI mendorong pembayaran QR lintas negara dan transaksi mata uang lokal untuk meningkatkan efisiensi pembayaran, mendukung perdagangan, dan memperluas inklusi keuangan.

Di dalam negeri, Bank Indonesia juga memperluas manfaat digitalisasi keuangan melalui penggunaan QRIS oleh generasi muda dan UMKM untuk membangun rekam jejak transaksi digital dan meningkatkan akses ke pembiayaan formal.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam pertemuan IMF–World Bank menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) untuk memperkuat ketahanan ekonomi dunia.

Agenda ini mencakup pemeliharaan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, perbaikan iklim usaha dan modernisasi pasar tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta, serta pemanfaatan AI dan digitalisasi yang didukung investasi pada infrastruktur digital dan energi berkelanjutan.

Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan global, mengelola kerentanan utang, dan menjaga kelancaran perdagangan. Selain itu, IMF menekankan penguatan jaringan pengaman keuangan global, penyediaan pembiayaan sesuai kebutuhan negara anggota, serta reformasi kuota dan tata kelola IMF.

Pembahasan berlanjut dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menyoroti penguatan kerja sama internasional untuk membangun sektor keuangan yang inovatif dan berdaya tahan.

Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, pembahasan mencakup peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertemuan ini juga menandai serah terima Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan otoritas global untuk bersama menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rupiah Berisiko Melemah ke Rp 18.200, Simak Sentimen Pemicunya

Minggu, 18 Oktober 2026 19:43 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupee-berisiko-melemah-ke-rp-18200-simak-sentimen-pemicunya>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah berisiko melanjutkan pelemahan pada perdagangan awal pekan depan, setelah kembali menembus level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu.

Melansir data Bloomberg, Jumat (16/10/2026), kurs rupiah di pasar spot melemah Rp 89 atau 0,50% menjadi Rp 18.027 per dolar Amerika Serikat (AS). Dalam sepekan, kurs rupiah spot melemah total 0,71% dari posisi Rp 17.899 per dolar AS pada Jumat (9/10/2026).

Kurs rupiah Jisdor bahkan melemah Rp 104 atau 0,58% dalam sehari menjadi Rp 18.052 per dolar AS pada hari ini. Pelemahan kurs rupiah Jisdor mencapai 0,94% dari posisi Rp 17.884 per dolar AS pada pekan lalu.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan, kondisi ini mencerminkan meningkatnya kerentanan ekonomi domestik dan melemahnya kepercayaan pasar.

Persoalan dasar dari pelemahan saat ini adalah ketahanan eksternal yang belum cukup kuat untuk meredam guncangan global, sementara persepsi risiko terhadap aset domestik meningkat.

Katanya, tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari sentimen global, tetapi juga meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik dan kepercayaan investor terhadap aset Indonesia.

“Tingginya imbal hasil US Treasury dan kebijakan moneter The Fed yang ketat memang menekan mata uang negara berkembang. Namun, sentimen MSCI, risiko arus modal keluar, kebutuhan valuta asing, serta kekhawatiran terhadap disiplin fiskal memperbesar tekanan rupiah,” jelas Rizal kepada Kontan, Minggu (18/10/2026).

Untuk perdagangan awal pekan, Rizal memperkirakan, rupiah masih menghadapi tekanan dengan volatilitas yang tinggi. Risiko arus modal keluar dan ketidakpastian global berpotensi membuat pergerakan rupiah tetap rentan melemah.

Ia menilai intervensi Bank Indonesia (BI) diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, intervensi tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen untuk mempertahankan rupiah.

Menurutnya, diperlukan pula konsistensi kebijakan fiskal, penguatan pasokan devisa, serta pemulihan kepercayaan investor agar tekanan terhadap rupiah dapat diatasi secara lebih berkelanjutan.

Tanpa perbaikan pada faktor-faktor fundamental tersebut, intervensi BI dinilai hanya mampu meredam gejolak dalam jangka pendek, tanpa menyelesaikan sumber tekanan terhadap rupiah.

Rizal memperkirakan, rupiah bergerak pada kisaran Rp 17.950-Rp 18.150 per dolar AS pada Senin (19/10/2026). Dalam skenario tekanan jual meningkat, rupiah bahkan berisiko melemah hingga Rp 18.200 per dolar AS.

Inflasi Pangan 5,03 Persen, Peritel Perkiraan Harga Terus Naik hingga 2027

Minggu, 18 Oktober 2026 16:04 WIB

Penulis: Alfi Dinilhaq

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3034613/inflasi-pangan-503-persen-peritel-perkiraan-harga-terus-naik-hingga-2027>

Jakarta, Beritasatu.com - Tekanan harga pangan di Indonesia meningkat setelah inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,03% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026. Angka tersebut jauh di atas inflasi umum yang tercatat sebesar 3,28% yoy, sehingga menjadi perhatian menjelang rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 20-21 Oktober.

Kelompok volatile food mencakup komoditas seperti cabai, daging ayam, beras, dan telur yang harganya mudah berubah mengikuti musim panen dan kondisi cuaca. BI mengaitkan kenaikan harga tersebut dengan gangguan cuaca dan meningkatnya biaya input.

EBC Financial Group menilai risiko tidak hanya terletak pada kenaikan harga pangan, tetapi juga kemungkinan perubahan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap inflasi. Risiko tersebut perlu dicermati karena peritel memperkirakan harga masih meningkat hingga Februari 2027, sementara fenomena El Niño diperkirakan berlangsung hingga April 2027.

“Inflasi umum naik 3,28% secara tahunan dan masih berada dalam rentang sasaran BI sebesar 1,5%–3,5%. Sementara itu, harga pangan bergejolak melonjak 5,03%,” ujar analis pasar keuangan EBC Financial Group Sana Ur Rehman dikutip pada Minggu (18/10/2026).

Ia melanjutkan, BI sudah menegaskan kebijakannya tidak merespons lonjakan harga yang bersifat sementara. Namun, jika pelaku usaha dan rumah tangga mulai berekspektasi harga akan terus naik.

“Guncangan pangan yang sifatnya sementara bisa berubah menjadi tekanan yang menetap,” tegas dia.

Sasaran inflasi BI ditetapkan sebesar 2,5% ± 1 poin persentase, atau dalam rentang 1,5%-3,5%. Di tengah kenaikan harga pangan, inflasi inti yang cenderung lebih persisten justru turun menjadi 2,84% pada September dari 2,92% pada bulan sebelumnya.

Analisis EBC menilai perbedaan antara inflasi pangan dan inflasi inti menunjukkan tekanan harga masih terkonsentrasi pada pasokan pangan dan belum meluas ke seluruh perekonomian.

Dana Moneter Internasional (IMF) pernah mengkaji sejumlah krisis biaya hidup, yakni periode ketika harga kebutuhan pokok seperti pangan dan energi meningkat lebih cepat dibandingkan harga lainnya dan upah. Hasil kajian menunjukkan ekspektasi inflasi dapat bertahan di atas tingkat sebelum krisis selama bertahun-tahun.

IMF juga menemukan bahwa keluarga berpendapatan rendah menanggung inflasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan besar karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan energi relatif lebih besar.

Indonesia saat ini belum berada dalam kondisi krisis serupa. Inflasi umum masih dalam rentang sasaran, inflasi inti melandai, dan BI menyatakan ekspektasi inflasi tetap terjangkau.

Meski demikian, studi IMF memberikan gambaran mengenai tahapan risiko yang perlu diwaspadai. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat diikuti meningkatnya ekspektasi harga, kemudian berlanjut menjadi tekanan inflasi yang lebih persisten.

Data terbaru Indonesia menunjukkan kenaikan harga pangan telah terjadi. Sementara itu, perkiraan kenaikan harga oleh peritel baru menjadi salah satu indikator yang perlu dipantau. Survei peritel tidak mengukur ekspektasi inflasi dengan metode yang sama seperti kajian IMF, sehingga kondisi tersebut belum dapat dianggap sebagai tanda terjadinya krisis.

Survei Penjualan Eceran BI periode September mencatat Indeks Ekspektasi Harga untuk Februari 2027 meningkat menjadi 177,9 dari 166,0 pada periode sebelumnya. Semakin tinggi indeks tersebut, semakin besar tekanan harga yang diperkirakan peritel.

Sebagai pihak yang menetapkan harga di toko, peritel berpotensi menaikkan harga jual ketika memperkirakan biaya dan harga barang akan meningkat. Kondisi ini dapat membuat tekanan harga pangan merembet ke komoditas lain.

Dari sisi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut El Niño berada pada level sangat kuat. BMKG memprakirakan 66,09% wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah pada dasarian II Oktober.

El Niño diperkirakan berlangsung hingga akhir April 2027, melewati periode Februari 2027 yang menjadi horizon survei ekspektasi harga peritel. Namun, BMKG memperkirakan dampak kekeringan akan mereda ketika musim hujan tiba.

Kesamaan periode antara kenaikan ekspektasi harga dan fenomena El Niño belum membuktikan bahwa kondisi cuaca tersebut menjadi penyebab langsung proyeksi kenaikan harga oleh peritel. Meski begitu, BI telah mencatat gangguan cuaca sebagai salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga pangan.

BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75% dalam keputusan 23 September dan menegaskan kebijakan tidak diarahkan untuk merespons lonjakan harga yang bersifat sementara.

Namun, jika ekspektasi kenaikan harga semakin meluas, ruang BI untuk memangkas suku bunga berpotensi menyempit. Perkembangan tersebut dapat memengaruhi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah yang turut bergerak mengikuti ekspektasi suku bunga.

Pelaku pasar dapat memantau perkembangan inflasi melalui rilis data inflasi bulanan, Survei Penjualan Eceran BI, serta pembaruan informasi curah hujan dari BMKG.

Untuk saat ini, Rehman menyebut kenaikan harga masih terpusat di pangan, dan BI mengaitkannya dengan faktor cuaca serta biaya input yang lebih tinggi. Inflasi inti justru melandai.

“Kami mencermati ekspektasi harga di tingkat peritel. Jika terus naik selama El Niño berlangsung, masalah cuaca bisa berubah menjadi masalah harga yang lebih panjang. Jika berhenti naik, ini hanya akan menjadi lonjakan harga pangan jangka pendek,” pungkasnya.

Forum Investasi Jawa Tengah, Bedah Potensi Jateng Jadi Gerbang Investasi Indonesia

Minggu, 18 Oktober 2026 21:44 WIB

<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8713011/forum-investasi-jawa-tengah-bedah-potensi-jateng-jadi-gerbang-investasi-indonesia>

Solo - detikJateng akan menggelar diskusi bertajuk 'Forum Investasi Jawa Tengah' membedah potensi Jawa Tengah sebagai gerbang investasi Indonesia. Acara ini akan digelar di Nusantara Ballroom, KEK Industropolis Batang, 23 Oktober 2026 mendatang.

Forum Investasi Jawa Tengah ini akan membahas wilayah Jateng sebagai salah satu destinasi investasi paling menjanjikan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun terus mendorong berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif.

Hasilnya, sepanjang 2025, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun, tumbuh 28 persen dibanding tahun sebelumnya dan menyerap sekitar 326 ribu tenaga kerja.

Melalui Forum Investasi Jawa Tengah 2026 di KEK Industropolis Batang, pemerintah, investor, dan pengelola kawasan industri diharapkan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat masuknya investasi. Dengan demikian, Jawa Tengah tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri.

Forum ini dipuncaki dengan detikJateng-Jogja Awards 2026, sebagai etalase keberhasilan pimpinan daerah, tokoh, dan komunitas di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Penghargaan itu menunjukkan keberhasilan kolaborasi kepemimpinan daerah dengan orkestrasi Pemprov Jateng yang diharapkan mampu membawa dampak positif bagi rakyat.

Acara yang melibatkan para tokoh, kepala daerah dan sejumlah stakeholder ini mengusung tema 'Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan'.

Sejumlah tokoh direncanakan akan hadir menjadi pembicara, di antaranya Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji; Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun; dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Hadir pula Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan sebagai narasumber tamu.

Ekspor Menguat, Ekonomi China Tumbuh 4,5% pada Kuartal III-2026

Senin, 19 Oktober 2026 10:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-menguat-ekonomi-china-tumbuh-45-pada-kuartal-iii-2026>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Perekonomian China menunjukkan pemulihan pada kuartal III-2026 dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,5% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Capaian ini melampaui ekspektasi pasar dan mengurangi tekanan terhadap pemerintah untuk menggelontorkan stimulus ekonomi yang lebih agresif.

Mengutip Reuters, Senin (19/10/2026), data Biro Statistik Nasional China (National Bureau of Statistics/NBS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan sebesar 4,4% dalam jajak pendapat Reuters. Angka ini juga membaik dari pertumbuhan 4,3% pada kuartal II-2026, yang merupakan level terendah dalam lebih dari tiga tahun.

Meski demikian, China masih menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Permintaan domestik yang lemah dan meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Uni Eropa menjadi risiko bagi prospek ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Sepanjang tahun ini, pemerintah China sangat mengandalkan ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Namun, strategi tersebut menghadapi tekanan karena konsumsi masyarakat dan investasi swasta belum menunjukkan pemulihan yang kuat.

Kebijakan Beijing yang mengalihkan kredit dan sumber daya dari sektor properti ke industri teknologi tinggi juga menciptakan kesenjangan kinerja antar sektor. Produksi manufaktur dan ekspor yang kuat menutupi lemahnya konsumsi serta investasi swasta.

Secara kumulatif, ekonomi China tumbuh 4,6% pada Januari-September 2026. Capaian tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahunan pemerintah sebesar 4,5%-5%.

Jika dihitung secara kuartalan, ekonomi China tumbuh 1,2% pada kuartal III-2026. Angka ini melampaui perkiraan pasar sebesar 1,1% dan meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,9% pada kuartal sebelumnya.

Surplus Perdagangan China Meningkat

Kinerja ekspor turut menopang perekonomian China. Surplus perdagangan negara tersebut meningkat lebih besar dari perkiraan pada September 2026 seiring lonjakan ekspor.

Kondisi ini membuat China berpeluang melampaui rekor surplus perdagangan tahun lalu yang mencapai US\$ 1,2 triliun. Namun, surplus yang semakin besar juga berpotensi memperuncing ketegangan perdagangan dengan mitra dagang utamanya.

Kesepakatan dengan Uni Eropa untuk membatasi pengiriman kendaraan hibrida buatan China juga berpotensi menekan perdagangan otomotif yang selama ini tumbuh pesat.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah China telah memperluas dukungan bagi pembeli rumah. Beijing juga mengumumkan sejumlah kebijakan untuk menyalurkan pembiayaan dengan biaya lebih rendah ke sektor-sektor seperti infrastruktur dan teknologi.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan kuota utang pemerintah yang belum terpakai sebesar 550 miliar yuan atau sekitar US\$ 82,28 miliar. Dana tersebut ditujukan untuk mengurangi tekanan keuangan pemerintah daerah sekaligus memperluas investasi infrastruktur.

Dukungan fiskal turut diperkuat melalui perluasan subsidi bunga pinjaman bagi perusahaan swasta berskala kecil dan konsumen. Pemerintah juga memanfaatkan instrumen pembiayaan berbasis kebijakan senilai 800 miliar yuan untuk mendorong investasi infrastruktur.

Meski berbagai kebijakan tersebut telah digulirkan, investasi infrastruktur masih mengalami kontraksi sebesar 4,2%.

Investasi aset tetap China juga turun 7,2% sepanjang Januari-September 2026. Penurunan ini sama besar dengan yang tercatat pada periode Januari-Agustus 2026, mengindikasikan bahwa investasi belum menunjukkan perbaikan berarti.

Penjualan Ritel dan Produksi Industri Mulai Menguat

Di tengah lemahnya investasi, sejumlah indikator ekonomi China menunjukkan perbaikan pada September 2026.

Penjualan ritel tumbuh 1,1% secara tahunan pada September, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,4% pada Agustus. Capaian tersebut juga melampaui ekspektasi pasar sebesar 0,6% dan menjadi pertumbuhan tercepat sejak Maret 2026.

Sementara itu, produksi industri meningkat 5,5% secara tahunan pada September. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 5,2% pada Agustus dan sesuai dengan perkiraan pasar. Pertumbuhan produksi industri ini merupakan yang tercepat dalam enam bulan terakhir.

Namun, sektor properti masih menjadi salah satu titik lemah perekonomian China. Investasi properti tercatat turun 20,6% sepanjang Januari-September 2026, mencerminkan tekanan yang masih berlanjut pada sektor tersebut.

Dolar AS Menguat Senin (19/10), Euro Tertekan Kerusuhan di Prancis

Senin, 19 Oktober 2026 08:54 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-menguat-senin-1910-euro-tertekan-kerusuhan-di-prancis>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada awal perdagangan Asia, Senin (19/10/2026), sementara euro melemah di tengah gejolak politik dan kerusuhan di Prancis.

Investor juga mencermati data pertumbuhan ekonomi China serta arah kebijakan suku bunga bank sentral AS dan Eropa.

Melansir Reuters, Euro turun 0,1% menjadi US\$ 1,1225 pada awal perdagangan Asia. Pelemahan mata uang bersama Eropa tersebut membantu menahan tekanan terhadap dolar AS yang sebelumnya bergerak mendekati level terendah bulan ini. Indeks dolar AS tercatat stabil di 101,83.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu (18/10/2026) mengecam aksi kekerasan yang terjadi di tengah demonstrasi terkait tingginya biaya hidup. Kerusuhan tersebut menjadi salah satu gejolak terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Kieran Williams, Kepala Valas Asia di InTouch Capital Markets, mengatakan dampak kerusuhan terhadap euro lebih mungkin muncul melalui pasar obligasi pemerintah Prancis dibandingkan secara langsung terhadap mata uang tersebut.

“Kerusuhan akhir pekan ini memengaruhi euro terutama melalui obligasi Prancis, bukan secara langsung,” ujarnya.

Rupiah menjadi perhatian investor Asia

Di pasar valuta negara berkembang Asia, perhatian investor tertuju pada rupiah setelah MSCI mengancam mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market pekan lalu.

Peringatan tersebut memicu aksi jual besar-besaran di pasar saham Indonesia. IHSG anjlok 11,6% pada Jumat (16/10/2026), sementara rupiah ditutup melemah di level Rp 18.000 per dolar AS, menjadi level terlemah dalam hampir tiga bulan.

Investor kini mencermati apakah tekanan di pasar saham akan merembet ke pasar valuta asing dan obligasi domestik.

Perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi arus modal asing dan kondisi keuangan Indonesia.

Sementara itu, dolar AS bergerak stabil di level 158 yen. Gubernur Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda mengatakan inflasi yang mendasari di Jepang sudah “cukup dekat” dengan target bank sentral sebesar 2%.

Dolar AS juga relatif stabil di level 6,6842 yuan dalam perdagangan luar negeri China menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2026.

Ekonomi China diperkirakan tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan kuartal sebelumnya, ketika pertumbuhannya berada di level terendah dalam lebih dari tiga tahun.

Di kawasan Pasifik, dolar Australia menguat 0,3% menjadi US\$ 0,6965. Dolar Selandia Baru stabil di US\$ 0,5656, sedangkan poundsterling Inggris bertahan di US\$ 1,3329.

Harga minyak turun, pasar menanti keputusan The Fed

Di pasar komoditas, harga minyak mentah Brent turun 1,7% menjadi US\$ 108,02 per barel pada awal perdagangan Asia.

Pelemahan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump melonggarkan sanksi dan tarif terhadap Rusia, yang berpotensi membuka peluang peningkatan ekspor bahan bakar Rusia.

Di sisi kebijakan moneter, kontrak berjangka suku bunga The Fed menunjukkan probabilitas 84% bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan dua hari yang dijadwalkan mulai 28 Oktober.

Probabilitas tersebut relatif tidak berubah dibandingkan Jumat lalu, berdasarkan perangkat FedWatch CME Group.

Williams mengatakan pelaku pasar cenderung membatasi pengambilan posisi menjelang keputusan The Fed pada 28 Oktober dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada 29 Oktober.

Ketidakpastian akibat perkembangan politik di Prancis juga berpotensi membuat pergerakan pasar tetap sensitif terhadap berita.

Di pasar kripto, Bitcoin menguat 1,4% menjadi US\$ 82.067,66. Sementara itu, Ether naik 3% menjadi US\$ 2.420,22.

Pergerakan mata uang global pada awal pekan ini dipengaruhi kombinasi risiko politik Eropa, prospek pasokan energi Rusia, dan ekspektasi suku bunga.

Bagi Indonesia, perkembangan rupiah akan menjadi perhatian khusus di tengah tekanan pasar saham dan kekhawatiran investor terhadap status Indonesia dalam indeks MSCI.

China Diperkirakan Kembali Tahan Suku Bunga Acuan pada Oktober 2026

Senin, 19 Oktober 2026 15:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-diperkirakan-kembali-tahan-suku-bunga-acuan-pada-oktober-2026>

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Bank sentral China diperkirakan kembali mempertahankan suku bunga pinjaman acuan atau loan prime rate (LPR) pada Oktober 2026. Keputusan ini akan memperpanjang periode suku bunga yang tidak berubah menjadi 17 bulan berturut-turut, setelah pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2026 melampaui ekspektasi pasar.

Berdasarkan survei Reuters terhadap 22 pelaku pasar yang dilakukan pekan ini, seluruh responden memperkirakan LPR tenor satu tahun tetap berada di level 3,00%, sedangkan LPR tenor lima tahun bertahan di 3,50%. Penetapan suku bunga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (20/10/2026).

LPR merupakan suku bunga acuan pinjaman yang umumnya dikenakan kepada nasabah dengan kualitas kredit terbaik. Suku bunga ini dihitung setiap bulan berdasarkan usulan dari 20 bank komersial yang ditunjuk, kemudian menjadi acuan penting bagi penetapan suku bunga pinjaman di China.

Ekspektasi stabilnya suku bunga muncul setelah data pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2026 menunjukkan perbaikan dari posisi terendah dalam tiga tahun. Kinerja ekspor yang kuat menjadi penopang utama ekonomi, meskipun konsumsi domestik masih tertekan karena masyarakat cenderung menahan pengeluaran.

Namun, sejumlah analis memperingatkan bahwa ketergantungan yang semakin besar pada faktor eksternal berpotensi memperdalam ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian China.

Target pertumbuhan ekonomi China 2026

Pelaku pasar memperkirakan pemerintah China masih dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 4,5% hingga 5,0% tanpa perlu menambah stimulus ekonomi secara signifikan.

Optimisme tersebut didukung oleh kinerja ekonomi pada awal tahun, serta sejumlah dukungan fiskal dan moneter dalam skala terbatas yang telah diberikan pemerintah dan bank sentral.

Kondisi ini mengurangi urgensi pelanggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan, bank sentral China dinilai memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga sambil memantau perkembangan ekonomi domestik dan global.

Konsensus untuk mempertahankan LPR juga muncul ketika sejumlah negara ekonomi utama justru mulai mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih ketat guna mengendalikan tekanan inflasi. Sementara itu, imbal hasil obligasi jangka panjang China berada di sekitar level terendah dalam 15 bulan.

Pasar menanti sinyal kebijakan bank sentral China Investor kini mencermati forum keuangan penting di Beijing yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/10/2026). Gubernur People's Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng, dijadwalkan menyampaikan pidato dalam forum tersebut.

Pernyataan Pan menjadi perhatian pelaku pasar untuk memperoleh petunjuk mengenai arah kebijakan moneter China selanjutnya, termasuk peluang perubahan suku bunga dan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan, China masih menghadapi tantangan dari sektor properti. Harga rumah baru kembali turun pada September 2026, memperpanjang tren pelemahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai dukungan kebijakan pemerintah belum berhasil mendorong pemulihan permintaan perumahan secara luas.

Ekonomi China Q3-2026 Tumbuh 4,5%, Melampaui Perkiraan

Senin, 19 Oktober 2026 10:30 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/124985/ekonomi-china-q3-2026-tumbuh-4-5-melampaui-perkiraan/2>

Bloomberg, Pertumbuhan ekonomi China meningkat lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III, memperbesar peluang Beijing mencapai target pertumbuhan tahunan sekaligus mengurangi kemungkinan pemerintah meluncurkan langkah pelonggaran tambahan.

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 4,5% secara tahunan pada kuartal III, setelah meningkat 4,3% pada kuartal II, menurut data Biro Statistik Nasional China yang dirilis pada Senin (19/10). Angka tersebut melampaui median perkiraan 4,4% dari para ekonom yang disurvei Bloomberg. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi selama sembilan bulan pertama tahun ini mencapai 4,6%, masih dalam kisaran target tahunan pemerintah sebesar 4,5%–5%.

Pemulihan ekonomi ini dapat memberi ruang bagi para pembuat kebijakan untuk menunda pelonggaran lebih lanjut. Langkah tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan margin perbankan dan tekanan fiskal yang terus membebani pemerintah daerah.

Pertumbuhan produksi industri meningkat menjadi 5,5% secara tahunan pada September, sesuai dengan perkiraan. Sementara itu, penjualan ritel tumbuh jauh lebih tinggi dari ekspektasi, yakni 1,1%, dibandingkan kenaikan 0,4% pada Agustus.

Investasi aset tetap menyusut 7,2% selama sembilan bulan pertama tahun ini, tidak berubah dari penurunan yang tercatat pada periode Januari–Agustus.

Meski perlambatan ekonomi semakin dalam dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat China awalnya berfokus pada pelaksanaan kebijakan pro-pertumbuhan yang sudah ada. Pemerintah baru meningkatkan dukungannya tiga pekan lalu dengan meluncurkan paket langkah baru yang lebih terarah.

Pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia ini ditandai oleh kesenjangan antara ekspor yang melonjak—didorong oleh siklus investasi global besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI)—dan belanja rumah tangga yang lesu, sementara investasi masih terjebak dalam kemerosotan berkepanjangan. Pasar tenaga kerja juga melemah di tengah dampak berkepanjangan dari penurunan sektor properti yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Permintaan domestik yang lemah membuat China semakin bergantung pada ekspor sebagai sumber pertumbuhan. Kondisi ini meningkatkan tekanan dari mitra dagang agar Beijing mengatasi surplus perdagangannya yang sangat besar. Surplus tersebut diperkirakan mencapai rekor baru tahun ini, melampaui US\$1,2 triliun yang tercatat pada 2025.

Uni Eropa tengah menyiapkan kewenangan baru yang dapat memungkinkannya membatasi akses China ke pasar tunggal Eropa sebagai bagian dari upaya besar untuk menyeimbangkan kembali perdagangan bilateral.

Sementara itu, para pemimpin negara lain mendesak Beijing agar membiarkan mata uang China menguat lebih jauh. Mereka menilai yuan berada di bawah nilai wajarnya sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi eksportir China. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan yuan akan berada dalam kondisi undervaluation sebesar 17,3% hingga 25,3% pada 2026, dengan titik tengah 21,3%.

Pasar AS Menguat di Awal Pekan Data Laporan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 06:00 WIB

Matthew Burgess

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124955/pasar-as-menguat-di-awal-pekan-data-laporan-keuangan/2>

Bloomberg, Kontrak berjangka saham Amerika Serikat (AS) naik sementara harga minyak sedikit turun saat para pelaku pasar bersiap menghadapi pekan yang padat dengan laporan keuangan perusahaan dan data ekonomi Tiongkok di tengah meningkatnya risiko geopolitik.

Kontrak berjangka Indeks S&P 500 menguat, menghapus kerugian sebelumnya setelah indeks acuan tersebut turun 1,1% pada Jumat, menandai pekan terburuknya sejak Juni. Indeks VIX melonjak ke level tertinggi intraday dalam empat bulan pada Jumat seiring anjloknya saham-saham teknologi, sementara dolar AS bergerak bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada awal perdagangan.

Lebih dari 70 perusahaan dalam Indeks S&P 500 dijadwalkan melaporkan hasil keuangannya pekan ini, termasuk anggota “Magnificent Seven” yaitu Tesla Inc. dan Meta Platforms Inc., yang kembali menyoroti ketahanan tren perdagangan berbasis kecerdasan buatan (AI). Di Asia, serangkaian data ekonomi Tiongkok pada Senin akan memberikan petunjuk baru mengenai kondisi ekonomi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Minyak mentah Brent turun 0,7% setelah naik pada hari Jumat, dengan harga minyak mendekati US\$110 per barel yang menambah kekhawatiran inflasi dan memperumit prospek suku bunga. Federal Reserve telah memasuki periode larangan berkomunikasi menjelang keputusan kebijakan pada 28 Oktober, sementara risiko geopolitik tetap tinggi seiring memburuknya hubungan antara AS dan Ukraina.

Para investor pun bersiap menghadapi fluktuasi lebih lanjut di pasar saham dan obligasi seiring meningkatnya pertanyaan mengenai apakah pengeluaran besar-besaran untuk infrastruktur AI akan memberikan imbal hasil yang memadai. Indikator volatilitas obligasi juga tetap tinggi, sementara inflasi bahan bakar dan pangan yang terus berlanjut menambah tekanan pada bank sentral.

“Kita berada dalam ‘periode klasik ketidakpastian yang meningkat,’” kata Kyle Rodda, analis senior di Capital.com di Melbourne. “Beberapa faktor bertabrakan secara bersamaan. Laporan keuangan AI akan segera dirilis, ketidakpastian suku bunga terus berlanjut, dan pemilu tengah periode tinggal beberapa

minggu lagi. Bagi Asia, dampaknya akan lebih terasa mengingat semua tema ini diperparah oleh paparan terhadap chip, imbal hasil yang lebih tinggi, dan harga energi.”

Obligasi pemerintah AS, yang sebelumnya menjadi pilihan sebagai aset aman selama aksi jual di sektor teknologi, mengalami tekanan pada hari Jumat seiring kenaikan harga minyak. Harga minyak Brent naik pada akhir pekan lalu akibat keraguan terhadap kesepakatan Presiden AS Donald Trump untuk melepaskan lebih banyak solar Rusia ke pasar global serta gangguan pasokan yang meluas dari Selat Hormuz hingga Laut Hitam.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Trump berusaha menekan Kyiv agar menyerah kepada Rusia, sehingga memperparah perselisihan yang telah berlangsung selama seminggu dengan presiden AS tersebut

“Saya sedang dalam proses menegosiasikan perdamaian dalam perang antara Rusia dan Ukraina, dan tidak ingin melakukan apa pun yang secara bodoh akan membuat Rusia menjauh dari meja perundingan. Kemajuan besar sedang dicapai,” tulis Trump dalam sebuah postingan di media sosial.

Di tempat lain, euro tertinggal dari mata uang utama lainnya karena protes di beberapa kota Prancis berubah menjadi bentrokan antara polisi dan demonstran, disertai penjarahan dan pembakaran landmark. Demonstrasi juga terjadi di Belgia, Italia, dan Portugal.

Aset-aset Tiongkok akan diawasi dengan ketat setelah pihak berwenang mengambil langkah pekan lalu untuk menopang pasar saham dengan mendesak perusahaan dan dana negara untuk membeli saham serta mengarahkan beberapa investor agar membatasi penjualan. Langkah-langkah tersebut diambil menyusul penurunan yang didorong oleh sektor teknologi yang membuat Indeks CSI 300 mencapai level terendahnya sejak Agustus 2025.

Data hari Senin, termasuk produk domestik bruto (PDB) kuartal ketiga, akan memberikan petunjuk baru mengenai prospek Tiongkok. Para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan pertumbuhan akan sedikit pulih, meskipun konsumsi yang lemah, investasi swasta yang lesu, dan penurunan pasar properti yang berkepanjangan tetap menjadi penghambat.

Para investor juga akan mencari tanda-tanda dukungan kebijakan tambahan saat pejabat keuangan terkemuka, termasuk Gubernur Bank Rakyat Tiongkok Pan Gongsheng, berbicara di Forum Financial Street 2026 yang dimulai Senin ini. Spekulasi pelanggaran kebijakan semakin meningkat, dengan swap suku bunga satu tahun Tiongkok turun pekan lalu ke level terendah sejak April 2020.

“Kami memperkirakan berlanjutnya ‘ekonomi dua kecepatan’ dengan produksi industri yang kuat untuk ekspor dan pertumbuhan permintaan domestik yang lemah,” tulis para analis Commonwealth Bank of Australia yang dipimpin oleh Joseph Capurso dalam sebuah catatan.

Saham

- Kontrak berjangka S&P 500 naik 0,2% pada pukul 07.07 waktu Tokyo

Mata Uang

- Indeks Bloomberg Dollar Spot turun 0,2% ke level terendah sejak 6 Oktober 2026
- Euro turun 0,2% menjadi US\$1,1218
- Yen Jepang relatif stabil di 157,92 per dolar
- Yuan offshore relatif stabil di 6,6854 per dolar
- Dolar Australia naik 0,3% menjadi US\$0,6970

Mata Uang Kripto

- Bitcoin melonjak 0,8%, kenaikan penutupan terbesar sejak 9 Oktober 2026

- Ether melonjak 1,7%, kenaikan penutupan terbesar sejak 21 September 2026

Obligasi

- Imbal hasil obligasi 10 tahun Australia relatif stabil di 5,24%

Komoditas

- Minyak mentah West Texas Intermediate turun 0,3% menjadi US\$101,13 per barel, mengakhiri tren kenaikan selama tujuh hari berturut-turut yang mencatat kenaikan sebesar 15%
- Harga emas spot relatif stabil

Rosan: Realisasi Investasi Kuartal III-2026 Capai Rp528 T

Senin, 19 Oktober 2026 21:00 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125064/rosan-realisasi-investasi-kuartal-iii-2026-capai-rp528-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani melaporkan bahwa hingga triwulan III-2026 total realisasi investasi Indonesia mencapai Rp528,7 triliun.

“Sementara itu, total investasi dari Januari sampai September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target. Total penyerapan tenaga kerja mencapai 2.194.496 orang,” kata Rosan di Istana Negara, Senin (9/10/2026).

Rosan menyebut, kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai sekitar Rp761,4 triliun atau 49,5%, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5%.

Berdasarkan wilayah, kontribusi Jawa mencapai 49,4% atau sebesar Rp759,8 triliun, sedangkan luar Jawa mencapai 50,6% atau sebesar Rp779,4 triliun.

“Untuk lima besar lokasi realisasi investasi PMDN, yang pertama adalah DKI Jakarta sebesar Rp160,1 triliun, kemudian Jawa Barat sebesar Rp89,9 triliun atau 11,8%, Jawa Timur sebesar Rp74,3 triliun, Banten sebesar Rp61,1 triliun, dan Kalimantan Timur Rp42,6 triliun atau 5,6%,” kata Rosan.

Sementara itu, untuk Penanaman Modal Asing alias PMA, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai Rp139,2 triliun atau 17,9%.

Selanjutnya, investasi PMA di Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua sebesar Rp110 triliun atau 14,1%, kemudian Maluku Utara Rp91,9 triliun atau 11,8%, DKI Jakarta sebesar Rp89,1 triliun atau 11,5%, dan Kalimantan Barat sebesar Rp42,7 triliun atau 5,5%.

Jika ditotal, lima besar lokasi realisasi investasi adalah DKI Jakarta sebesar Rp249,3 triliun atau 16,2%, Jawa Barat sebesar Rp229,1 triliun atau 14,9%, Sulawesi Tengah sebesar Rp116 triliun atau 7,5%, Jawa Timur sebesar Rp110,5 triliun atau 7,2%, dan Maluku Utara sebesar Rp96 triliun atau 6,2%.

Berdasarkan sektor, kontribusi terbesar PMA berasal dari industri logam dasar, barang logam yang bukan mesin dan peralatannya, sebesar Rp216,6 triliun atau 31,7%.

Sementara itu, sektor dengan realisasi PMDN tertinggi adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi, sebesar Rp117,8 triliun atau 15,5%. Jika PMDN dan PMA digabungkan, sektor tersebut mencatat investasi sebesar Rp269,2 triliun atau 17,5%.

Untuk negara asal investasi selama Januari sampai September 2026, lima besar berasal dari Singapura sebesar US\$14 miliar atau 29,6%, Hong Kong sebesar US\$12,8 miliar atau 27,2%, China sebesar US\$5 miliar atau 10,5%, Amerika Serikat sebesar US\$3,4 miliar atau 7,1%, dan Jepang sebesar US\$2,6 miliar atau 5,6%.

Jika Hong Kong dan China digabungkan, nilai investasinya mencapai US\$17,8 miliar, lebih besar dibandingkan Singapura yang mencapai US\$14 miliar.

Sementara, kontribusi investasi hilirisasi mencapai 31,2% dari total investasi yang masuk, dengan nilai sekitar Rp480 triliun atau meningkat 11,3%.

Komoditas dengan nilai investasi terbesar masih berasal dari sektor mineral, mencapai Rp335,1 triliun. Komoditas tersebut antara lain nikel, bauksit, besi dan baja, tembaga, pasir silika, dan lainnya.

Selanjutnya, investasi di sektor perkebunan dan kehutanan mencapai Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.

Menkeu: Belanja APBN Q4-2026 Akan Lebih Tinggi Meski Efisiensi

Senin, 19 Oktober 2026 20:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125063/menkeu-belanja-apbn-q4-2026-akan-lebih-tinggi-meski-efisiensi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suhasil Nazara menekankan belanja pemerintah pada Kuartal IV-2026 atau sisa tiga bulan terakhir ini akan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan usai Rapat Terbatas (Ratas) Ekonomi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Suhasil, belanja pemerintah pada kuartal IV-2026 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar Rp1.200 triliun.

"Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana, namun dilaksanakan dengan efisien," kata Suhasil.

"Namun kalau kita mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran," tegasnya.

Adapun Suhasil menyatakan bahwa belanja tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial bantuan pangan.

Di samping itu, Bendahara Negara tersebut juga memastikan bahwa belanja pemerintah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui komponen pengeluaran pemerintah (government expenditure).

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu, dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat," pungkasnya.

Prabowo Perintahkan BI Lakukan Intervensi Jaga Rupiah

Senin, 19 Oktober 2026 19:50 WIB

Merinda Faradianti

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125062/prabowo-perintahkan-bi-lakukan-intervensi-jaga-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bank Indonesia (BI) untuk terus menjaga stabilitas rupiah yang kini menembus Rp18.000/US\$ dengan melakukan sejumlah intervensi.

“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah itu dalam bentuk intervensi di swap, DNDF, dan NDF,” kata Gubernur BI, Destry Damayanti di Kompleks Istana Negara, Senin (19/10/2026).

Menurut Destry, BI juga sudah melakukan penjagaan rupiah lainnya dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah diberikan sejak akhir bulan Juni yang lalu untuk diteruskan.

Menurut Destry, kebijakan tersebut sudah bisa mendatangkan inflow, baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF, senilai sekitar US\$8 miliar sampai US\$9 miliar.

Meski demikian, Destry juga tak menampik bahwa saat ini situasi global juga masih volatil. Menurutnya, saat ini sejumlah negara tengah menghadapi situasi higher for longer, inflasi yang jauh di atas target mereka.

Selain itu, Destry juga menyoroti kemungkinan kenaikan dari suku bunga Amerika Serikat, Fed funds rate meski pada Oktober probabilitas kenaikan menjadi lebih kecil.

“Sehingga itu yang tentu menjadi salah satu tantangan buat rupiah kita,” kata Destry.

Meski begitu, Destry menyebut bahwa dalam dua hari terakhir rupiah bisa dijaga stabilitasnya. Sehingga terjadi memang pelemahan, sedikit pelemahan, dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market.

Sebagai informasi, Rupiah hari ini, Senin (19/10/2026), ditutup melemah 0,17% ke Rp18.043/US\$, terbebani aksi jual di pasar saham dan surat utang domestik. Rupiah sempat menyentuh Rp18.051/US\$ di sesi intraday perdagangan pasar spot.

Tekanan eksternal turut membebani gerak rupiah. Indeks dolar Amerika Serikat (AS) masih berada di kisaran 101,5, diikuti dengan harga minyak mentah bertahan tinggi di atas US\$100/barel.

Namun, probabilitas kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang terpengkas jadi 16% dari sebelumnya 20% membawa angin segar bagi sebagian mata uang Asia.

Untuk diketahui, tekanan di pasar keuangan Tanah Air saat ini datang dari memudarnya kepercayaan investor setelah MSCI mempertimbangkan akan mengubah klasifikasi jadi standalone market, alih-alih frontier market seperti pertimbangan sebelumnya.

MSCI menilai benah-benah transparansi saham Indonesia belum optimal memperbaiki struktur perdagangan hingga kepemilikan saham di bursa.

“Meski reformasi telah diumumkan, kekhawatiran signifikan masih ada terkait disfungsi pasar, termasuk dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi yang terus berlanjut dan tidak adanya bukti penegakan aturan yang berarti,” begitu sebut MSCI dalam keterangan resminya.

Airlangga Akan 'Lebur; Daerah dalam Klaster Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 17:16 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125047/airlangga-akan-lebur-daerah-dalam-klaster-ekonomi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang menyiapkan pembentukan klaster ekonomi regional untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam jangka menengah.

Nantinya, lanjut dia, pemerintah akan mengintegrasikan pengembangan ekonomi antardaerah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dengan mengacu kepada potensi dari masing-masing wilayah.

Pemerintah akan segera memulai pembahasan pengembangan ekonomi regional tersebut bersama Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Mungkin kita dalam satu-dua minggu ini kita kick off bagaimana membangun regional. Dan ini sama dengan yang diminta oleh Pak Wamen [Kemendagri Bima Arya] yaitu kita persatukan berbagai indikator agar kita bisa tumbuh," kata Airlangga dalam Launching Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD), di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dia menilai pengembangan ekonomi regional diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada wilayah tertentu, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap potensi ekonomi masing-masing wilayah dapat dikembangkan secara lebih terarah.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mendorong kerja sama ekonomi lintas wilayah dengan mengacu pada model kerja sama regional yang telah terbentuk di kawasan ASEAN.

Airlangga mencontohkan kerja sama pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) atau growth triangle yang melibatkan sejumlah wilayah di Sumatera. Selain itu, pemerintah akan mendorong pengembangan kawasan Kalimantan melalui kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

"Jadi inilah beberapa hal yang kita akan dorong agar pertumbuhan kita akan berjalan baik," jelasnya.

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, Airlangga mengatakan pemerintah ingin memastikan hasil pembangunan terdistribusi secara lebih merata, baik antardaerah maupun antarkelompok masyarakat.

"Indonesia akan mendorong sebagai negara yang sejahtera, welfare state, tidak ada yang miskin, semuanya rata dan kemudian tentunya pemerataan antar daerah, pemerataan antar kelompok masyarakat itu bisa kita dorong ke depan," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima ARYA melaporkan bahwa 38 provinsi di Indonesia telah mengintegrasikan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKA) sebagai indikator kinerja pada 2026.

Namun, dari tingkat kabupaten/kota, baru 341 daerah yang mengintegrasikan indikator tersebut, sementara 173 daerah lainnya belum.

"Kita mendorong ini tupoksi dari kami agar kabupaten kota yang belum tercakup mengintegrasikan IKA dalam perencanaan pembangunan agar kita akselerasi terus," tutur Bima.

Di sisi lain, untuk mempercepat perluasan akses keuangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, Bima mendorong penguatan koordinasi tiga perangkat pemerintah, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Kalau tiga ini bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka target kita memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, menjaga stabilitas harga, ujung-ujungnya atau akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Awali Pekan, Rupiah Finis di Rp18.043/US\$

Senin, 19 Oktober 2026 15:32 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125034/awali-pekan-rupiah-finis-di-rp18-043-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah hari ini, Senin (19/10/2026), ditutup melemah 0,17% ke Rp18.043/US\$, terbebani aksi jual di pasar saham dan surat utang domestik. Rupiah sempat menyentuh Rp18.051/US\$ di sesi intraday perdagangan pasar spot.

Dari pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 5,05% ke posisi 4.923,26 pada Sesi I perdagangan hari ini. Di pasar surat utang, aksi jual juga terlihat dari gerak yield yang terus meninggi. Yield tenor acuan 10 tahun bahkan terkerek naik hingga 7,45%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

Tekanan eksternal turut membebani gerak rupiah. Indeks dolar Amerika Serikat (AS) masih berada di kisaran 101,5, diikuti dengan harga minyak mentah bertahan tinggi di atas US\$100/barel. Namun, probabilitas kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang terpangkas jadi 16% dari sebelumnya 20% membawa angin segar bagi sebagian mata uang Asia.

Won Korea Selatan berhasil defensif, diikuti rupee India, yuan China dan offshore serta yen Jepang. Sebaliknya, dolar Taiwan terpangkas paling dalam, diikuti rupiah, baht Thailand, peso Filipina, serta ringgit Malaysia.

Posisi rupiah yang cenderung melemah hari ini, sementara Bank Indonesia (BI) akan menggelar Rapat Dewan Gubernur besok dan lusa, membuat spekulasi akan kenaikan BI Rate kembali naik. Meski begitu, konsensus yang dihimpun Bloomberg terhadap 27 ekonom masih menghasilkan median estimasi 5,75%, alias BI Rate tetap di level saat ini.

Namun, 9 dari 27 ekonom memperkirakan BI akan kembali mengerek suku bunga 25 basis poin (bps) jadi 6%, termasuk Bloomberg Economics. Bahkan, Helmi Arman dari Citi mengubah proyeksinya dan memperkirakan BI Rate dikerek hingga 6,25% alias 50 bps.

Pelaku pasar masih akan mencermati juga mencermati arah suku bunga global. Konsensus Bloomberg yang memperkirakan BI menahan BI Rate juga didorong oleh turunnya probabilitas kenaikan Federal Funds Rate dari sinyal yang ditangkap pelaku pasar dari Gubernur The Fed Kevin Warsh dalam pertemuan IMF-Bank Dunia di Bangkok. Warsh tidak menyiratkan adanya kenaikan suku bunga acuan pada pertemuan bulan ini.

Sementara, menurut Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi, arah BI Rate saat ini tak lagi terlalu berpengaruh pada sentimen yang sedang meliputi pasar domestik. Meski BI menaikkan BI Rate satu kali sebanyak 25 bps, belum tentu mampu menahan volatilitas rupiah.

Untuk diketahui, tekanan di pasar keuangan Tanah Air saat ini datang dari memudarnya kepercayaan investor setelah MSCI mempertimbangkan akan mengubah klasifikasi jadi standalone market, alih-alih frontier market seperti pertimbangan sebelumnya.

MSCI menilai benah-benah transparansi saham Indonesia belum optimal memperbaiki struktur perdagangan hingga kepemilikan saham di bursa. “Meski reformasi telah diumumkan, kekhawatiran signifikan masih ada terkait disfungsi pasar, termasuk dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi yang terus berlanjut dan tidak adanya bukti penegakan aturan yang berarti,” begitu sebut MSCI dalam keterangan resminya.

Di sisi lain, perkembangan politik domestik juga turut memengaruhi sentimen investor. Bloomberg Economics bahkan menyoroti risiko ketidakstabilan politik Indonesia. Dalam model risiko negara yang digunakan, Indonesia mencatat indeks ketidakstabilan politik sebesar 20,55, tertinggi di antara negara-negara G20 dan jauh di atas India yang berada di posisi kedua dengan 7,47.

Kondisi ini diperkirakan masih akan terus menekan pergerakan rupiah ke depan. Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp18.100/US\$ jika tekanan aksi jual aset domestik terus berlanjut, bahkan pada level paling pesimistis, ekonom memperkirakan rupiah berpotensi sentuh level Rp18.500/US\$.

Dunia Usaha Ekspansif Kala Penciptaan Lapangan Kerja Masih Rendah

Senin, 19 Oktober 2026 14:13 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125020/dunia-usaha-ekspansif-kala-penciptaan-lapangan-kerja-masih-rendah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) kuartal III-2026 dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan dunia usaha Tanah Air masih ekspansif, ditopang perbaikan industri pengolahan, investasi, juga adanya perbaikan dari sisi kondisi keuangan perusahaan.

Namun di sisi lain, momentum kegiatan usaha terlihat melambat lantaran belum diikuti dengan penyerapan tenaga kerja ataupun kenaikan upah yang sepadan, hingga prospek negatif sektor pertanian masih jadi penahan.

Mengutip data SKDU, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha tercatat melambat jadi 11,46% di kuartal III-2026 dari 12,97% pada kuartal kedua tahun ini. Kendati demikian, SBT yang masih positif menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melaporkan peningkatan aktivitas masih lebih dominan ketimbang yang melaporkan penurunan.

Sementara itu, sektor manufaktur membaik ditandai dengan Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) naik dari 51,43% menjadi 52,28%. Kemudian keuangan perusahaan juga terlihat membaik dengan indikator likuiditas dan rentabilitas yang meningkat, meski kemudahan akses kredit sedikit berkurang.

Momentum Ekspansi

Perlambatan kegiatan usaha secara agregat ini terjadi secara beragam antarsektor. Misalnya, industri pengolahan justru mencatat peningkatan SBT dari 1,34% menjadi 1,53%, sedangkan konstruksi naik dari 0,81% jadi 0,92%. Sementara, SBT perdagangan dan reparasi meningkat tipis dari 1,04% jadi 1,08%.

Penguatan SBT yang terjadi di industri pengolahan jadi salah satu sinyal positif karena sektor ini berkaitan dengan rantai pasok, pengadaan bahan baku, transportasi, dan aktivitas ekonomi pendukung lainnya yang ditandai dengan adanya kenaikan PMI-BI.

Di samping itu, tingkat utilisasi kapasitas produksi industri pengolahan juga naik dari 70,11% jadi 70,8%. Kenaikan pada SBT, PMI-BI, dan utilisasi kapasitas menandakan bahwa kegiatan manufaktur masih mendapat dorongan.

Namun, penguatan itu belum sepenuhnya mengindikasikan bahwa ekonomi masuk ke fase akselerasi yang merata. SBT kegiatan usaha secara agregat tetap turun, sementara sejumlah sektor jasa justru kehilangan momentumnya.

Seperti, SBT transportasi dan pergudangan merosot dari 0,72% jadi 0,4%, informasi dan komunikasi turun dari 0,82% jadi 0,57%, sedangkan akomodasi dan makanan-minum turut melemah dari 0,5% jadi 0,37%.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami penurunan tajam. SBT sektor ini merosot dari 1,74% jadi 0,39%. BI menyebut, kondisi ini terjadi lantaran ada faktor musiman, termasuk panen sejumlah komoditas perkebunan dan kondisi sektor perikanan.

BI meramal, pada kuartal IV-2026, kegiatan usaha pertanian diperkirakan mencatat SBT negatif sebesar 0,58%, antara lain karena masuk musim tanam dan kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Kesehatan Perusahaan & Kondisi Harga Jual

Kendati melambat di sejumlah sektor, data SKDU justru mencatat kondisi keuangan perusahaan yang relatif lebih baik. SBT likuiditas terlihat naik dari 15,03% jadi 15,56%, sedangkan SBT rentabilitas naik dari 11,87% jadi 13,11%. Perbaikan rentabilitas yang lebih tinggi daripada likuiditas ini menandakan bahwa penilaian pelaku usaha terhadap kemampuan mereka menghasilkan laba tergolong kuat.

Dari sisi investasi, SBT juga turut meningkat dari 5,46% jadi 6,23%. Investasi di sektor informasi dan komunikasi, konstruksi, juga listrik dan gas jadi penopang pertumbuhan SBT investasi. Namun, BI memperkirakan pada kuartal IV-2026 SBT investasi turun jadi 5,64%. Proyeksi investasi di kuartal IV memang masih positif, tapi menunjukkan kecenderungan peningkatan investasi tidak sekuat kuartal-kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, SBT harga jual terlihat turun dari 22,38% di kuartal II-2026 jadi 19,24% di kuartal III-2026. Untuk kuartal IV, indikator ini diperkirakan kembali turun jadi 12,69%.

Namun perlu dicatat, bahwa penurunan yang terjadi pada SBT harga jual tidak berbanding lurus dengan penurunan harga barang secara umum. Sebab, indeks harga konsumen alias inflasi (IHK) juga dipengaruhi oleh pergerakan harga pangan, energi, biaya distribusi, nilai tukar rupiah, dan kebijakan harga yang diatur pemerintah.

Lapangan Kerja

Di tengah kabar meningkatnya SBT likuiditas, SBT penggunaan tenaga kerja justru tercatat turun dari 0,14% di kuartal II jadi hanya 0,07% di kuartal III. Agaknya responden survei SKDU belum ada kecenderungan menambah tenaga kerja. Padahal dari sisi manufaktur justru tengah membaik.

SBT penggunaan tenaga kerja industri pengolahan masih negatif, meski membaik dari -0,54% jadi -0,34%. Di sektor perdagangan bahkan lebih kontras. SBT kegiatan usaha perdagangan naik tipis dari 1,04% jadi 1,08%, tapi SBT penggunaan tenaga kerjanya justru berbalik dari 0,27% jadi -0,22%.

Adanya penurunan dalam angka penyerapan tenaga kerja ini mencerminkan pelaku usaha masih mengoptimalkan kapasitas yang sudah tersedia. Bisa jadi, perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, atau justru memenuhi permintaan tanpa menambah banyak pekerja.

Lemahnya transmisi aktivitas usaha ke pasar tenaga kerja jadi masalah ekonomi yang perlu digarisbawahi. Perusahaan terlihat masih bisa meningkatkan produksi atau mendulang kenaikan profit, tanpa menghasilkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat membuat peluang bagi pencari kerja baru jadi lebih terbatas.

Selain itu, masalah pengetatan lapangan kerja ini juga bisa berdampak pada dorongan daya beli yang kian lesu. Sebab, konsumsi yang berkelanjutan tetap butuh asupan pendapatan yang stabil, baik lewat pekerjaan ataupun peningkatan upah.

Jika aktivitas usaha membaik, tapi kesempatan kerja dan pendapatan tidak mengalami penguatan, dorongan terhadap permintaan domestik pun berpotensi jadi lebih terbatas.

Namun, BI memperkirakan penurunan ini tak berlangsung lama. Pada kuartal IV-2026 penggunaan tenaga kerja diperkirakan meningkat dengan SBT jadi sebesar 0,97%.

"Peningkatan penyerapan tenaga kerja diperkirakan bersumber dari lapangan usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi mobil dan Motor (0,16%, serta Transportasi dan Pergudangan (0,17%), sejalan dengan faktor musiman HBKN Natal dan libur akhir tahun, serta lapangan usaha Jasa Keuangan (0,49%) sejalan dengan penambahan kantor cabang untuk peningkatan layanan," sebut laporan BI.

Daya Beli Terganjil Upah

Data dari dunia usaha ini juga menyiratkan adanya penurunan kualitas pemulihan ekonomi. Sebab, di tengah kenaikan SBT di beberapa sektor, SBT perkembangan upah justru semakin turun dari 39,2% semester I-2026 jadi 9,24% di semester II-2026.

Responden dari kalangan tenaga kerja sepertinya ingin menyampaikan bahwa adanya perlambatan dari sisi kenaikan upah. Selain itu, kondisi pengupahan juga belum sepenuhnya merata antar tingkat jabatan.

Seperti, upah rata-rata pekerja di bawah mandor atau supervisor turun dari sekitar Rp3,9 juta jadi Rp3,86 juta per bulan. Sebaliknya, rata-rata upah kelompok mandor atau supervisor malah naik dari Rp5,89 juta jadi Rp5,96 juta.

Kelompok di bawah mandor turun 1,09%, tetapi kelompok mandor naik 1,1% jadi tanda bahwa distribusi pendapatan belum terlihat merata.

Dunia usaha sepertinya sedang mengirim alarm, bahwa penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya kuat, pemulihan daya beli berisiko berjalan lebih lambat daripada perbaikan aktivitas perusahaan.

Dalam situasi seperti ini, patutlah pelaku pasar berekspektasi bahwa konsumsi masyarakat mungkin memang masih bisa terus berjalan, tetapi belum tentu ditopang momentum kuat yang bisa mendorong akselerasi pertumbuhan secara luas.

Bunga Utang Kian Tinggi, Pakar Desak Pemerintah Genjot Penerimaan

Senin, 19 Oktober 2026 14:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125017/bunga-utang-kian-tinggi-pakar-desak-pemerintah-genjot-penerimaan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US\$459,3 miliar pada akhir Agustus 2026. Dengan asumsi kurs US\$1 setara Rp17.898, nilai tersebut mencapai Rp8.220,55 triliun dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Di sisi lain, utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun per 30 Juni 2026. Posisi tersebut meningkat 3,76% dibandingkan dengan akhir Maret 2026 yang mencapai Rp9.920,42 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti besarnya biaya utang sebagai persoalan utama.

Hingga September 2026, pembayaran bunga utang pemerintah telah mencapai Rp444,5 triliun, sedangkan penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.607 triliun, artinya 28% penerimaan pajak dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang.

Oleh karenanya, Yusuf menyebut perbaikan harus dimulai dari sisi penerimaan. Selama rasio pajak tetap rendah, utang dalam jumlah moderat sekalipun akan terasa berat karena kapasitas pembayarannya terbatas.

“Reformasi pajak harus difokuskan pada perluasan basis, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan penutupan celah penghindaran pajak,” kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Senin (19/10/2026)

“Pilihan utamanya bukan sekadar menaikkan tarif kepada wajib pajak yang sudah patuh,” tegasnya.

Sementara itu, kualitas belanja yang dibiayai utang juga harus diuji lebih ketat. Utang hanya layak digunakan apabila menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada biaya bunganya.

Belanja produktif seperti infrastruktur yang tepat sasaran, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas industri dapat memperkuat pertumbuhan serta penerimaan pada masa depan.

“Sebaliknya, program dengan efek pengganda rendah harus dievaluasi karena hanya menambah kewajiban tanpa memperbesar kemampuan membayar,” katanya.

Selain itu, Pemotongan transfer ke daerah juga perlu diperhitungkan secara hati-hati karena dapat menekan investasi publik dan pelayanan dasar di daerah.

Pemerintah juga perlu mengelola portofolio utang secara aktif. Porsi utang valuta asing harus dijaga agar risiko kurs tetap terkendali. Tenor perlu diperpanjang ketika kondisi pasar memungkinkan, sementara penerbitan baru tidak boleh dipaksakan saat imbal hasil sedang tinggi.

Dominasi investor domestik memang mengurangi kerentanan terhadap arus modal asing, mengingat kepemilikan asing di SBN berada di sekitar 12,97% pada akhir Agustus.

“Namun, ketergantungan berlebihan pada pembeli domestik juga memiliki risiko. Jika perbankan terlalu banyak menempatkan dana pada SBN, ruang pembiayaan bagi sektor riil dapat menyempit,” katanya.

Dampaknya akan paling terasa bagi UMKM dan perusahaan yang tidak memiliki akses langsung ke pasar modal.

Kredibilitas kebijakan fiskal dan independensi Bank Indonesia juga harus dijaga. Batas defisit 3 persen perlu dipertahankan sebagai jangkar kepercayaan pasar.

Pemerintah juga harus menghindari skema pembiayaan yang mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Kepercayaan pasar merupakan sumber pembiayaan termurah.

Risiko lain yang tidak boleh diabaikan adalah kewajiban yang tidak tercatat langsung sebagai utang pemerintah dalam APBN.

“Kewajiban kontinjensi dari BUMN, lembaga investasi negara, penjaminan proyek, dan pinjaman daerah melalui PT SMI tetap dapat kembali kepada negara jika terjadi masalah pembayaran,” katanya.

Seluruh kewajiban tersebut harus dicatat dan diumumkan secara transparan agar risiko fiskal tidak terlihat lebih kecil daripada kondisi sebenarnya.

Ekonom: Beban Bunga Utang Tembus Rp450T, Ruang Fiskal kian Sempit

Senin, 19 Oktober 2026 13:30 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/125009/ekonom-beban-bunga-utang-tembus-rp450t-ruang-fiskal-kian-sempit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) per akhir Agustus mencapai US\$ 459,3 miliar. Dengan asumsi kurs US\$ 1 sama dengan Rp 17.898. ULN Indonesia setara Rp 8.220,55 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Sementara hingga akhir kuartal II-2026, posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun sampai 30 Juni 2026. Angka ini naik 3,76% dari level utang pada Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai meski kondisi ini belum menjadi alarm kebakaran, tetapi sudah merupakan alarm dini yang tidak boleh diabaikan.

“Persoalannya bukan semata rekor nominal utang luar negeri, melainkan biaya utang yang terus meningkat ketika kemampuan penerimaan negara tidak tumbuh sepadan,” kata Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Senin (19/10;2026).

Yusuf menilai, alarm yang sebenarnya terletak pada biaya utang. Hingga September 2026, pembayaran bunga utang telah mencapai Rp444,5 triliun, sementara penerimaan pajak tercatat Rp1.607 triliun.

“Artinya, sekitar Rp28 dari setiap Rp100 penerimaan pajak digunakan hanya untuk membayar bunga, belum termasuk pelunasan pokok utang. Angka ini menunjukkan bahwa ruang fiskal semakin sempit,” kata Yusuf.

Biaya pembiayaan juga terus meningkat. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik dari 6,03 persen pada akhir 2025 menjadi 7,37% pada akhir Juli 2026, sejalan dengan kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin sepanjang semester pertama.

Pada saat yang sama, rasio utang pemerintah telah mencapai 40,75% terhadap PDB pada kuartal pertama 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2025.

Dalam kondisi seperti ini, rasio utang terhadap PDB saja tidak cukup untuk menilai kesehatan fiskal. Rasio tersebut hanya menunjukkan ukuran utang dibandingkan dengan skala ekonomi, bukan kemampuan pemerintah membayarnya.

“Ukuran yang lebih relevan adalah beban bunga terhadap penerimaan negara. Dari ukuran itu, posisi Indonesia sudah berada pada tingkat yang menuntut kewaspadaan,” katanya.

Yusuf juga mewanti-wanti bahwa tekanan dapat meningkat jika pelemahan pasar keuangan berlanjut. Rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS akan memperbesar nilai pembayaran utang valuta asing ketika dikonversikan ke rupiah.

Sentimen negatif di pasar saham juga dapat menular ke pasar SBN. Jika investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi, pemerintah harus menerbitkan utang baru dengan biaya yang semakin mahal.

Oleh karenanya, Yusuf menyebut perbaikan harus dimulai dari sisi penerimaan. Selama rasio pajak tetap rendah, utang dalam jumlah moderat sekalipun akan terasa berat karena kapasitas pembayarannya terbatas.

“Reformasi pajak harus difokuskan pada perluasan basis, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, dan penutupan celah penghindaran pajak. Pilihan utamanya bukan sekadar menaikkan tarif kepada wajib pajak yang sudah patuh,” kata Yusuf.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal II-2026 itu setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari total utang tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11% dari total utang pemerintah. Sementara sisanya, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89%.

Survei BI: Kegiatan Dunia Usaha Masih Positif, Tapi Melambat

Senin, 19 Oktober 2026 11:01 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124996/survei-bi-kegiatan-dunia-usaha-masih-positif-tapi-melambat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumumkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) periode kuartal III-2026. Aktivitas dunia usaha masih positif, meski melambat.

Pada Senin (19/10/2026), BI melaporkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) seluruh Lapangan Usaha (LU) berada di 11,46% pada kuartal III-2026. Masih positif, tetapi lebih rendah ketimbang kuartal sebelumnya yang sebesar 12,97%.

"Kinerja sejumlah LU tercatat meningkat, antara lain LU Industri Pengolahan, diikuti LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Konstruksi, serta LU Real Estat," demikian laporan BI.

Sementara kapasitas produksi terpakai pada kuartal III-2026 sebesar 73,75%. Sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya di 73,8%.

"Kapasitas produksi terpakai di sejumlah LU tercatat meningkat, terutama di LU Industri Pengolahan, LU Pengadaan Listrik dan Gas, serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang," imbuh laporan BI.

Untuk kuartal IV-2026, responden memperkirakan aktivitas dunia usaha kembali melambat dengan SBT sebesar 10,77%. Jika terwujud, maka menjadi yang terendah sejak kuartal IV-2025 atau setahun terakhir.

Kinerja sejumlah LU diperkirakan meningkat, antara lain LU Transportasi dan Pergudangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Real Estat, LU Jasa Perusahaan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur akhir tahun.

Survei Kegiatan Usaha BI: Investasi di Kuartal III Terindikasi Meningkat

Senin, 19 Oktober 2026 13:55 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/survei-kekuatan-usaha-bi-investasi-di-kuartal-iii-terindikasi-meningkat>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan, realisasi investasi terindikasi meningkat pada kuartal III 2026.

Hal ini tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi kuartal III 2026 sebesar 6,23%, lebih tinggi dari SBT 5,46% pada kuartal II 2026.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan investasi bersumber dari LU Informasi dan Komunikasi (SBT 0,50%), diikuti LU Konstruksi (SBT 0,53%), serta LU Pengadaan Listrik dan Gas (SBT 0,37%) sejalan dengan pengembangan sistem, jaringan infrastruktur telekomunikasi dan serat optic.

“Berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek termasuk proyek strategis nasional, pembangunan dan penguatan jaringan listrik,” mengutip laporan survei BI, Senin (19/10/2026).

Lebih lanjut, responden memperkirakan investasi pada kuartal IV 2026 tetap kuat dengan SBT 5,64%. Tetap kuatnya investasi bersumber dari LU Industri Pengolahan (SBT 0,98%) sejalan dengan pembangunan pabrik/gudang/cold storage, pembelian/pemeliharaan pabrik/mesin/sarana dan prasarana dan LU Jasa Pendidikan (SBT 0,33%).

Ini sejalan dengan pembangunan gedung sekolah/sarana dan prasarana serta infrastruktur konektivitas dan digital di sekolah. Meski demikian, terdapat perlambatan investasi pada LU Informasi dan Komunikasi (SBT 0,20%) disebabkan oleh telah selesainya beberapa proyek jaringan seluler dan fiber optik.

Survei BI: Kinerja Kegiatan usaha Tumbuh Melambat Pada Kuartal III 2026

Senin, 19 Oktober 2026 13:14 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bi-kinerja-kegiatan-usaha-tumbuh-melambat-pada-kuartal-iii-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada kuartal III 2026 tetap terjaga.

Hal ini tecermin dari kinerja seluruh Lapangan Usaha (LU) yang tercatat positif dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 11,46%. Meski demikian, kinerja tersebut tercatat turun dari kuartal II yang mencapai 12,97%.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menilai, kinerja sejumlah LU tercatat meningkat, antara lain LU Industri Pengolahan dengan SBT sebesar 1,53%, diikuti LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1,09%, LU Pengadaan Listrik dan Gas 0,69%, LU Konstruksi 0,92%, serta LU Real Estat 0,34%.

Denny membeberkan, kapasitas produksi terpakai pada triwulan III 2026 tetap terjaga sebesar 73,75%.

“Kapasitas produksi terpakai pada sejumlah LU tercatat meningkat, terutama LU Industri Pengolahan, LU Pengadaan Listrik dan Gas, serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,” tutur Denny dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum membaik pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.

Lebih lanjut, responden memperkirakan kegiatan usaha pada kuartal IV 2026 tetap tumbuh positif, meski dengan pertumbuhan SBT yang turun menjadi sebesar 10,77%.

Kinerja sejumlah LU diprakirakan meningkat, antara lain pada LU Transportasi dan Pergudangan dengan SBT 1,10%, LU Informasi dan Komunikasi 0,83%, LU Real Estat 0,54%, LU Jasa Perusahaan 0,40%, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor 1,21%.

Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur akhir tahun.

Sementara itu, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (SBT -0,58%) diperkirakan menjadi LU satu-satunya yang turun sehingga menahan pertumbuhan kegiatan usaha lebih lanjut disebabkan oleh masuknya musim tanam dan faktor cuaca

Defisit APBN Diprediksi Bisa Tembus 5%, Begini Hitungan Ekonom Bank Mandiri

Senin, 19 Oktober 2026 13:03 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbn-diprediksi-bisa-tembus-5-begini-hitungan-ekonom-bank-mandiri>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dicermati di tengah tekanan harga energi global dan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.

Vice President Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani menilai defisit anggaran Indonesia berpotensi mencapai sekitar 5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut muncul apabila sejumlah kewajiban pemerintah yang belum sepenuhnya tercermin dalam perhitungan tersebut ikut diperhitungkan.

Dalam paparannya, Dendi menyoroti tagihan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang disebutkan hampir mencapai Rp 350 triliun.

Tagihan tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang ditanggung kedua perusahaan, termasuk dalam mekanisme penahanan harga energi.

"Banyak tagihan-tagihan, total itu hampir Rp 350 triliun," ujar Dendi dalam acara Business Outlook 2027, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berarti pemerintah terbebas dari biaya. Beban tersebut tetap ditanggung oleh pihak lain, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang menjalankan kebijakan energi pemerintah.

Dia menilai, apabila kewajiban tersebut turut diperhitungkan, gambaran kondisi fiskal Indonesia bisa berbeda dari angka defisit yang selama ini dilaporkan secara resmi.

"Kalau itu dimasukkan, defisit kita bisa ke angka 5%-an," katanya.

Selain tagihan kepada Pertamina dan PLN, dia juga menyoroti persoalan restitusi pajak yang disebutkan masih belum dibayarkan dengan nilai sekitar Rp 170 triliun.

Dia menilai sejumlah indikator fiskal yang terlihat baik di atas kertas belum tentu sepenuhnya menggambarkan seluruh tekanan yang dihadapi pemerintah.

"Jadi ini tidak terlalu mencerminkan apa yang terjadi juga. Memang kelihatannya bagus di atas kertas, tapi PR-nya banyak," kata Dendi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp 319 triliun atau setara dengan 1,24% terhadap PDB.

Sementara itu, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB.

Transaksi ISEF 2026 Tembus Rp 3,16 Triliun, BI Dorong Pembiayaan Syariah Produktif

Senin, 19 Oktober 2026 10:54 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/transaksi-isef-2026-tembus-rp-316-triliun-bi-dorong-pembiayaan-syariah-produktif>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 tahun 2026 mencatatkan transaksi business matching pembiayaan dan perdagangan syariah senilai Rp 3,16 triliun. Bank Indonesia (BI) berharap capaian tersebut tidak berhenti pada angka transaksi, tetapi berlanjut menjadi aktivitas produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan, ISEF yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 turut membukukan penjualan produk makanan halal dan fesyen sebesar Rp 13,85 miliar.

Dari total business matching senilai Rp 3,16 triliun, pembiayaan syariah mencapai Rp 2,6 triliun, sedangkan perdagangan syariah sebesar Rp 558,4 miliar. Selain itu, terdapat komitmen kerja sama pasar uang dan pasar valuta asing syariah senilai Rp 6,05 triliun.

“Capaian ini mencerminkan aktivitas yang terbangun. Ke depan, yang terpenting adalah memastikan capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tutur Solikin dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Solikin menegaskan pengembangan ekonomi syariah perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dari semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati manfaatnya.

Untuk itu, pembiayaan syariah perlu terhubung dengan kegiatan produktif, sementara keuangan sosial syariah perlu diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun capaian ISEF 2026 turut didukung tingginya partisipasi masyarakat dan kuatnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. ISEF dikunjungi sekitar 93 ribu orang, dengan jangkauan melalui media massa dan media sosial mencapai 26,5 juta orang.

Kegiatan ini juga melibatkan lebih dari 1.000 pelaku industri halal, mulai dari UMKM, lembaga keuangan syariah, industri kreatif, hingga investor domestik dan internasional. Partisipasi tersebut memperluas ruang kolaborasi sekaligus membuka peluang usaha, pembiayaan, dan perdagangan bagi pelaku ekonomi syariah.

Solikin menekankan tiga pilar utama dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu integrasi rantai nilai halal dari hulu ke hilir, perluasan pembiayaan syariah melalui inovasi dan integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi yang didukung transformasi digital.

Solikin mengajak seluruh pihak menjadikan ISEF sebagai pijakan untuk memperluas kontribusi ekonomi dan keuangan syariah bagi perekonomian nasional. Berbagai inisiatif dan kolaborasi yang terbangun melalui ISEF 2026 diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan kita ke depan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi oleh perubahan nyata yang kita hasilkan bagi dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Solikin.

Rupiah Makin Tertekan, BI Diproyeksi Kerek BI-Rate Jadi 6% di Oktober 2026

Senin, 19 Oktober 2026 10:37 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-makin-tertekan-bi-diproyeksi-kerek-bi-rate-jadi-6-di-oktober-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peluang Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20–21 Oktober 2026 semakin terbuka, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko arus keluar modal asing.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kenaikan BI-Rate kini menjadi skenario yang lebih mungkin dibandingkan mempertahankan suku bunga di level 5,75%.

Berdasarkan estimasi model probabilistik terbaru, peluang BI menaikkan suku bunga mencapai 63,11%. Sementara itu, probabilitas BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% tercatat 34,69% dan peluang penurunan suku bunga hanya 2,20%.

“Kami melihat peluang BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00% pada RDG Oktober semakin besar. Kenaikan suku bunga kini menjadi skenario yang lebih mungkin dibandingkan mempertahankan suku bunga di level 5,75%,” ujar Josua kepada Kontan, Minggu (19/10/2026).

Josua menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi probabilitas arah kebijakan, bukan kepastian keputusan BI maupun besaran kenaikan suku bunga.

Perubahan proyeksi tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan terhadap rupiah, risiko arus keluar modal asing, serta memburuknya sentimen investor setelah pengumuman MSCI terkait pasar saham Indonesia.

Untuk diketahui, rupiah di pasar spot dibuka naik tipis ke level Rp 18.026 per dolar AS dengan mayoritas mata uang di Asia juga naik hari ini (19/10/2026).

Sebelumnya, mempertahankan suku bunga masih menjadi pilihan yang lebih kuat mengingat BI telah menaikkan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 basis poin sepanjang Mei–Juni 2026. Namun, perkembangan terkini membuat ruang BI untuk mempertahankan suku bunga tanpa pengetatan tambahan semakin terbatas.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu pertimbangan utama BI dalam menentukan arah kebijakan moneter. Pada 16 Oktober 2026, rupiah kembali berada di sekitar Rp 18.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun meningkat hingga sekitar 7,36%.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan pasar tidak hanya terjadi pada saham, tetapi juga mulai memengaruhi persepsi risiko investor terhadap aset keuangan Indonesia secara lebih luas.

Pengumuman MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi pasar tersendiri turut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi keluarnya investasi portofolio asing. Tekanan tersebut juga berlangsung di tengah tingginya harga minyak dunia, kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang masih ketat, serta ketidakpastian geopolitik.

Kerentanan eksternal Indonesia turut menjadi perhatian karena defisit transaksi berjalan mencapai sekitar 3,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2026. Kondisi ini membuat kebutuhan pembiayaan eksternal tetap perlu diwaspadai.

Meski demikian, Josua menyampaikan, kenaikan suku bunga tidak semestinya hanya didasarkan pada penurunan tajam pasar saham. BI dinilai perlu mempertimbangkan pengetatan apabila gejolak pasar berkembang menjadi pelemahan rupiah yang berkepanjangan, kenaikan biaya pembiayaan, serta peningkatan risiko inflasi.

Dari sisi inflasi, tekanan harga juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan atau year on year (yoy), mendekati batas atas sasaran inflasi BI sebesar 3,5%. Sementara itu, inflasi inti sebesar 2,84% menunjukkan tekanan harga belum sepenuhnya meluas.

Kendati demikian, kenaikan harga energi global, biaya transportasi, serta pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang impor dan biaya produksi dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Ekonomi tumbuh 5,29% yoy pada kuartal II-2026, sedangkan kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65% yoy.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan pembiayaan domestik masih memiliki daya tahan. Namun, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko meningkatkan biaya kredit investasi dan modal kerja, memperlambat ekspansi perusahaan, serta menekan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, apabila BI memutuskan menaikkan suku bunga, kenaikan sebesar 25 basis poin menjadi 6% dinilai lebih proporsional dibandingkan kenaikan 50 basis poin.

“Apabila BI memutuskan menaikkan suku bunga, kenaikan sebesar 25 basis poin lebih proporsional untuk memperkuat stabilisasi rupiah tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar terhadap momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas Josua.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilisasi rupiah tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga perlu disertai pengelolaan likuiditas yang memadai, penguatan instrumen lindung nilai valuta asing, serta kebijakan makroprudensial yang tetap mendukung penyaluran kredit produktif.

Sebaliknya, ia membeberkan, apabila tekanan terhadap rupiah mereda secara signifikan menjelang RDG, BI masih memiliki opsi untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75%, dengan komunikasi kebijakan yang tegas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Ke depan, Josua memperkirakan, arah BI-Rate akan ditentukan oleh sejumlah indikator, mulai dari pergerakan rupiah, arus modal asing di pasar saham dan obligasi pemerintah, perkembangan inflasi inti, hingga arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

BI juga perlu mencermati imbal hasil obligasi pemerintah AS, selisih imbal hasil aset rupiah dengan aset dolar AS, kondisi cadangan devisa, serta perkembangan neraca pembayaran Indonesia.

Apabila tekanan terhadap rupiah dan arus modal keluar berlanjut, disertai peningkatan ekspektasi inflasi, peluang kenaikan BI-Rate akan semakin besar. Sebaliknya, stabilisasi rupiah, perbaikan arus modal, dan inflasi yang terkendali dapat memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga.

Dengan demikian, keputusan BI pada RDG Oktober 2026 akan menjadi upaya menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain kebijakan moneter, pemulihan kepercayaan investor secara berkelanjutan juga membutuhkan konsistensi kebijakan fiskal, perbaikan tata kelola pasar modal, serta penguatan fundamental eksternal Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan BI tidak hanya ditentukan oleh besaran suku bunga, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga stabilitas moneter sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

BKPM Catat Realisasi Investasi Kuartal III 2026 Capai Rp 528,7 Triliun, Naik 7,6% YoY

Senin, 19 Oktober 2026 20:20 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-catat-realisasi-investasi-kuartal-iii-2026-capai-rp-5287-triliun-naik-76-yoy>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal III-2026 mencapai Rp 528,7 triliun. Capaian tersebut tumbuh 7,6% secara tahunan atau year on year (yoy).

Realisasi investasi pada kuartal III-2026 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada kuartal I dan kuartal II-2026, yang masing-masing sebesar Rp 498,79 triliun dan Rp 511,8 triliun.

Sehingga jika ditotal, realisasi investasi sepanjang Januari atau sembilan bulan pertama tahun 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun, atau 75,4% dari target tahun ini Rp 2.041,3 triliun. Secara total realisasi ini tumbuh 7,3% yoy.

Berdasarkan asal modal, penanaman modal asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 270,2 triliun atau 51,1% dari total realisasi investasi pada kuartal III-2026. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 258,5 triliun atau 48,9% dari total investasi.

Dari sisi sebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan nilai Rp 271,6 triliun atau 51,4% dari total realisasi investasi. Adapun investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 257,1 triliun atau 48,6% dari total investasi.

Realisasi investasi pada kuartal III-2026 tersebut juga menyerap tenaga kerja sebanyak 745.634 orang, meningkat 5,1% secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investasi adalah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga.

Integrasi tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam negeri maupun asing, terutama terkait proses dan waktu penerbitan perizinan.

Rosan menjelaskan, melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, BKPM dapat menerbitkan perizinan apabila kementerian atau lembaga terkait tidak mengeluarkan keputusan dalam batas waktu pelayanan yang telah ditentukan.

Mekanisme tersebut dikenal sebagai fiktif positif. Rosan menyebut, pihaknya telah menerbitkan sekitar 328 perizinan melalui mekanisme tersebut.

"Jadi, apabila kementerian lain memiliki service level agreement (SLA) 10 hari, tetapi dalam 10 hari mereka tidak mengeluarkan izin, otomatis kementerian kami bisa mengeluarkannya. Itu yang namanya fiktif positif dan sudah kami terapkan," ujar Rosan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, penerapan mekanisme tersebut mendapat apresiasi dari kementerian dan lembaga serta investor dalam maupun luar negeri karena dinilai dapat memberikan kepastian dalam proses perizinan.

Selain itu, BKPM juga telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait perizinan bagi tenaga kerja asing, termasuk izin tinggal terbatas (KITAS).

Rosan mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perizinan bagi tenaga kerja asing. Ia mencontohkan, proses perizinan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan diharapkan bisa dipangkas menjadi lebih singkat.

"Investor tentunya mengharapkan kepastian. Mereka tidak suka dengan kejutan yang tidak terduga. Itu yang coba kami lakukan, yakni mengurangi ketidakpastian, baik dari segi perizinan, waktu, maupun investasi," katanya.

Rosan menegaskan, upaya mengurangi ketidakpastian menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Inflasi Pangan Tembus 5% pada September 2026, BI Perkuat Koordinasi dengan Kementan

Senin, 19 Oktober 2026 20:17 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-pangan-tembus-5-pada-september-2026-bi-perkuat-koordinasi-dengan-kementan>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mewaspadai tekanan inflasi pangan bergejolak atau volatile food yang mencapai 5,03% pada September 2026. Untuk mengendalikan tekanan tersebut, BI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian agar inflasi pangan kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, inflasi inti masih terkendali pada September 2026, yakni sebesar 2,8%. Namun, perkembangan inflasi pangan perlu mendapat perhatian karena telah melampaui koridor sasaran inflasi BI.

"Yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang mencapai 5%," ujar Destry, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (19/10/2026).

Adapun BI menargetkan inflasi volatile food berada dalam kisaran 2,5% plus minus 1%, atau 1,5% hingga 3,5%. Untuk itu, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna menjaga pasokan dan mengendalikan gejala harga pangan.

Destry menyampaikan, perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu hal yang dilaporkan BI kepada Presiden. Menurutnya, pengendalian inflasi tetap perlu dilakukan agar stabilitas harga di dalam negeri terjaga.

Sementara itu, inflasi inti Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 2,84% dinilai masih terkendali,

“Ini kami juga laporkan untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September 2026,” tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia pada September 2026 adalah sebesar 0,30% secara bulanan (month-to-month / mtm) dan 3,28% secara tahunan (year-on-year / YoY).

BI-Rate Diprediksi Tetap 5,75% pada Oktober 2026, Peluang Kenaikan Masih Terbuka

Senin, 19 Oktober 2026 17:00 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-rate-diprediksi-tetap-575-pada-oktober-2026-peluang-kenaikan-masih-terbuka>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang akan dicermati Bank Indonesia (BI) dalam menentukan arah kebijakan suku bunga pada Oktober 2026. Meski demikian, BI diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75%, sembari membuka peluang kenaikan apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut.

Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan, BI akan menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026. Salah satu pertimbangannya adalah kebijakan moneter ketat yang telah ditempuh sebelumnya masih membutuhkan waktu untuk ditransmisikan ke suku bunga perbankan.

"Inflasi September sebesar 3,28% yoy tetap dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dan kenaikan kumulatif 100 bps pada Mei–Juni masih dalam proses transmisi ke suku bunga perbankan," ujar Banjaran kepada Kontan, Minggu (18/10/2026).

Menurut Banjaran, pelemahan rupiah belakangan ini juga lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen domestik, terutama arus keluar modal setelah pengumuman usulan reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), ketimbang persoalan perbedaan imbal hasil.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai intervensi di pasar valuta asing masih menjadi instrumen yang lebih efektif untuk meredam tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek.

BI dapat mengoptimalkan intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan non-deliverable forward (NDF), serta mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Meski demikian, Banjaran menegaskan bahwa pergerakan rupiah yang menembus level Rp 18.000 per dolar AS akan menjadi perhatian utama BI. Tekanan eksternal juga belum sepenuhnya mereda, seiring dengan ekspektasi kenaikan lanjutan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) dan imbal hasil US Treasury yang masih bertahan tinggi.

Menurutnya, BI selama ini cenderung mengambil langkah pre-emptive ketika pelemahan rupiah melampaui perkiraan. Oleh karena itu, meskipun BI-Rate diperkirakan tetap pada Oktober, peluang kenaikan suku bunga pada rapat berikutnya masih terbuka.

"Apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut dan arus keluar mulai meluas ke pasar SBN, kenaikan 25 bps berpotensi ditempuh pada RDG bulanan berikutnya," jelasnya.

Cadangan Devisa Jadi Penopang Stabilitas Rupiah

Banjaran menambahkan, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga juga akan bergantung pada perkembangan cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Posisi cadangan devisa pada September 2026 yang masih relatif kuat sebesar US\$ 146,3 miliar dapat menjadi bantalan bagi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, apabila tekanan terhadap rupiah semakin besar hingga menggerus cadangan devisa, kebutuhan untuk memperkuat respons kebijakan moneter akan meningkat.

Selain perkembangan cadangan devisa, terdapat sejumlah indikator yang perlu dicermati untuk memperkirakan arah kebijakan BI ke depan. Indikator tersebut meliputi perkembangan kebijakan The Fed, arus modal asing di pasar saham dan surat berharga negara (SBN), serta perkembangan inflasi Oktober, terutama dari kelompok pangan dan imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor.

Dengan demikian, keputusan BI pada Oktober 2026 diperkirakan masih mempertimbangkan efektivitas kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya. Namun, jika tekanan terhadap rupiah berlangsung persisten dan mulai merembet ke pasar keuangan secara lebih luas, peluang kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin pada RDG berikutnya akan semakin terbuka.

Risiko Fiskal Daerah Meningkat, 198 Pemda Terancam Kesulitan Bayar Utang

Senin, 19 Oktober 2026 15:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/risiko-fiskal-daerah-meningkat-198-pemda-terancam-kesulitan-bayar-utang>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Risiko tekanan fiskal pemerintah daerah (pemda) berpotensi meningkat di tengah masih besarnya kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 198 pemda atau 36,26% berpotensi menghadapi kesulitan membayar utang jangka pendek karena nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) lebih kecil dibandingkan total kewajiban jangka pendek.

Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi SiLPA dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 18 Oktober 2026 mencapai Rp 64,14 triliun dari pagu Rp 84,99 triliun.

Pada periode yang sama, utang jatuh tempo APBD tercatat sebesar Rp 5,74 triliun. Namun, pembayaran yang telah direalisasikan baru mencapai Rp 3,4 triliun atau 59,36%. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 2,34 triliun utang jatuh tempo yang belum dibayarkan.

Di sisi lain, pendapatan daerah sampai 18 Oktober 2026 baru terkumpul sebesar Rp 780,199 triliun, atau baru 65,5% dari target APBD sebesar Rp 1.191,18 triliun. Dari total tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) tercatat baru terkumpul 63,89% senilai Rp 274,52 triliun, dari total target Rp 429,64 triliun.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemda menjaga likuiditas anggaran, memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, serta memastikan belanja pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.

Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026, BPK menyebut kondisi SiLPA yang lebih kecil dibandingkan total kewajiban jangka pendek sebagai peringatan dini atas potensi kesulitan keuangan daerah.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan sebagai peringatan dini atas potensi kesulitan keuangan pemda dalam menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga," dikutip dari dokumen IHPS I-2026, Senin (19/10/2026).

BPK menjelaskan, permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh kelemahan pengelolaan anggaran, termasuk manajemen kas yang belum memadai untuk mencegah gagal bayar utang kepada pihak ketiga.

Selain itu, terdapat penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tertentu (earmarked) guna membiayai belanja rutin. Praktik tersebut berisiko menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.

Permasalahan lainnya mencakup pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) yang belum memadai sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.

BPK juga menyoroti belanja daerah yang melampaui kemampuan fiskal akibat penetapan target pendapatan yang tidak realistis.

"Hal tersebut meningkatkan risiko fiskal daerah dalam rangka mendanai program pembangunan dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Selain itu, dapat berpotensi menimbulkan gugatan hukum terhadap pemda karena terlambat membayar tagihan kepada pihak ketiga," tulis BPK dalam laporannya.

Jika tekanan likuiditas tersebut tidak segera diatasi, pemda berisiko menghadapi penumpukan tagihan yang belum dibayar. Keterlambatan pembayaran kepada kontraktor, pemasok barang dan jasa, maupun pihak ketiga lainnya juga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah.

Di sisi lain, kewajiban jangka pendek yang tidak tertangani berpotensi mempersempit ruang fiskal pemda pada tahun anggaran berikutnya. Sebagian anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya.

Meski demikian, besarnya realisasi SiLPA secara agregat tidak otomatis menunjukkan seluruh pemda memiliki kemampuan kas yang memadai.

Ketersediaan dana dan kewajiban yang harus dibayar berbeda antardaerah, sehingga kondisi fiskal perlu dilihat berdasarkan posisi kas, komposisi SiLPA, serta besaran kewajiban masing-masing pemda.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk memprioritaskan alokasi pembayaran utang belanja dalam penyusunan APBD tahun berikutnya serta melakukan rasionalisasi anggaran.

BPK juga meminta pemda memperkuat manajemen kas dengan memastikan ketersediaan dana riil sebelum menerbitkan surat penyediaan dana (SPD). Langkah tersebut diperlukan agar belanja yang direncanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan risiko gagal bayar tidak berulang.

"Serta memperkuat manajemen kas dengan memastikan ketersediaan dana riil sebelum menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) agar permasalahan gagal bayar tidak terulang kembali," kata BPK.

Dengan masih adanya utang jatuh tempo APBD yang belum dibayarkan dan temuan potensi kesulitan keuangan pada 198 pemda, pengelolaan kas dan disiplin belanja menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Realisasi investasi triwulan III Kota Magelang Rp246,23 miliar

Senin, 19 Oktober 2026 21:33 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: M Hari Atmoko

<https://jateng.antaranews.com/berita/649297/realisasi-investasi-triwulan-iii-kota-magelang-rp24623-miliar>

Magelang (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Magelang, Candra Wijatmiko Adi mencatat realisasi investasi hingga triwulan III 2026 telah menembus Rp246,23 miliar atau mencapai 93 persen dari target RPJMD tahunan sebesar Rp264,55 miliar.

Ia di Magelang, Senin, mengatakan, guna menjaga tren positif ini, pelaku usaha diminta untuk tertib melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui sistem OSS RBA.

"Pelaporan LKPM ini instrumen vital bagi pemerintah daerah untuk memantau perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Kami di DPMPSTP selalu terbuka mendampingi pelaku usaha jika menemui kendala teknis pelaporan," katanya.

Ia menuturkan, kedisiplinan pelaporan sangat penting mengingat sistem dapat memberlakukan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan LKPM sesuai batas waktu yang ditentukan.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang bersikap terbuka terhadap hadirnya para investor.

Namun demikian, seluruh skema pembangunan harus berjalan selaras dengan regulasi, tata ruang, dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Salah satu fokus penataan kawasan saat ini adalah pengubahan fungsi lahan terlantar selama puluhan tahun di kawasan Sidotopo Kecamatan Magelang utara menjadi Ruang Terbuka Publik (RTH).

"Tanah tersebut sudah lebih dari 20 tahun berupa semak belukar dan tidak produktif. Melalui kesepakatan bersama, kawasan utara kita jadikan ruang terbuka publik untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat," katanya.

Namun untuk investasi lain, katanya, Kota Magelang masih memiliki banyak ruang yang sangat potensial dan marketable.

Ia menambahkan, ruang investasi lain tetap terbuka lebar selama mematuhi rekomendasi serta visi jangka panjang tata kota Magelang.

Pemerintah mulai program perlindungan Pantura, jaga ekonomi pesisir

Senin, 19 Oktober 2026 14:44 WIB

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan, Editor : Debby H. Mano

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/429997/pemerintah-mulai-program-perlindungan-pantura-jaga-ekonomi-pesisir>

Demak, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memulai program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengatasi abrasi, penurunan permukaan tanah, serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini menjadi langkah penerapan pendekatan perlindungan pesisir yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam atau nature-based solution.

"Hari ini menjadi momentum dimulainya program perlindungan Pantura Jawa," ucap AHY dalam Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.

Dia menyampaikan, kawasan Pantura Jawa memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional karena berkontribusi sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Wilayah tersebut juga menjadi lokasi berbagai kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, sentra pangan, dan koridor logistik.

Menurut dia, masyarakat pesisir menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut, abrasi, serta penurunan permukaan tanah. Kondisi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Pantura.

"Tujuan besar dari pembangunan giant sea wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak, meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah tadi, sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama," kata AHY.

Kata dia, program perlindungan tersebut dirancang mencakup kawasan pesisir dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah melalui kombinasi tanggul pantai atau tanggul laut dan pendekatan berbasis alam.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan kegiatan perlindungan melalui penanaman mangrove yang digelar di Timbulsloko ini turut menjadi percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat.

"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," katanya.

Didit menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.

Susurun Boyolali 2026 Diramaikan 2.500 Pelari, Gerakkan Ekonomi Lewat Sport Tourism

Senin, 19 Oktober 2026 18:06 WIB

Penulis: Yolanda Putri Dewanti, Editor: Dwi Rizki

<https://wartakota.tribunnews.com/news/904928/susurun-boyolali-2026-diramaikan-2500-pelari-gerakkan-ekonomi-lewat-sport-tourism>

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Event lari Susurun Boyolali 2026 diikuti 2.500 peserta dari berbagai daerah. Jumlah tersebut meningkat sekitar 56 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang diikuti 1.600 pelari.

Susurun 2026 digelar di Alun-Alun Kidul Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (18/10), dengan mempertandingkan kategori 5K dan 10K.

Selain olahraga, penyelenggaraan Susurun menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata dan budaya Boyolali.

Para peserta melewati rute yang menyuguhkan suasana alam serta kekayaan budaya daerah. Sepanjang rute, para pelari mendapat sambutan dari warga, anak-anak sekolah, hingga kelompok seni dan budaya setempat.

Identitas Boyolali sebagai Kota Susu juga ditampilkan dengan penyediaan susu lokal bagi peserta.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah untuk melepas peserta kategori 10K, mengatakan event olahraga seperti Susurun dapat menjadi sarana untuk mengenalkan potensi wisata di berbagai daerah.

“Kami mendorong semua kabupaten punya event. Saya yakin di masing-masing daerah punya karakteristik alamnya beda-beda,” tegas Sumarno dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Salah seorang peserta asal Solo, Fety, yang sebelumnya juga mengikuti Susurun, mengatakan suasana penyelenggaraan tahun ini terasa semakin meriah. Ia mengaku menikmati sambutan masyarakat di sepanjang rute.

“Tanjakan mantap, tanjakan terus. Kita menikmati cheering-nya sih. Banyak banget ada joget-jogetnya, nyanyi, warganya juga ikut memeriahkan,” ujar Fety.

Menurut Sumarno, penyelenggaraan event olahraga di daerah dapat dikembangkan menjadi bagian dari sport tourism. Jawa Tengah sebelumnya memiliki Bank Jateng Borobodur Marathon yang berkembang menjadi ajang berskala internasional dan memperoleh predikat Elite Label dari World Athletics.

Sementara itu, penyelenggaraan Maybank Marathon 2026 di Bali juga disebut mampu menghasilkan dampak ekonomi hingga ratusan miliar rupiah.

Bupati Boyolali Agus Irawan berharap Susurun dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin besar. Pertumbuhan peserta dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Susurun Tahun 2026 ini bisa sampai tembus 2.500. Semoga nanti di tahun 2027 akan lebih banyak lagi sehingga nanti tidak hanya dari peserta larinya, tapi dari UMKM dan juga mungkin penginapan, dari restoran semuanya nanti perekonomian akan ikut tumbuh kembang di Kabupaten Boyolali,” tutur Agus Irawan.

Pertumbuhan jumlah peserta dari luar daerah dinilai membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, mulai dari UMKM, penginapan, restoran, hingga usaha lain yang melayani kebutuhan pengunjung.

Susurun 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi Kraft Kreativindo dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Penyelenggaraan event tersebut menunjukkan potensi olahraga untuk dikembangkan tidak hanya sebagai aktivitas kebugaran, tetapi juga sebagai sarana promosi wisata dan penggerak ekonomi daerah. (m27)

Bukan Dolar, Rupiah Paling Lemah di Hadapan Mata Uang Ini

Selasa, 20 Oktober 2026 16:56 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125172/bukan-dolar-rupiah-paling-lemah-di-hadapan-mata-uang-ini/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Saat terjadi pelemahan terhadap mata uang Asia, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat (AS) kerap jadi mata uang yang disorot. Maklum, pergerakan greenback punya pengaruh besar terhadap pasar keuangan global, arus modal, dan stabilitas nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun jika melihat pergerakan sejumlah mata uang utama terhadap rupiah dalam dua tahun terakhir (21 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026), maka bukan dolar AS yang paling berjaya di hadapan rupiah.

Melansir data imbal hasil spot Bloomberg, sepanjang periode tersebut, krone Norwegia (NOK) ternyata yang menguat paling tajam sebesar 35,41%. Posisi berikutnya ditempati krona Swedia (SEK) menguat 23,92%.

Disusul dolar Australia (AUD) sebesar 21,96%, franc Swiss (CHF) 21,84%, dan euro 20,55%. Adapun dolar AS justru menempati posisi ke-8 dengan penguatan 16,08% terhadap rupiah.

Sementara di Asia, yuan offshore paling kuat terhadap rupiah sebesar 24,05%. Disusul yuan China 23,76%, ringgit Malaysia 22,46% (Rp4.407/MYR), won Korea Selatan menguat 20,58% (Rp13,55/KRW), dan dolar Singapura 19,54%.

Depresiasi rupiah membuat dari Indonesia perlu menambah pundi-pundi anggarannya untuk sekadar jajan di Singapura. Sebagai catatan, kurs SGD/IDR saat ini dibanderol Rp14.066. Padahal dua tahun lalu 'hanya' Rp11.782/SGD.

Setali tiga uang, pelancong asal Indonesia juga sepertinya perlu merogoh kocek lebih dalam untuk berkunjung ke Malaysia. Sebab, nilai tukarnya saat ini menjadi Rp4.406/MYR, jauh lebih tinggi dari posisi November 2024 yaitu Rp3.536/MYR.

Lebih lanjut, baht Thailand menguat 15,44%, dolar Hong Kong 14,97%, yen Jepang 10,68%. Bahkan peso Filipina dan rupee India rupiah juga tercatat apresiasi melawan rupiah, masing-masing 5,94% dan 2,8%.

Sehingga bisa dikatakan, rupiah sepanjang dua tahun ini tak cuma melemah terhadap dolar AS tapi juga mata uang negara lainnya. Termasuk dengan mata uang milik negara mitra dagang seperti China, Jepang, India, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dampak Pelemahan Rupiah

Meskipun transaksi perdagangan internasional umumnya masih menggunakan dolar AS sebagai mata uang perantara, pelemahan rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang juga tetap punya dampak ekonomi. Ketika rupiah kehilangan nilai terhadap yuan China, yen Jepang, rupee India, won Korea Selatan, dolar Singapura, ringgit Malaysia, maupun baht Thailand, biaya transaksi yang berkaitan dengan negara-negara tersebut berpotensi meningkat dalam denominasi rupiah.

Memang, kontrak perdagangan menggunakan dolar AS sehingga biaya dalam rupiah lebih banyak terpengaruh oleh kurs USD/IDR. Namun, perubahan nilai mata uang negara asal barang juga berpotensi memengaruhi harga yang ditawarkan eksportir.

Sementara pelancong asal Indonesia biasanya yang lebih terdampak dari pelemahan nilai tukar ini. Sebab, saat mereka berpergian ke luar negeri harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk mengantongi nilai mata uang negara tujuan dengan jumlah yang sama.

Sehingga ketika rupiah melemah terhadap mata uang negara tujuan, anggaran perjalanan yang sebelumnya mungkin cukup untuk mengongkosi tiket transportasi lokal di negara tujuan, akomodasi, makan, hingga belanja jadi lebih terbatas.

Mau tak mau, pelancong Indonesia yang berlibur ke Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, maupun Thailand, misalnya, perlu menghitung ulang nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuannya.

Upah Pekerja Inggris Naik Tipis, Kendati Kenaikannya Lebih Tinggi dari Proyeksi

Selasa, 20 Oktober 2026 14:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/upah-pekerja-inggris-naik-tipis-kendati-kenaikannya-lebih-tinggi-dari-proyeksi>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Laju pertumbuhan upah pekerja di Inggris naik tipis. Office for National Statistics (ONS) Inggris juga mencatat tanda pemulihan di pasar tenaga kerja, meski masih minim.

Reuters memberitakan, ONS mengumumkan, Selasa (20/10/2026), rata-rata pendapatan mingguan pekerja, tidak termasuk bonus, naik 3,7% secara tahunan dalam tiga bulan yang berakhir Agustus.

Realisasi melanjutkan tren peningkatan bertahap, setelah pertumbuhan upah sempat menyentuh titik terendah sebesar 3,4% pada awal tahun ini. Realisasi tersebut juga lebih tinggi ketimbang konsensus proyeksi analis, yakni sebesar 3,6%.

Pertumbuhan upah di sektor swasta juga sedikit meningkat, dari 2,9% menjadi 3,0%.

Menurut data awal, jumlah karyawan terdaftar dalam sistem penggajian dari kantor pajak Inggris menunjukkan peningkatan sebanyak 13.000 orang pada September. Angka untuk Agustus direvisi menjadi naik 1.000 orang, dari estimasi awal yang sempat menunjukkan penurunan sebanyak 26.000 orang.

"Data hari ini mengonfirmasi pasar tenaga kerja saat ini sedang berada dalam kondisi stagnan," ujar Jack Kennedy, Ekonom Senior Indeed, situs lowongan kerja, seperti dikutip Reuters, Selasa (20/10/2026).

Namun, Kennedy menambahkan, potensi pemulihan lanjutan yang lebih kuat sangat bergantung pada anggaran dari Menteri Keuangan Inggris John Healey, yang akan diumumkan pekan depan.

Pendahulunya, Rachel Reeves, sempat menaikkan pajak bagi pemberi kerja pada tahun 2025, yang kemudian diikuti oleh penurunan dalam aktivitas perekrutan.

"Pertanyaannya adalah, apakah anggaran tersebut akan memberikan alasan bagi para pemberi kerja untuk mulai bergerak maju kembali?" kata Kennedy.

Tingkat pengangguran di Inggris turun menjadi 4,7% dalam tiga bulan hingga Agustus, level terendah sejak pertengahan tahun 2025. Tapi data ini diperoleh dari survei yang saat ini sedang ditinjau ulang oleh ONS.

Data ketenagakerjaan terbaru ini bisa menjadi salah satu pendorong Bank of England (BOE) untuk menaikkan suku bunga acuan. BOE juga tengah memantau tanda-tanda apakah lonjakan harga energi akibat perang di Iran mulai berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas dalam perekonomian, termasuk melalui tuntutan kenaikan upah.

Kendati begitu, tidak semua data ketenagakerjaan yang dirilis positif. Sebagian data menunjukkan beberapa indikasi bahwa pasar tenaga kerja masih lemah.

Jumlah lowongan pekerjaan dalam periode tiga bulan hingga September turun menjadi 691.000 dari 704.000 pada periode tiga bulan hingga Agustus. Ini merupakan kali pertama angka tersebut berada di bawah 700.000 sejak periode tiga bulan hingga April 2021.

"Penurunan lowongan pekerjaan yang terus berlanjut merupakan sinyal peringatan keras bagi pasar tenaga kerja. Ini mengindikasikan salah satu dampak sampingan yang merugikan dari pertumbuhan ekonomi yang didorong AI tahun ini adalah melemahnya permintaan tenaga kerja," ujar Suren Thiru, Kepala Ekonom Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Para investor memperkirakan BOE akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 4% dalam pertemuan Komite Kebijakan Moneter November. Sejauh ini, BOE belum mengikuti langkah Federal Reserve AS maupun European Central Bank menaikkan biaya pinjaman.

Gubernur BOE Andrew Bailey menyatakan pekan lalu, semakin lama perang berlangsung, semakin sulit bagi BOE untuk tidak mengambil tindakan. Namun, ia juga menambahkan bahwa situasi saat ini masih dalam tahap awal dan tekanan inflasi masih tergolong cukup terkendali.

China Impor 360.878 Ton Kedelai AS pada September 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 10:13 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-impor-360878-ton-kedelai-as-pada-september-2026>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Impor kedelai China dari Amerika Serikat (AS) kembali tercatat pada September 2026, seiring berlanjutnya pengiriman komoditas yang dibeli dalam kesepakatan untuk meredakan perang dagang kedua negara.

Reuters melaporkan, Selasa (20/10/2026), China mengimpor 360.878 ton kedelai dari AS pada September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika China tidak mengimpor kedelai dari AS.

Data Administrasi Umum Kepabeanan China menunjukkan, impor kedelai China dari Brasil mencapai 10,7 juta ton pada September 2026. Jumlah tersebut turun 2,4% dibandingkan September tahun lalu yang mencapai 10,96 juta ton.

Secara keseluruhan, China mengimpor 11,88 juta ton kedelai pada September 2026. Volume tersebut turun 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

China merupakan pembeli kedelai terbesar di dunia. Pergerakan impor negara tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perdagangan kedelai global, terutama bagi negara pemasok utama seperti AS dan Brasil.

Impor Kedelai China dari AS Turun Sepanjang 2026

Meski impor kedelai AS kembali tercatat pada September, volume pengiriman dari negara tersebut masih mengalami penurunan sepanjang Januari-September 2026.

Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, impor kedelai China dari AS mencapai 11,06 juta ton, turun 34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, impor kedelai China dari Brasil meningkat 3,4% menjadi 65,84 juta ton selama Januari-September 2026.

Perbedaan tersebut mencerminkan besarnya peran Brasil sebagai pemasok kedelai bagi China, di tengah dinamika hubungan perdagangan Beijing dan Washington.

Kesepakatan Dagang Dorong Pembelian Kedelai AS

Ketegangan perdagangan antara China dan AS pada tahun lalu sempat mendorong pembeli China menunda pembelian hasil panen kedelai AS hingga setelah pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara pada Oktober.

Setelah pertemuan tersebut, Beijing membeli sekitar 12 juta ton kedelai AS. Namun, jumlah itu masih jauh di bawah tingkat pembelian sebelum perang dagang kedua negara.

Pada tahun pemasaran 2026/2027, China juga telah membeli lebih dari 60% dari target pembelian kedelai AS sebesar 25 juta ton. Pengiriman kedelai berdasarkan pembelian tersebut mulai tiba pada September, menurut para pedagang yang berbicara kepada Reuters pekan lalu.

Dolar Taiwan Melemah Paling Dalam di Asia Selasa (20/10), Rupiah Menguat ke Rp 18.000

Selasa, 20 Oktober 2026 09:55 WIB

Reporter: Yudho Winarto, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-taiwan-melemah-paling-dalam-di-asia-selasa-2010-rupiah-menguat-ke-rp-18000>

KONTAN.CO.ID - Dolar Taiwan mencatat pelemahan terdalam di antara sejumlah mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (20/10/2026).

Sementara itu, rupiah menguat di tengah pergerakan mata uang kawasan yang relatif terbatas.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.13 GMT, dolar Taiwan melemah 0,47% ke level 32,598 per dolar AS, dari posisi sebelumnya 32,445.

Di sisi lain, rupiah menguat 0,17% ke level Rp 18.000 per dolar AS dari penutupan sebelumnya Rp 18.030 per dolar AS.

Penguatan juga terjadi pada won Korea Selatan yang naik 0,33% ke level 1.327,69 per dolar AS. Dolar Singapura menguat 0,03% ke 1,279, sedangkan yuan China naik 0,03% ke 6,679 per dolar AS.

Yen Jepang relatif stabil dengan penguatan tipis 0,01% ke 158,47 per dolar AS. Sebaliknya, baht Thailand melemah 0,10% ke 33,595 dan peso Filipina turun 0,11% ke 63,003 per dolar AS.

Rupiah India tidak berubah di level 94,925 per dolar AS, sementara ringgit Malaysia melemah tipis 0,01% ke 4,081 per dolar AS.

Rupiah melemah 7,39% sepanjang 2026

Meski menguat dalam perdagangan harian, rupiah masih mencatat pelemahan cukup dalam sepanjang 2026.

Berdasarkan data Reuters, rupiah berada di level Rp 18.000 per dolar AS, melemah 7,39% dibandingkan posisi akhir 2025 di Rp 16.670 per dolar AS.

Dolar Taiwan juga melemah 3,56% sepanjang tahun berjalan, sedangkan baht Thailand turun 6,38% dan peso Filipina melemah 6,67%.

Rupiah India tercatat melemah 5,33% sejak akhir 2025. Sementara itu, yen Jepang turun 1,15% dan ringgit Malaysia melemah 0,60%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 8,50% sepanjang tahun berjalan, disusul yuan China yang naik 4,62% dan dolar Singapura yang menguat 0,50%.

Data tersebut menunjukkan perbedaan kinerja mata uang Asia terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Namun, pergerakan harian tidak selalu mencerminkan arah kinerja mata uang dalam jangka lebih panjang.

China Pertahankan Suku Bunga Kredit di Level 3% Selama 17 Bulan Beruntun

Selasa, 20 Oktober 2026 08:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-pertahankan-suku-bunga-kredit-di-level-3-selama-17-bulan-beruntun>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China mempertahankan suku bunga acuan kredit atau loan prime rate (LPR) pada Oktober 2026.

Keputusan ini memperpanjang periode suku bunga kredit yang tidak berubah selama 17 bulan berturut-turut, seiring belum mendesaknya kebutuhan pelonggaran moneter tambahan setelah ekonomi China tumbuh lebih kuat dari perkiraan pada kuartal III-2026.

Mengutip Reuters, Selasa (20/10/2026), suku bunga LPR tenor satu tahun dipertahankan di level 3%, sedangkan LPR tenor lima tahun tetap sebesar 3,5%.

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar. Dalam survei Reuters terhadap 22 pelaku pasar yang dilakukan pada Senin (19/10), seluruh responden memperkirakan kedua suku bunga tersebut tidak akan berubah.

Stabilnya suku bunga kredit mengindikasikan bahwa pembuat kebijakan China belum terburu-buru meluncurkan stimulus moneter baru.

Pemerintah dan bank sentral kini juga berfokus memperbaiki mekanisme penetapan suku bunga pinjaman serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke perekonomian.

Ekonomi China tumbuh 4,5% secara tahunan pada kuartal III-2026, melampaui perkiraan pasar. Kinerja tersebut mengurangi urgensi bagi Beijing untuk meningkatkan dukungan ekonomi demi mencapai target pertumbuhan tahunan.

Di sisi lain, Bank Rakyat China atau People's Bank of China (PBOC) tengah mempertimbangkan perubahan suku bunga kebijakan utamanya menjadi suku bunga overnight reverse repo. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki transmisi kebijakan moneter dan mendukung perekonomian.

Gubernur PBOC Pan Gongsheng mengatakan pada Senin bahwa bank sentral juga akan menerbitkan panduan kebijakan untuk mendorong reformasi acuan penetapan suku bunga pinjaman.

Reformasi tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada LPR sebagai satu-satunya acuan utama dan memperluas penggunaan tolok ukur suku bunga lainnya.

Pan menjelaskan, sejumlah perusahaan dengan kondisi keuangan kuat dapat memilih suku bunga overnight reverse repo atau LPR sebagai acuan pinjaman berbunga mengambang.

Suku bunga overnight juga berpotensi digunakan sebagai acuan alternatif untuk penetapan harga obligasi dan derivatif keuangan.

Huatai Securities menilai kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran bertahap dalam penggunaan suku bunga acuan, dengan fokus yang semakin besar pada penetapan harga di sisi aset.

Menurut Huatai Securities, skema berjenjang yang memberikan pilihan kepada perusahaan besar, sementara usaha kecil dan mikro serta individu tetap mengacu pada LPR, bertujuan menghindari guncangan mendadak terhadap sistem penetapan harga yang sudah berjalan.

Seiring semakin banyak pinjaman korporasi yang menggunakan suku bunga overnight repo sebagai acuan, rentang fluktuasi suku bunga tersebut diperkirakan menyempit. Kondisi ini berpotensi meningkatkan stabilitas likuiditas di pasar keuangan.

Dolar AS Stabil Selasa (20/10), Risiko Politik Prancis Bayangi Pergerakan Euro

Selasa, 20 Oktober 2026 08:29 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-stabil-selasa-2010-risiko-politik-prancis-bayangi-pergerakan-euro>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang global cenderung terbatas pada awal perdagangan Asia, Selasa (20/10), seiring membaiknya selera risiko investor yang menopang sejumlah mata uang berimbang hasil lebih tinggi.

Namun, ketidakpastian politik di Eropa, terutama gejolak di Prancis, masih membayangi sentimen pasar.

Mengutip Reuters, euro bergerak stabil di US\$ 1,1216, sedangkan pound sterling Inggris menguat 0,1% menjadi US\$ 1,3308. Dolar Australia naik 0,1% ke US\$ 0,6986 dan dolar Selandia Baru menguat 0,1% menjadi US\$ 0,5668.

Terhadap yen Jepang, dolar AS bergerak datar di level 158,56 yen menjelang lelang obligasi pemerintah Jepang bertenor 20 tahun.

Kepala Riset Pepperstone Group di Melbourne, Chris Weston, mengatakan pasar valuta asing mencerminkan perbaikan selera risiko investor. Kondisi tersebut mendorong minat terhadap mata uang yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

“Pasar valuta asing mencerminkan perbaikan selera risiko, dengan mata uang berimbal hasil lebih tinggi mulai diminati pembeli,” kata Weston.

Meski demikian, kondisi di Eropa dinilai belum menunjukkan perbaikan yang meyakinkan.

Risiko politik di Prancis menjadi perhatian investor setelah pemerintah menetapkan jam malam di sejumlah kota pada Senin menyusul gelombang demonstrasi antipemerintah. Situasi tersebut menambah tekanan terhadap masa-masa akhir pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Di Italia, pemerintah juga menyatakan akan mengerahkan 500 personel militer setelah dua hari kerusuhan.

Weston menilai risiko terhadap utang pemerintah Prancis mulai tercermin pada pasar saham Eropa. Namun, ketahanan euro menunjukkan bahwa investor belum menganggap gejolak tersebut sebagai persoalan sistemik yang mengancam seluruh kawasan Eropa.

Tekanan juga terlihat pada pasar obligasi. Selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis dan Jerman bertenor 10 tahun melebar 9,9 basis poin pada Senin menjadi 147,3 basis poin. Pelebaran spread tersebut menunjukkan meningkatnya premi risiko yang diminta investor untuk memegang obligasi Prancis dibandingkan obligasi Jerman.

Analisis ING dalam catatan kepada klien menyebut, tekanan terhadap spread obligasi Prancis meningkat di tengah sorotan terhadap demonstrasi yang berlangsung.

Pasar juga mencermati perkembangan pembahasan anggaran Prancis untuk 2027, termasuk pemungutan suara awal parlemen atas bagian penerimaan dalam rancangan undang-undang keuangan.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan di level 5,131%.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, mengakhiri tren penurunan selama dua hari dengan naik 0,2% menjadi 101,98 pada perdagangan Senin.

Terhadap yuan China di pasar offshore, dolar AS bergerak stabil di 6,6811 yuan setelah bank sentral China mempertahankan suku bunga sesuai ekspektasi pasar.

Di pasar aset kripto, Bitcoin bergerak datar di US\$ 81.906,58, sedangkan Ether naik tipis 0,3% menjadi US\$ 2.405,99.

Pergerakan mata uang global selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan politik dan fiskal Eropa, arah selera risiko investor, serta dinamika imbal hasil obligasi pemerintah di negara-negara utama.

National Australia Bank Bakal PHK 2.500 Pekerja di Tahun 2027, Ini Penyebabnya

Selasa, 20 Oktober 2026 06:43 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/national-australia-bank-bakal-phk-2500-pekerja-di-tahun-2027-ini-penyebabnya>

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. National Australia Bank mengatakan akan memangkas hingga 2.500 pekerjaan, atau sekitar 6% dari tenaga kerjanya, pada tahun 2027, dalam upaya untuk menyederhanakan operasinya sambil bergulat dengan prospek pertumbuhan kredit yang lebih menantang.

Perbankan terbesar di Australia itu mengatakan, ada 1.500 peran yang akan digantikan pada akhir tahun 2026, dengan pengurangan yang sebagian besar menyasar fungsi perusahaan dibandingkan peran perbankan yang berhubungan dengan nasabah. Perusahaan juga berencana mengurangi penggunaan konsultan dan kontraktor secara signifikan.

Perombakan ini akan menimbulkan biaya restrukturisasi sekitar A\$ 300 juta atau setara US\$ 209,37 juta sebelum pajak pada tahun 2027, terkait dengan biaya redundansi, pemindahan, dan desain ulang organisasi.

Biaya tersebut sebanding dengan sekitar A\$ 80 juta sebelum pajak yang dikeluarkan pada tahun 2025 dan 2026, kata NAB.

CEO Andrew Irvine mengatakan, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, hasil risiko dan eksekusi, sekaligus membuat bank “lebih sederhana dan efisien”.

National Australia Bank mengatakan, langkah-langkah tersebut akan menciptakan kapasitas untuk melanjutkan investasi pada prioritas-prioritas utama, termasuk pertumbuhan perbankan bisnis, meningkatkan simpanan dan memperkuat bisnis pinjaman rumah miliknya.

Pemutusan hubungan kerja ini terjadi setelah meningkatnya tekanan terhadap perbankan Australia seiring melemahnya aktivitas perumahan, meningkatnya persaingan, dan tingginya biaya operasional yang membebani pendapatan.

Pada bulan Agustus, NAB memperingatkan bahwa pertumbuhan kredit perumahan akan melambat tajam pada tahun 2027 menyusul reformasi pajak properti yang dilakukan pemerintah federal, yang menurut bank tersebut telah mengurangi permintaan dari pembeli rumah dan investor.

Saat itu, Irvine mengatakan, dampak gabungan dari ketidakpastian geopolitik, suku bunga domestik yang lebih tinggi, dan perubahan pajak menciptakan tantangan bagi pelanggan.

NAB mempekerjakan 41.880 orang secara global per 30 September 2025, menurut laporan tahunan terbarunya.

Langkah ini mengikuti upaya restrukturisasi serupa di saingannya ANZ, yang tahun lalu mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar 3.500 pekerjaan pada September 2026 sebagai bagian dari program penyederhanaan di bawah CEO Nuno Matos untuk mengurangi duplikasi dan menurunkan biaya.

2 Tahun Prabowo-Gibran: Rupiah Sudah Melemah Nyaris 14%

Selasa, 20 Oktober 2026 15:35 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125161/2-tahun-prabowo-gibran-rupiah-sudah-melemah-nyaris-14/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Tak terasa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memimpin Indonesia selama dua tahun sejak 20 Oktober 2024 lalu. Sepanjang dua tahun tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dengan akumulasi nyaris 14%.

Berdasarkan data Bloomberg, ketika pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai, nilai tukar rupiah tercatat Rp15.495/US\$ pada penutupan perdagangan 21 Oktober 2024. Mata uang Tanah Air kemudian bergerak volatil dengan kecenderungan melemah hingga ke level Rp17.987/US\$ pada penutupan perdagangan 20 Oktober 2026 hari ini.

Artinya, rupiah mencatat depresiasi hingga 13,85%. Sepanjang 2026, rupiah bahkan telah melemah 7,28% dan menjadi mata uang terlemah di Asia.

Rupiah sepanjang masa pemerintahan Prabowo-Gibran, depresiasi hampir 14% dari Rp15.495-Rp.17.987/US\$, per 20 Oktober 2026. (Bloomberg)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan menilai rupiah telah terdepresiasi dalam selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, salah satu penyebab pelemahan rupiah saat ini ialah persoalan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

"Ini lagi-lagi berbicara trust. Hal ini juga terkonfirmasi dari credit default swap Indonesia yang cenderung meningkat. Artinya ketika investor ingin berani menaruh duit Indonesia, tetapi dia meminta imbal hasil yang lebih tinggi," ucapnya, Selasa (20/10/2026).

Analisis Komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan jika rupiah terus melemah, hal itu akan berdampak pada meningkatnya biaya barang impor, terutama minyak dan bahan baku industri, pangan, obat-obatan, mesin, hingga komponen produksi yang bergantung pasokan luar negeri.

Hal ini akhirnya mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Beban perusahaan yang memiliki kewajiban valas juga akan meningkat, sehingga berpotensi menekan margin keuntungan dan investasi.

Pada dasarnya, menurut dia, stabilisasi nilai tukar menjadi prioritas penting untuk membuat momentum pertumbuhan tetap terjaga.

Dalam perkembangannya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bank Indonesia (BI) untuk terus menjaga stabilitas rupiah yang kadung menembus level Rp18.000/US\$ dengan melakukan sejumlah intervensi.

"Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah itu dalam bentuk intervensi di swap, DNDF, dan NDF," kata Gubernur BI, Destry Damayanti di Kompleks Istana Negara, Senin (19/10/2026).

Menurut Destry, BI juga sudah melakukan penjagaan rupiah lainnya dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah diberikan sejak akhir bulan Juni yang lalu untuk diteruskan.

Destry menjelaskan kebijakan tersebut sudah bisa mendatangkan inflow, baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF, senilai sekitar US\$8 miliar sampai US\$9 miliar.

Meski demikian, Destry juga tak menampik bahwa saat ini situasi global juga masih volatil. Menurutnya, saat ini sejumlah negara tengah menghadapi situasi higher for longer, inflasi yang jauh di atas target mereka.

Jelang Pengumuman BI Rate, Rupiah Menguat ke Bawah Rp18.000/US\$

Selasa, 20 October 2026 15:32 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125162/jelang-pengumuman-bi-rate-rupiah-menguat-ke-bawah-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah hari ini, Selasa (20/10/2025), ditutup menguat 0,32% ke Rp17.986/US\$, tertopang intervensi Bank Indonesia (BI) jelang pengumuman BI Rate besok.

Di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF), intervensi BI sepertinya berhasil menekan volatilitas gerak rupiah. Mata uang Garuda di luar negeri menguat 0,33% ke Rp18.019/US\$ dari Rp18.092/US\$ yang menjadi posisi penutupan perdagangan offshore kemarin.

Di pasar obligasi negara, yield sebagian tenor terpengkas. Tenor 15 tahun memangkas yield 1,6 bps jadi 7,4%, diikuti tenor 12 tahun 2,5 bps jadi 7,43%, dan tenor 9 tahun turun 1,7 bps ke 7,43%.

Begitu juga yield tenor 5 tahun ikut turun terbatas 0,3 bps jadi 7,23%. Namun, yield tenor acuan 10 tahun naik tipis 0,5 bps jadi 7,43%.

Kenaikan yield di pasar obligasi global turut menekan gerak di pasar obligasi domestik, dengan kenaikan yield US Treasury 4,4 bps jadi 5,11% akibat kekhawatiran akan inflasi. Namun, ekspektasi kenaikan Federal Funds Rate (FFR) mereda membuat kenaikan yield tidak sepenuhnya meluas.

Dari dalam negeri, BI dijadwalkan mengumumkan suku bunga acuan besok. MH Thamrin kemungkinan tetap mempertahankan BI Rate di 5,75% lantaran inflasi domestik yang tetap terjaga di rentang target.

Namun, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut akibat aksi jual di pasar saham terjadi secara meluas. Adapun rebound rupiah sore ini lebih ditopang oleh langkah intervensi BI dan belum sepenuhnya mencerminkan adanya pembalikan tren.

Sebagai catatan, rupiah sepanjang tahun ini telah melemah 7,28% dan menjadi mata uang terlemah di Asia. Sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai hingga hari ini, mata uang Tanah Air mencatat depresiasi hampir 14%, tepatnya 13,85%.

2 Tahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Tumbuh Tinggi tapi Dampaknya Mini

Selasa, 20 Oktober 2026 14:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125134/2-tahun-prabowo-gibran-ekonomi-tumbuh-tinggi-tapi-dampaknya-mini/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap pada hari ini, Selasa (20/10/2026).

Namun, dua tahun kepemimpinan keduanya dinilai masih banyak catatan yang mesti jadi pembenahan utamanya dari sisi ekonomi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpandangan, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,03% pada 2024, meningkat menjadi 5,11% pada 2025, dan mencapai sekitar 5,29% pada kuartal II-2026, tapi pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Salah satu indikatornya adalah besarnya jumlah pekerja yang masih bergantung pada sektor informal. Ia mencatat setidaknya 59,42% pekerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal yang mana angka ini meningkat 57% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pekerja yang berada di sektor informal ini itu tidak bisa menikmati ya jaminan dari pensiun, jaminan kesehatan yang mereka dapatkan kalau mereka bekerja di sektor formal."

"menurut saya pertumbuhan ekonomi itu belum cukup berkualitas untuk mengangkat daya beli di masyarakat," kata Esther dalam agenda diskusi publik Indef secara hybrid, Selasa (20/10/2026).

Selain itu, ia menilai pertumbuhan investasi belum cukup kuat dalam menciptakan lapangan kerja. Persoalan tersebut menjadi tantangan di tengah banyaknya PHK dan penutupan industri.

Penerimaan Negara Terancam

Pada saat yang sama, Esther juga menyoroti persoalan penerimaan negara, terutama pajak. Menurut dia, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan. Sementara, sekitar 65% belanja negara ditopang oleh penerimaan pajak.

Namun, dia menilai rasio pajak atau tax ratio yang terus menurun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

"Nah ini juga pekerjaan rumah besar, jadi bukan hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tax compliance, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana bisa menciptakan investasi yang kondensif sehingga dunia usaha ini tetap bisa hidup dan sehingga mereka bisa bayar pajak," ujarnya.

Esther menilai besarnya jumlah pekerja informal juga berpotensi membatasi basis penerimaan pajak. Sebab, pekerja informal umumnya tidak tercakup dalam mekanisme pemotongan pajak penghasilan seperti pekerja formal.

Sebagai catatan saja, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat sebesar Rp1.6078 triliun. Angka ini meningkat 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp1.295,3 triliun.

Namun, persinya baru 68,2% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun ini.

Rinciannya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 17,6% menjadi Rp809,3 triliun atau mencapai 70,1% dari target. Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 128,2% menjadi Rp43,6 triliun atau 79% dari sepanjang tahun ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga naik menjadi Rp683,3 triliun atau 38,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.

Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.

Pada bagian lain, hingga triwulan III-2026 total realisasi investasi Indonesia mencapai Rp528,7 triliun. Sementara itu, total investasi dari Januari sampai September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target. Total penyerapan tenaga kerja mencapai 2.194.496 orang

Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai sekitar Rp761,4 triliun atau 49,5%, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5%.

Berdasarkan wilayah, kontribusi Jawa mencapai 49,4% atau sebesar Rp759,8 triliun, sedangkan luar Jawa mencapai 50,6% atau sebesar Rp779,4 triliun. Berdasarkan wilayah, kontribusi Jawa mencapai 49,4% atau sebesar Rp759,8 triliun, sedangkan luar Jawa mencapai 50,6% atau sebesar Rp779,4 triliun.

Untuk Penanaman Modal Asing alias PMA, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai Rp139,2 triliun atau 17,9%.

Selanjutnya, investasi PMA di Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua sebesar Rp110 triliun atau 14,1%, kemudian Maluku Utara Rp91,9 sebesar triliun atau 11,8%, DKI Jakarta sebesar Rp89,1 triliun atau 11,5%, dan Kalimantan Barat sebesar Rp42,7 triliun atau 5,5%.

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bisa Jadi Opsi Jika Rupiah Terus Lemah

Selasa, 20 Oktober 2026 11:01 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125102/ekonom-kenaikan-bi-rate-bisa-jadi-opsi-jika-rupiah-terus-lemah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-Rate sebesar 25 basispoin (bps) menjadi 6% merupakan pilihan yang proporsional apabila tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus berlanjut.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan peluang menaikkan BI Rate kian besar di tengah tekanan rupiah yang menembus Rp18.000/US\$, disertai kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Namun, langkah itu juga perlu mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi serta efektivitas kenaikan suku bunga dalam meredam pelemahan rupiah.

"Menurut kami, peluang BI menaikkan BI-Rate pada RDG 20–21 Oktober 2026 semakin besar, dengan kenaikan sebesar 25 basispoin (bps) menjadi 6% sebagai skenario utama," kata Josua kepada Bloomberg Technoz, Selasa (20/10/2026).

Keputusan menaikkan BI Rate tersebut, kata Josua turut sejalan dengan hasil estimasi model probabilistik terbarunya yang menunjukkan peluang kenaikan suku bunga mencapai 63,11%, sementara probabilitas BI mempertahankan suku bunga di level 5,75% sebesar 34,69%.

Dia mencatat rupiah telah berada di sekitar Rp18.043/US\$ pada 19 Oktober 2026, sedangkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai sekitar 7,43%. Tekanan tersebut terjadi di tengah memburuknya sentimen investor setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Meski demikian, Josua mengingatkan kenaikan suku bunga tidak menjamin rupiah langsung menguat. Tekanan terhadap nilai tukar saat ini tidak hanya berasal dari perbedaan suku bunga, tetapi juga persepsi risiko investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

"Kekhawatiran MSCI mengenai transparansi kepemilikan saham, dugaan manipulasi perdagangan, dan efektivitas penegakan hukum merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan moneter," jelasnya.

Di sisi lain, ia menilai kenaikan suku bunga yang terlalu agresif juga berisiko meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah dan dunia usaha, memperlambat pertumbuhan kredit, serta menekan konsumsi dan investasi.

BI, kata dia, juga perlu mempertimbangkan risiko inflasi. Inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan atau mendekati batas atas sasaran inflasi sebesar 3,5%. Sementara itu, inflasi inti masih relatif terkendali di level 2,84%.

Selain itu, kenaikan harga minyak Brent yang berada di sekitar US\$110 per barel berpotensi meningkatkan biaya energi, bahan baku impor, dan transportasi. Kombinasi pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi tersebut dapat menambah tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang.

"Oleh karena itu, kenaikan suku bunga harus dikombinasikan dengan pengelolaan likuiditas yang berhati-hati, intervensi valuta asing, serta koordinasi dengan pemerintah dan regulator untuk memperbaiki kepercayaan investor," pungkasnya.

Suahasil: Belanja Q4-2026 Akan Lebih Tinggi, Tembus Rp1.300 T

Selasa, 20 Oktober 2026 10:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125107/suahasil-belanja-q4-2026-akan-lebih-tinggi-tembus-rp1-300-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan belanja pemerintah pada kuartal IV-2026 akan mencapai Rp1.300 triliun atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, hanya Rp1.200 triliun.

"Kita yakin bahwa belanjanya [pemerintah] akan mencapai Rp1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu," kata Suahasil usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin (19/10/2026) malam.

Suahasil mengatakan belanja pemerintah yang lebih tinggi di tiga bulan terakhir 2026 ini diharapkan menjadi pendorong aktivitas ekonomi hingga akhir tahun.

Di samping itu, efisiensi anggaran juga tetap dijalankan. Ia menegaskan meski efisiensi anggaran dilakukan, tetapi program prioritas pemerintah akan tetap berjalan.

Suahasil mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami perubahan pola pengelolaan setelah adanya manajemen baru di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan tersebut, kata dia, diharapkan membentuk pelaksanaan anggaran yang lebih efisien.

"Karena itu, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," tegasnya.

Di tengah peningkatan belanja tersebut, Bendahara Negara tersebut memastikan outlook defisit APBN 2026 tetap dijaga di kisaran 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," tuturnya.

Sebagai catatan, Kemenkeu mencatat realisasi total belanja negara hingga September 2026 sebesar Rp2.660,5 triliun, tumbuh 19% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.621,3 triliun.

Namun, angka ini baru setara 69,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang mencapai Rp3.842 triliun.

Berdasarkan perinciannya, kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh membengkaknya realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang naik mencapai 33,5% yoy menjadi Rp1.069,4 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp800,9 triliun.

Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai Rp1.639,2 triliun, yang juga naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih Rp1.541,4 triliun. Angkanya setara 60,5% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.

Konsensus Bloomberg: BI Rate Tetap 5,75%

Selasa, 20 Oktober 2026 10:15 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125109/konsensus-bloomberg-bi-rate-tetap-5-75/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%, meski kenaikan inflasi kian persisten dan rupiah menghadapi tekanan di level Rp18.000/US\$.

Melansir konsensus yang dihimpun Bloomberg dari 34 ekonom dan analis menghasilkan median estimasi 5,75%. Namun konsensus ini tak sepenuhnya bulat, dengan adanya proyeksi tertinggi 6,25% dan terendah 5,75%.

Sebanyak 12 ekonom dan analis, di antaranya DBS Bank, BCA, Bloomberg Economics, CIMB, Moodys Analytics, Maybank dan Bank Permata, memperkirakan BI perlu mengerek suku bunga jadi 6%. Sementara Helmi Arman dari Citigroup bahkan memperkirakan BI perlu menaikkan suku bunga lebih agresif jadi 6,25%.

Namun, mayoritas ekonom dan analis masih berpikir BI tak perlu mengerek suku bunga acuan dan menahannya di 5,75%. Kelompok dovish ini mempertimbangkan BI masih bisa menahan suku bunga acuan, sebab tekanan terhadap rupiah datang dari arus keluar modal asing di pasar saham setelah MSCI mengumumkan bahwa pasar saham Tanah Air sedang dipertimbangkan untuk turun ke Standalone Market.

Sementara, inflasi masih relatif terjaga di rentang target BI. Selain itu, bank sentral Amerika Serikat (AS) pun diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan Oktober di level 3,75-4% dengan probabilitas sebesar 82,2%.

Mempertahankan BI Rate di level 5,75% memang bisa jadi pilihan yang rasional jika tekanan eksternal masih bisa dikelola lewat instrumen stabilisasi lain dan ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Sedangkan, menurut kelompok yang berpandangan hawkish BI perlu mengerek suku bunga acuan kali ini. Sebab, harga minyak dunia tetap menjulang tinggi yang berpotensi mengerek inflasi. Memang, inflasi September masih 3,28% dan berada di kisaran target BI di 1,5%-3,5%.

Namun ketidakpastian resolusi konflik Timur Tengah berpotensi mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Kenaikan BI Rate jadi 6% pun bisa jadi sinyal lebih tegas tentang prioritas stabilitas moneter.

Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson memperkirakan BI menaikkan BI Rate 25 basis poin (bps) jadi 6%. "Rupiah telah melemah 1,2% terhadap dolar AS dalam sebulan terakhir, dan berkinerja lebih buruk dibandingkan mata uang negara-negara Asia lainnya, meskipun BI telah melakukan intervensi yang semakin mengurangi kecukupan cadangan devisa," ujar Henderson dalam catatannya.

Ia memproyeksikan, inflasi akan naik melampaui sasaran inflasi BI. Selain itu, arus modal portofolio asing ke obligasi pemerintah juga tercatat keluar di bulan September. Dengan nilai jual bersih US\$15 juta, sementara nilai beli hanya US\$2,5 juta sepanjang Juni-Agustus.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti kemarin mengatakan bahwa BI telah mengupayakan menjaga stabilitas rupiah. Menurut Destry, BI sudah melakukan penjagaan rupiah lainnya dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah diberikan sejak akhir bulan Juni yang lalu untuk diteruskan.

Henderson menilai BI memang masih punya ruang untuk mempertahankan suku bunga sedikit lebih lama dengan berbagai instrumen moneter yang dimiliki.

"Namun, jika Destry ingin membangun kredibilitas di mata pasar, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengambil langkah antisipatif. Lebih baik mengerem secara bertahap sekarang daripada harus mengambil langkah yang jauh lebih besar di kemudian hari," kata Henderson.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Klaim Ekonomi Stabil

Selasa, 20 Oktober 2026 09:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125099/dua-tahun-prabowo-gibran-pemerintah-klaim-ekonomi-stabil/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Hari ini, Selasa (20/10/2026) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Para pembantu presiden di bidang ekonomi mengklaim kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil selama dua tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Prabowo memanggil dalam Rapat Terbatas atau Ratas bidang perekonomian di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026) sore.

"Bapak Presiden memanggil tim ekonomi, terutama untuk memperbarui situasi perekonomian pada akhir tahun ini dan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo," kata Airlangga kepada awak media, dikutip Selasa (20/10/2026).

"Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makroekonomi relatif stabil. Kami juga menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi, target inflasi, situasi makro perbankan, serta investasi yang sudah berjalan," sambungnya.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, Airlangga menyebut pemerintah juga berupaya mendorong kinerja ekspor nasional melalui berbagai sektor, termasuk industri manufaktur.

Di samping turut melakukan evaluasi serta perbaikan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang berpotensi menghambat ekspor, juga menindaklanjuti hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai arahan Presiden melalui satuan tugas (satgas).

Senada, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan bahwa ketahanan ekonomi domestik masih mampu menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian.

"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia masih sangat resilient. Aktivitas transaksi masyarakat juga masih sangat resilient. Karena itu, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan sekaligus mendorong pertumbuhan," kata Suahasil.

Di sisi lain, ia mengatakan pihaknya juga akan terus mencari ruang efisiensi dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir 2026.

Suahasil menegaskan, upaya efisiensi tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"Karena itu, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," jelasnya.

Suahasil juga memperkirakan belanja pemerintah akan mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026. Nilai tersebut diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dikisaran Rp1.200 triliun.

Menurut Bendahara Negara tersebut, peningkatan belanja pemerintah diharapkan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.

Inflasi Global Diperkirakan Naik Jadi 4,4% Tahun Ini

Selasa, 20 Oktober 2026 09:28 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/125087/inflasi-global-diperkirakan-naik-jadi-4-4-tahun-ini/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Inflasi global diperkirakan kembali naik di tengah ketidakpastian geopolitik dan membuat bank sentral negara-negara di dunia menghadapi dilema.

Perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran jadi salah satu risiko utama. Perang ini berpotensi memperpanjang kenaikan harga energi, sementara meningkatnya biaya input produksi, termasuk cip komputer, turut menambah tekanan pada harga barang dan jasa di berbagai negara.

Dalam skenario dasar jika konflik Iran berlanjut dengan intensitas rendah Bloomberg Economics memperkirakan harga minyak bertahan di sekitar US\$100/barel, maka inflasi bisa naik jadi 4,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV-2026, sebelum melandai lagi menjadi 3% pada kuartal IV-2027.

Penurunan inflasi di tahun depan itu, sebenarnya lebih mencerminkan efek basis karena kenaikan di tahun ini yang melejit. Ekonom Bloomberg Economics Scott Johnson menyebut lonjakan harga minyak di tahun ini secara bertahap tidak lagi masuk dalam perbandingan tahunan, sehingga laju inflasi berpotensi menurun meski harga energi tidak langsung kembali ke tingkat sebelum konflik.

Namun, ia menambahkan prospek itu sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah.

Dalam skenario kedua, jika perang AS-Iran meluas menjadi konflik regional yang lebih besar dan mendorong harga minyak naik hingga US\$130 per barel, inflasi global berpotensi mencapai 5% pada kuartal IV-2026. Sementara, inflasi tahun depan diperkirakan akan berada di level 3,5% di kuartal IV, lebih tinggi dibandingkan proyeksi skenario dasar.

Perbedaan inflasi dalam dua skenario itu menunjukkan besarnya pengaruh harga energi terhadap prospek inflasi global. Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada biaya bahan bakar, tetapi juga meningkatkan biaya transportasi, logistik, produksi, dan berbagai input industri. Jika tekanan tersebut berlangsung lama, dampaknya dapat menyebar ke lebih banyak sektor dan membuat inflasi lebih sulit dikendalikan.

Risiko berikutnya adalah perubahan ekspektasi inflasi. Kala rumah tangga dan pelaku usaha memperkirakan harga akan terus menanjak, pekerja dapat menuntut kenaikan upah, sementara perusahaan menyesuaikan harga jual untuk mempertahankan margin.

Jika kondisi ini berlangsung secara luas, tekanan harga yang semula dipicu oleh pasokan energi bisa menjadi lebih persisten dan memperumit keputusan kebijakan moneter.

Namun, prospek inflasi tak sepenuhnya buruk. Dalam skenario yang lebih jinak, jika perang mereda dan harga minyak ternyata bisa turun ke US\$70/barel, ini dapat memberi ruang bagi inflasi global untuk mereda. Dalam skenario ini, Bloomberg Economics memperkirakan inflasi terpangkas jadi 4,2% di 2026 dan turun lagi jadi 3% di 2027.

Namun, Johnson menilai prospek perdamaian yang bertahan lama memang masih sulit dipastikan, sehingga risiko kenaikan harga energi tetap perlu diperhitungkan.

Skenario tersebut menunjukkan bahwa arah inflasi global tak cuma ditentukan oleh kebijakan moneter, tapi juga perkembangan geopolitik dan kondisi pasokan komoditas.

Bank sentral memang dapat menaikkan suku bunga untuk meredam permintaan dan menjaga ekspektasi inflasi, tapi instrumen tersebut agaknya tidak bisa juga secara langsung memulihkan pasokan minyak atau mengakhiri konflik. Sedangkan, pengetatan yang kelewat agresif juga berisiko menekan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Ujian Bagi Bank Sentral

Ancaman inflasi global di akhir 2026 punya dampak yang luas, ketimbang sekadar kenaikan harga energi. Apabila harga minyak bertahan di sekitar US\$100/barel atau bahkan naik lagi ke US\$130/barel, bank sentral akan menghadapi dilema.

Di satu sisi, bank sentral perlu mempertahankan suku bunga acuan lebih tinggi lebih lama dengan kembali memperketat kebijakan. Namun di sisi lain, kondisi pengetatan moneter bisa meningkatkan biaya pembiayaan bagi pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga.

Meski begitu, bank sentral negara-negara diperkirakan masih akan memperketat kebijakan moneternya untuk melawan inflasi. Di AS, bank sentral Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan, setidaknya satu kali lagi di tahun ini. Melansir Fedwatch, probabilitas kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang sempat turun jadi 16% dari 20% pada kemarin, hari ini naik lagi jadi 17,2%.

Sementara, sebagian negara Asia diperkirakan masih akan terus memantau pergerakan inflasi ini. Bank sentral Indonesia, Bank Indonesia (BI) besok (21/10/2026) akan mengumumkan kebijakan moneter. Konsensus yang dihimpun Bloomberg menghasilkan median estimasi BI mempertahankan suku bunga di 5,75%.

Begitu juga dengan Korea Selatan, Bank of Korea (BOK) diperkirakan mempertahankan suku bunga di 3% sama dengan bulan sebelumnya. BOK akan mengumumkan suku bunga pada Rabu (22/10/2026).

Sementara, bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI) telah mengerek suku bunga acuannya di bulan Oktober ini. RBI menaikkan suku bunga jadi 5,5% dari posisi sebelumnya 5,25%.

Belanja Kuartal IV Tembus Rp 1.300 Triliun, Ekonom Ingatkan Risiko Defisit APBN

Selasa, 20 Oktober 2026 19:10 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-kuartal-iv-tembus-rp-1300-triliun-ekonom-ingatan-risiko-defisit-apbn>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV-2026 diperkirakan mencapai Rp 1.300 triliun.

Besarnya belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi menekan ruang fiskal dan memperlebar defisit anggaran.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, risiko utama terletak pada kesesuaian antara realisasi belanja dan kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan negara.

Menurutnya, ekspansi belanja masih dapat dibenarkan untuk menopang perekonomian, tetapi harus disertai perhitungan penerimaan dan pembiayaan yang memadai.

"Risiko utamanya terletak pada aritmetika defisit," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (20/10/2026).

Yusuf menjelaskan, desain defisit sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) mengindikasikan asumsi PDB nominal sekitar Rp 25.700 triliun.

Apabila total belanja mencapai Rp 3.960 triliun, sementara pendapatan negara hanya memenuhi target Rp 3.153,6 triliun, defisit berpotensi melebar menjadi sekitar Rp 807 triliun.

Dia memperkirakan, agar defisit berada di level 2,85% terhadap PDB, pendapatan negara perlu mencapai sekitar Rp 3.228 triliun atau 102% dari target.

Sementara itu, untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%, pendapatan negara setidaknya perlu mencapai Rp 3.190 triliun.

Meski demikian, peluang untuk mencapai target penerimaan tersebut masih terbuka. Hingga September 2026, pendapatan negara disebut telah mencapai 74,2% dari target dan tumbuh 25,5%.

Namun, Yusuf mengingatkan ruang fiskal pemerintah relatif tipis dan sangat bergantung pada kinerja penerimaan serta perkembangan harga komoditas.

Oleh karena itu, komitmen pemerintah menjaga defisit di bawah 3% perlu diikuti proyeksi pendapatan dan kebutuhan pembiayaan yang lebih terperinci.

Jalankan Program Prioritas

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan belanja APBN pada kuartal IV-2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada kuartal IV-2025 yang mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial," ujar Suahasil dalam konferensi pers, Senin (19/10).

Suahasil menegaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Penelaahan dilakukan untuk memastikan anggaran terlaksana sesuai rencana, dengan penggunaan yang lebih efisien.

Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan program prioritas Presiden. Fokus efisiensi terletak pada upaya mencapai keluaran atau output yang telah direncanakan dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Suahasil menyebut perubahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan membuka ruang efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Di sisi lain, Suahasil memastikan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar 2,58% terhadap PDB, sesuai dengan outlook yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Ekonom Soroti Risiko Utang dan Kualitas Belanja

Yusuf mengatakan, ekspansi fiskal pada akhir tahun masih dapat dibenarkan dari sisi siklus ekonomi, terutama ketika konsumsi rumah tangga melemah.

Penyaluran bantuan pangan pada kuartal IV juga berpotensi menopang daya beli masyarakat dan menahan perlambatan ekonomi. Meski demikian, dia mengidentifikasi sejumlah risiko yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pertama, peningkatan belanja terjadi ketika pasar saham, pasar surat utang, dan rupiah sedang berada dalam tekanan. Defisit yang mendekati 3% terhadap PDB berpotensi dibaca investor sebagai pelemahan disiplin fiskal, terutama jika sumber tambahan belanja tidak dijelaskan secara terbuka.

Persepsi tersebut dapat meningkatkan premi risiko dan memperbesar tekanan terhadap rupiah.

Kedua, biaya pembiayaan pemerintah juga perlu diwaspadai. Yusuf menyebut penarikan utang hingga September telah mencapai Rp 494,3 triliun. Apabila pemerintah harus menerbitkan utang tambahan ketika imbal hasil surat berharga negara (SBN) meningkat, beban bunga berpotensi semakin berat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara disebut sudah mendekati 19%.

Ketiga, percepatan belanja pada akhir tahun berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan anggaran. Jika sekitar sepertiga dari belanja tahunan harus dikebut dalam tiga bulan terakhir, terutama pada November dan Desember, waktu pelaksanaan serta pengawasan program dapat menjadi lebih terbatas.

Akibatnya, anggaran berisiko terserap secara administratif tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.

Keempat, pemerintah perlu menjaga konsistensi komunikasi kebijakan fiskal. Menurut Yusuf, narasi efisiensi akan sulit dipercaya apabila belanja justru berpotensi melampaui pagu tanpa penjelasan yang memadai.

Kata Yusuf, pasar tidak hanya mencermati besaran defisit, tetapi juga konsistensi antara komunikasi, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Yusuf menilai pelampauan pagu belanja masih dapat dikelola secara sehat apabila tambahan belanja terutama berasal dari kebutuhan wajib, seperti subsidi, kompensasi energi, dan bunga utang, serta dijelaskan secara transparan.

Selain itu, penerimaan negara harus cukup kuat untuk menjaga defisit tetap terkendali. Belanja tambahan juga perlu diarahkan pada program dengan efek pengganda yang cepat dan terukur, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran dan program padat karya.

Dia mendorong pemerintah segera menyampaikan proyeksi terbaru mengenai belanja, pendapatan, defisit, dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir 2026.

Apabila terdapat kekurangan pembiayaan, kata Yusuf, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) dapat menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan menambah utang baru ketika biaya pembiayaan sedang mahal.

Tanpa kejelasan mengenai proyeksi tersebut, dia mengingatkan belanja kuartal IV sebesar Rp 1.300 triliun berisiko dipersepsikan pasar bukan sebagai stimulus yang terukur, melainkan sebagai sinyal melemahnya disiplin fiskal.

Realisasi Investasi Capai Rp 528,7 Triliun di Kuartal III-2026, Kontribusi PMA 51,1%

Selasa, 20 Oktober 2026 06:18 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-capai-rp-5287-triliun-di-kuartal-iii-2026-kontribusi-pma-511>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, realisasi investasi mencapai Rp 528,7 triliun di kuartal III-2026. Capaian tersebut tumbuh 7,6% secara tahunan atau year on year (YoY).

Realisasi investasi pada kuartal III-2026 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada kuartal I-2026 dan kuartal II-2026, yang masing-masing hanya Rp 498,79 triliun dan Rp 511,8 triliun.

Sehingga jika ditotal, realisasi investasi sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun. Jumlah tersebut setara 75,4% dari target di tahun 2026 yang sebesar Rp 2.041,3 triliun. Secara total realisasi ini tumbuh 7,3% YoY.

Berdasarkan asal modal, penanaman modal asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 270,2 triliun atau 51,1% dari total realisasi investasi pada kuartal III-2026. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 258,5 triliun atau 48,9% dari total investasi.

Dari sisi sebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan nilai Rp 271,6 triliun atau 51,4% dari total realisasi investasi. Adapun investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 257,1 triliun atau 48,6% dari total investasi.

Realisasi investasi pada kuartal III-2026 tersebut juga menyerap tenaga kerja sebanyak 745.634 orang, meningkat 5,1% secara tahunan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investasi adalah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga.

Integrasi tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam negeri maupun asing, terutama terkait proses dan waktu penerbitan perizinan.

Rosan menjelaskan, melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, BKPM dapat menerbitkan perizinan apabila kementerian atau lembaga terkait tidak mengeluarkan keputusan dalam batas waktu pelayanan yang telah ditentukan.

Mekanisme tersebut dikenal sebagai fiktif positif. Rosan menyebut, pihaknya telah menerbitkan sekitar 328 perizinan melalui mekanisme tersebut.

"Jadi, apabila kementerian lain memiliki service level agreement (SLA) 10 hari, tetapi dalam 10 hari mereka tidak mengeluarkan izin, otomatis kementerian kami bisa mengeluarkannya. Itu yang namanya fiktif positif dan sudah kami terapkan," ujar Rosan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, penerapan mekanisme tersebut mendapat apresiasi dari kementerian dan lembaga serta investor dalam maupun luar negeri karena dinilai dapat memberikan kepastian dalam proses perizinan.

Selain itu, BKPM juga telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait perizinan bagi tenaga kerja asing, termasuk izin tinggal terbatas (KITAS).

Rosan mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perizinan bagi tenaga kerja asing. Ia mencontohkan, proses perizinan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan diharapkan bisa dipangkas menjadi lebih singkat.

"Investor tentunya mengharapkan kepastian. Mereka tidak suka dengan kejutan yang tidak terduga. Itu yang coba kami lakukan, yakni mengurangi ketidakpastian, baik dari segi perizinan, waktu, maupun investasi," katanya.

Rosan menegaskan, upaya mengurangi ketidakpastian menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Realisasi Investasi Sektor Hilirisasi di Dua Tahun Prabowo Capai Rp 1.199 Triliun

Selasa, 20 Oktober 2026 14:22 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-sektor-hilirisasi-di-dua-tahun-prabowo-capai-rp-1199-triliun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto khususnya di sektor hilirisasi mencapai Rp 1.199,0 triliun. Angka ini terhitung sejak kuartal IV 2024 hingga September 2026.

Dalam perinciannya, realisasi investasi hilirisasi pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar Rp 134,9 triliun, kemudian sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 584,1 triliun.

Terbaru, realisasi investasi hilirisasi selama Januari-September 2026 mencapai Rp 480,0 triliun.

Pemerintah menyebut sektor hilirisasi masih menjadi mesin penggerak masuknya investasi ke Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, selain pertumbuhan investasi secara keseluruhan, hilirisasi terus menunjukkan perkembangan positif sebagai salah satu penggerak investasi nasional.

Sepanjang Januari-September 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 480,0 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 31,2% terhadap total realisasi investasi nasional.

Investasi hilirisasi tersebut didominasi sektor mineral dengan realisasi sebesar Rp 335,1 triliun, yang mencakup komoditas nikel sebesar Rp 118,9 triliun, bauksit Rp 115,7 triliun, besi baja Rp 40,8 triliun, tembaga Rp39,5 triliun, serta pasir silika Rp7,0 triliun.

“Kalau kami melihat trennya, tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu 26%. Di 2026 triwulan ketiga itu sudah 34%, walaupun dari Januari ke September itu kontribusinya 31%. Tentunya kita akan tetap mendorong agar investasi ini terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas dan juga bisa memberikan dampak yang positif seperti penyerapan tenaga kerja”, ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Di luar sektor mineral, realisasi investasi hilirisasi pada Januari - September 2026 juga mencakup sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp 83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp 54,0 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp 7,3 triliun. Capaian ini menggambarkan semakin luasnya pengembangan hilirisasi pada berbagai komoditas potensial Indonesia.

Dari sisi persebaran wilayah, sebanyak 78% investasi hilirisasi atau senilai Rp 373,1 triliun terealisasi di luar Jawa. Lima provinsi dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar adalah Sulawesi Tengah sebesar Rp 100,4 triliun, Maluku Utara Rp 84,1 triliun, Jawa Barat Rp 36,9 triliun, Kalimantan Barat Rp 35,4 triliun, dan Sulawesi Tenggara Rp 27,9 triliun.

Pada Triwulan III 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp 179,9 triliun, meningkat 19,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa hilirisasi semakin berperan dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Belanja Pemerintah pada Kuartal IV Meningkat, Ekonom Ingatkan Risiko Defisit

Selasa, 20 Oktober 2026 18:50 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pemerintah-pada-kuartal-iv-meningkat-ekonom-ingatkan-risiko-defisit>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara pada kuartal IV-2026 dengan target mencapai Rp 1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara pada kuartal IV-2025 yang mencapai Rp 1.200 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja kuartal IV tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

Sebagai perbandingan, dengan belanja negara sebesar Rp 1.200 triliun pada kuartal IV-2025, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,39% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu untuk belanja pada

kuartal IV-2026, ekonom melihat dampaknya belum akan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Justru nilai anggaran belanja kuartal IV diperkirakan bisa memperlebar defisit APBN tahun ini, pasalnya 70% dari total pagu belanja Rp 3.842 triliun sudah terserap, sehingga hanya tersisa Rp 1.180 triliun. Artinya terdapat kenaikan sekitar Rp 120 triliun dari pagu awal.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, peningkatan belanja pemerintah tersebut berpotensi memberikan dorongan terhadap perekonomian. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sumber pembiayaan dan alokasi belanja yang dilakukan pemerintah.

Menurut David, peningkatan belanja negara akan menimbulkan dua dampak. Pertama, berefek pada konsekuensi terhadap kebutuhan pembiayaan pemerintah, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun instrumen lainnya untuk menutupi defisit anggaran.

Efek kedua adalah berisiko memperlebar defisit fiskal. Meski demikian, target belanja tersebut masih dapat dinilai rasional apabila penerimaan negara mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam outlook APBN 2026, penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.208,1 triliun. Dengan asumsi penerimaan tersebut tercapai, pemerintah diharapkan mampu menjaga rasio defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 2,85%.

David menekankan, besarnya belanja negara saja tidak cukup untuk memastikan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pemerintah perlu memastikan anggaran dialokasikan pada sektor-sektor yang mampu menghasilkan dampak berganda atau multiplier effect besar bagi perekonomian.

"Agar berdampak ke ekonomi, perlu ada penajaman ke sektor-sektor yang berdampak multiplier efek besar," ujar David kepada Kontan, Selasa (20/10/2026).

Di sisi lain meski nilai anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun efeknya ke pertumbuhan ekonomi belum akan signifikan bisa mendorong ke 6%, bahkan diperkirakan hanya stagnan di kisaran 5%.

Untuk itu menurutnya tambahan belanja negara perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu mendorong konsumsi, investasi, serta aktivitas dunia usaha. Ketepatan alokasi anggaran menjadi faktor penting agar peningkatan belanja benar-benar menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi.

Senada, Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merealisasikan target belanja negara sebesar Rp 1.300 triliun pada kuartal IV-2026. Menurutnya, peningkatan belanja yang terlalu agresif berpotensi meningkatkan defisit anggaran, terutama apabila tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang memadai.

"Kalau dipaksakan sampai Rp 1.300 triliun, tentu suka tidak suka defisit akan naik. Masalahnya, pemerintah harus memperhitungkan kondisi penerimaan negara," kata Juniman kepada Kontan, Selasa (20/10/2026)

Ia memperkirakan, selama penerimaan negara dapat mencapai target, pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit fiskal agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam anggaran.

Namun, apabila penerimaan negara berada di bawah target, tekanan terhadap fiskal berpotensi meningkat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar keuangan negara tidak menghadapi tekanan pada akhir 2026.

Juniman menilai, pemerintah perlu menghitung kembali kemampuan fiskal sebelum merealisasikan target belanja yang lebih tinggi. Menurutnya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja

negara tetap penting, tetapi harus disertai perhitungan yang cermat terhadap kemampuan penerimaan dan pembiayaan anggaran.

Pasalnya, apabila defisit anggaran melampaui 3% terhadap PDB, kredibilitas fiskal pemerintah berpotensi terganggu. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Selain itu, jika defisit yang melampaui batas yang diatur dalam APBN dan undang-undang, pemerintah bersiko menghadapi persoalan dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," ujar Juniman.

Karena itu, Juniman menekankan pentingnya evaluasi terhadap rencana belanja negara pada akhir tahun. Jika target belanja Rp 1.300 triliun berisiko mendorong defisit melampaui batas yang ditetapkan 3%, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali besaran dan prioritas pengeluarannya.

Menurut Juniman, jika tidak memungkinkan, pemerintah harus lebih rasional dalam mengelola belanja negara.

"Efektivitas dan efisiensi belanja, refocusing anggaran, serta penentuan prioritas belanja harus benar-benar dilakukan pada akhir kuartal IV-2026," ujar Juniman.

Tinjau Operasional KDMP, Ahmad Luthfi Pastikan Beri Manfaat untuk Warga

Selasa, 20 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/tinjau-operasional-kdmp-ahmad-luthfi-pastikan-beri-manfaat-untuk-warga/>

BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau operasional Koperasi Desa Meraih Putih (KDMP) di wilayahnya, Selasa (20/10/2026). Ada dua titik yang ditinjau, yaitu KDMP Bergas Kidul Kabupaten Semarang, dan KDMP Banyudono Kabupaten Boyolali.

Pada dua titik tersebut, Luthfi menegaskan agar koperasi itu dipromosikan kepada warga, sehingga keberadaannya memberikan manfaat untuk warga desa. Dia juga meminta agar koperasi tersebut sebagai penguat swasembada pangan, serta off taker (pembeli) produk lokal dan UMKM setempat.

"KDMP adalah aset desa, jadi harus dirawat, masyarakat harus diworo-woro atau dikasih tahu kalau sudah operasional. Masyarakat harus tahu, bahwa ini juga untuk kepentingan desa. Informasikan kalau di KDMP itu menjual bahan pokok penting dengan harga murah," kata gubernur, se usai peninjauan di dua lokasi tersebut.

Ditambahkan, KDMP yang sudah operasional tersebut dapat menjadi acuan atau tempat belajar, bagi KDMP lain yang belum beroperasi. Baik dari tata kelola, sistem kerja, hingga bagaimana menjalin kerja sama dengan UMKM lokal melalui konsinyasi.

"Manajer-manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi, bisa belajar ke sini yang sudah operasional. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya nganggur," bebernya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut juga menekankan peran penting koperasi sebagai penguat swasembada pangan. Apalagi, setiap desa memiliki kearifan lokal dan potensi berbeda-beda.

"Potensi desa harus digalang, KDMP merupakan off taker daripada produk-produk desa, termasuk di dalamnya adalah hasil pangan dan UMKM," katanya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, per 19 Oktober 2026, KDKMP yang sudah terbentuk di Jawa Tengah sebanyak 8.523 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 5.427 koperasi atau 63% telah operasional, sedangkan sebanyak 3.096 koperasi atau 37% masih tahap persiapan. Untuk jumlah gedung KDKMP yang telah terbangun sebanyak 5.895 gedung.

Dari sisi kepemilikan gerai, pola pengembangan usaha KDKMP di Jawa Tengah cukup beragam. Rinciannya adalah 4.432 KDKMP memiliki 1 gerai, 749 KDKMP memiliki 2 gerai, 175 KDKMP memiliki 3 gerai, 28 KDKMP memiliki 4 gerai, 39 KDKMP memiliki 5 gerai, 3 KDKMP memiliki 6 gerai, dan 1 KDKMP memiliki 7 gerai.

Luthfi mengakui, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KDMP, sehingga belum dapat beroperasi. Salah satunya, infrastruktur serta sarana prasarana yang belum lengkap. Misalnya, ada KDMP yang listriknya kurang, kendaraan belum ada, barang-barang yang akan dijual belum datang, dan sebagainya.

“Ya memang kita harus berjenjang dan berkelanjutan. Kenapa kita lakukan pengecekan, agar kita dapat evaluasi kurangnya apa,” jelasnya.

Warga Desa Banyudono, Sri Mulyani mengaku, memilih belanja di KDMP karena harga bahan pokok yang dijual lebih murah dan terjangkau. Misalnya, harga minyak goreng di pasaran sekitar Rp22 ribu tetapi di KDMP hanya Rp16 ribu. Selain itu juga lebih dekat dari rumahnya.

“Harapannya dengan adanya KDMP ini apa saja murah, sehingga kebutuhan di rumah dapat terpenuhi,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

BI Purwokerto memperkuat ekosistem ekonomi syariah Banyumas Raya

Selasa, 20 Oktober 2026 09:56 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/649373/bi-purwokerto-memperkuat-ekosistem-ekonomi-syariah-banyumas-raja>

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Banyumas Raya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, pemberdayaan pesantren, digitalisasi keuangan sosial syariah, serta peningkatan literasi masyarakat.

“Penguatan tersebut sejalan dengan upaya nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata Kepala KPwBI Purwokerto Aswin Gantina di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan, yakni memfasilitasi sembilan UMKM atau Pelaku Usaha Syariah (PUS) binaan KPwBI Purwokerto untuk berpartisipasi dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Ke-13 pada 14-18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Dalam ajang tersebut, kata dia, pelaku usaha Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, menampilkan produk unggulan, khususnya kuliner halal dan batik daerah, guna memperluas akses pasar, menjalin kemitraan usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Menurut dia, partisipasi itu juga membuahkan prestasi melalui Thulada Lumbung Rempah asal Kabupaten Banjarnegara yang meraih juara kedua Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) 2026 kategori Produk UMKM IKRA.

“Kompetisi tersebut melibatkan 10 juri yang merupakan president chef dari 10 negara sekaligus berpotensi menjadi pembeli produk,” katanya .

Ia mengharapkan capaian itu membuka peluang pengembangan produk UMKM menuju pasar internasional.

Selain penguatan UMKM, pihaknya mendorong kemandirian pesantren melalui pelatihan kewirausahaan, pelaporan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaku Usaha Syariah Bank Indonesia (SIPUSBI), praktik budi daya cabai dengan metode Good Agricultural Practices (GAP), serta peningkatan kompetensi teknologi digital bagi santri dari lima pesantren di Banyumas Raya.

“Penguatan keuangan sosial syariah dilakukan melalui edukasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), termasuk pemanfaatan QRIS bagi pengurus masjid,” katanya.

Ia mengatakan literasi ekonomi dan keuangan syariah juga menyasar UMKM dan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi produk lokal.

Pihaknya turut mempromosikan Desa Wisata Lembah Asri Serang (D'LAS) di Kabupaten Purbalingga sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim dalam ajang ISEF 2026.

Berdasarkan data, ISEF 2026 mencatat penjualan produk makanan halal dan fesyen sebesar Rp13,85 miliar serta nilai business matching pembiayaan dan perdagangan syariah sebesar Rp3,16 triliun.

“Ke depan, BI Purwokerto bersama pemerintah daerah dan mitra strategis akan terus memperkuat industri halal, pemberdayaan pesantren, keuangan sosial syariah, serta pengembangan UMKM dan wastra lokal agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat bagi perekonomian Banyumas Raya,” kata Aswin.

Inflasi Inggris Melonjak Menjadi 3,5%, Suku Bunga Berpotensi Naik pada November 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 13:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-inggris-melonjak-ke-35-suku-bunga-berpotensi-naik-pada-november>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inflasi Inggris meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada September 2026, seiring lonjakan harga energi akibat perang Iran yang semakin menekan biaya hidup masyarakat. Kondisi ini memperkuat ekspektasi pasar bahwa Bank of England (BoE) akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada bulan depan.

Data resmi yang dirilis pada Rabu (21/10/2026) menunjukkan, inflasi konsumen tahunan Inggris mencapai 3,5% pada September 2026, naik dari 3,1% pada Agustus 2026.

Angka tersebut melampaui perkiraan median ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memproyeksikan inflasi meningkat menjadi 3,4%. Kenaikan harga energi yang dipicu perang Iran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tekanan inflasi semakin kuat pada bulan lalu.

Sebelumnya, Bank of England memperkirakan inflasi Inggris hanya akan meningkat menjadi 3,0% dalam proyeksi yang diterbitkan pada Juli 2026.

Inggris menghadapi dampak perang di kawasan Teluk lebih besar dibandingkan sebagian besar negara Barat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari ketergantungan Inggris yang tinggi terhadap impor gas alam.

BoE sebelumnya menyatakan bahwa guncangan harga energi sejauh ini masih memberikan dampak terbatas terhadap inflasi Inggris secara keseluruhan. Namun, Gubernur BoE Andrew Bailey dan sejumlah pembuat kebijakan lainnya menilai kemungkinan kenaikan suku bunga semakin besar apabila harga energi bertahan pada level tinggi dalam waktu yang lebih lama.

Pasar Perkiraan Suku Bunga Inggris Naik pada November

Pelaku pasar memperkirakan Bank of England akan menaikkan suku bunga acuan atau Bank Rate menjadi 4% pada November 2026. Jika terealisasi, langkah tersebut akan menjadi kenaikan suku bunga pertama dalam tiga tahun terakhir.

Sejak perang Amerika Serikat (AS)-Iran pecah pada Februari 2026, bank sentral Inggris sejauh ini mempertahankan suku bunga acuannya tanpa perubahan.

Selain perkembangan inflasi, kondisi pasar tenaga kerja juga berpotensi memengaruhi keputusan kebijakan moneter BoE. Data yang dirilis pada Selasa (20/10/2026) menunjukkan tanda-tanda stabilisasi di pasar tenaga kerja Inggris.

Perkembangan tersebut berpotensi memperkuat alasan bagi bank sentral untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan tekanan inflasi.

Kenaikan suku bunga umumnya digunakan bank sentral untuk menekan permintaan dalam perekonomian dan mengendalikan laju kenaikan harga. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha.

Pemerintah Inggris Siapkan Dukungan bagi Rumah Tangga

Rilis data inflasi terbaru ini berlangsung sepekan sebelum Menteri Keuangan Inggris John Healey menyampaikan anggaran pertamanya.

Dalam anggaran tersebut, Healey diperkirakan akan menawarkan tambahan dukungan bagi rumah tangga yang paling terdampak oleh kenaikan harga energi.

Lonjakan biaya energi menjadi tantangan bagi pemerintah Inggris karena berpotensi memperbesar beban pengeluaran masyarakat sekaligus mempersulit upaya pengendalian inflasi.

Kombinasi kenaikan inflasi, ketidakpastian harga energi, dan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter membuat perkembangan ekonomi Inggris menjelang akhir 2026 menjadi perhatian pelaku pasar.

Inflasi Jepang Beralih ke Fase Berkelanjutan yang Didorong Kenaikan Upah

Rabu, 21 Oktober 2026 10:02 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-jepang-beralih-ke-fase-yang-didorong-kenaikan-upah>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengungkapkan, ekonomi Jepang tengah mengalami inflasi akibat tingginya biaya impor dan kini berada di ambang transisi menuju periode inflasi berkelanjutan yang didorong oleh kenaikan upah.

Mengutip Reuters, Rabu (21/10/2026), Katayama menyampaikan kepada parlemen bahwa rencana pemerintah untuk memangkas pajak konsumsi serta pemberian dana bantuan ditujukan untuk meringankan beban rumah tangga akibat meningkatnya biaya hidup.

"Kami terus bertukar pandangan dengan Bank of Japan (BOJ) dalam berbagai aspek. Tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan BOJ," kata Katayama saat menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen mengenai apakah rencana pemangkasan pajak oleh pemerintah dapat bertentangan dengan upaya bank sentral dalam menangani inflasi melalui kenaikan suku bunga.

Pada bulan September, BOJ menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 31 tahun terakhir, yakni 1,25%. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya risiko inflasi inti yang dapat melampaui target 2%, yang dipicu oleh guncangan energi akibat perang di Iran, tingginya permintaan global terhadap kecerdasan buatan (AI), serta kenaikan biaya impor akibat pelemahan mata uang yen.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana memangkas pajak konsumsi sebesar 8% untuk produk makanan selama dua tahun, mulai April tahun depan.

Para analis memperingatkan bahwa pemangkasan pajak dan rencana belanja besar-besaran pemerintah dapat memicu lonjakan permintaan, yang justru berlawanan dengan upaya BOJ untuk mengendalikan inflasi.

Katayama mengakui bahwa pemangkasan pajak pada umumnya memang dapat mendorong inflasi dengan cara memacu permintaan.

"Namun, kami akan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif ini mampu meningkatkan kapasitas penawaran Jepang, tanpa memicu percepatan inflasi," ujarnya.

Yuan China Sentuh Level Tertinggi Sejak 2022, Ekspor Jadi Penopang

Rabu, 21 Oktober 2026 10:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-china-sentuh-level-tertinggi-sejak-2022-ekspor-jadi-penopang>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yuan China menguat hingga menyentuh level tertinggi dalam lebih dari empat tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (21/10/2026).

Penguatan ini ditopang kinerja ekspor yang solid, ketahanan ekonomi domestik, serta pelemahan dolar AS di pasar global.

Mengutip Reuters, yuan di pasar domestik sempat menguat ke level 6,6765 per dolar AS pada perdagangan pagi, terkuat sejak 28 Juni 2022. Namun, yuan kemudian sedikit melemah ke posisi 6,6791 per dolar AS pada pukul 02.50 GMT.

Dolar AS masih berada dalam tekanan setelah turun ke level terendah dalam tiga pekan pada sesi sebelumnya.

Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan pelemahan harga minyak turut mengurangi daya tarik mata uang Negeri Paman Sam tersebut.

Penguatan yuan juga didukung ketahanan ekonomi China. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026 tercatat melampaui ekspektasi, ditopang kinerja ekspor yang kuat di tengah masih terbatasnya belanja konsumen domestik.

Analisis Caitong Securities menilai, ketahanan ekonomi, arus masuk modal, serta meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengonversi pendapatan valuta asing ke yuan menjadi faktor yang menopang tren penguatan mata uang China tersebut.

Meski demikian, laju apresiasi yuan diperkirakan berpotensi melambat. Ketidakpastian geopolitik dapat kembali meningkatkan permintaan terhadap dolar AS dan sedikit mengurangi arus masuk modal ke China.

Arus modal asing menopang yuan Arus masuk valuta asing turut memperkuat posisi yuan. Goldman Sachs memperkirakan, China mencatat arus masuk bersih valuta asing sebesar US\$ 50 miliar pada September 2026.

Rasio konversi valuta asing menjadi yuan juga meningkat menjadi 66% pada September, dibandingkan 63% pada bulan sebelumnya.

Peningkatan ini mengindikasikan semakin besarnya porsi penerimaan valuta asing yang dikonversi ke mata uang domestik.

Secara bulanan, yuan telah menguat 0,4% terhadap dolar AS pada Oktober. Sepanjang 2026, mata uang China tersebut tercatat menguat 4,7%.

Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) juga secara bertahap memperkuat kurs referensi harian seiring dengan apresiasi yuan di pasar.

Sebelum perdagangan dibuka pada Rabu, PBOC menetapkan kurs titik tengah yuan di level 6,7192 per dolar AS. Angka tersebut merupakan level terkuat sejak 2 Februari 2023, meskipun penetapannya 413 pip lebih lemah dibandingkan estimasi Reuters.

Kurs titik tengah tersebut menjadi acuan perdagangan yuan di pasar domestik. Pergerakan yuan spot diperbolehkan berada dalam rentang 2% di atas atau di bawah kurs referensi harian tersebut.

Sementara itu, yuan di pasar offshore tercatat melemah sekitar 0,05% ke level 6,6786 per dolar AS. Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama berada di level 101,77.

Pergerakan yuan menjadi perhatian pelaku pasar karena mencerminkan kombinasi antara ketahanan ekspor China, aliran modal lintas negara, dan perubahan sentimen terhadap dolar AS di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Peso Filipina Tertekan Paling Dalam, Rupiah Menguat Tipis terhadap Dolar AS

Rabu, 21 Oktober 2026 09:52 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/peso-filipina-tertekan-paling-dalam-rupiah-menguat-tipis-terhadap-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar mata uang Asia bergerak relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (21/10/2026). Peso Filipina mencatat pelemahan terdalam di kawasan, sedangkan rupiah menguat tipis di tengah tekanan terhadap sejumlah mata uang regional.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.21 GMT, peso Filipina melemah 0,22% menjadi 63,166 per dolar AS, dari posisi sebelumnya 63,03 per dolar AS.

Won Korea Selatan menyusul dengan pelemahan 0,09% ke level 1.327,36 per dolar AS. Dolar Taiwan turun 0,06% menjadi 32,635, sedangkan yen Jepang dan dolar Singapura masing-masing melemah 0,05% menjadi 158,24 yen dan 1,278 dolar Singapura per dolar AS.

Baht Thailand juga terkoreksi 0,05% menjadi 33,62 per dolar AS. Sementara itu, yuan China melemah 0,03% menjadi 6,68 per dolar AS.

Di tengah pergerakan tersebut, rupiah justru menguat tipis 0,02% menjadi Rp 17.977 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp 17.980 per dolar AS.

Rupiah India bergerak stagnan di level 94,925 per dolar AS, sedangkan ringgit Malaysia menguat 0,05% menjadi 4,08 per dolar AS.

Rupiah masih tertekan sepanjang tahun

Meski menguat tipis pada perdagangan harian, rupiah masih mencatat pelemahan cukup dalam sepanjang 2026. Dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar Rp 16.670 per dolar AS, rupiah telah melemah 7,27% ke level Rp 17.977 per dolar AS.

Pelemahan rupiah tersebut lebih dalam dibandingkan sejumlah mata uang Asia lainnya, termasuk peso Filipina yang terkoreksi 6,91% sepanjang tahun berjalan dan baht Thailand yang melemah 6,45%.

Rupiah India juga tertekan 5,33% sepanjang 2026, sedangkan dolar Taiwan melemah 3,67%. Yen Jepang turun 1%, sementara ringgit Malaysia terkoreksi 0,58%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menguat 8,52% dan yuan China naik 4,61% terhadap dolar AS sepanjang tahun berjalan. Dolar Singapura juga menguat 0,59%.

Pergerakan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan tipis rupiah dalam perdagangan harian belum mengubah tren pelemahannya secara kumulatif sepanjang tahun ini.

Pengangguran Anak Muda China Turun Jadi 18% pada September 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 09:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pengangguran-anak-muda-china-turun-jadi-18-pada-september-2026>

KONTAN.CO.ID - Tingkat pengangguran kaum muda di perkotaan China turun menjadi 18% pada September 2026, dari 18,9% pada Agustus.

Meski membaik, angka tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja bagi kelompok usia muda masih menghadapi tekanan.

Mengutip data Biro Statistik Nasional China (National Bureau of Statistics/NBS) yang dirilis Rabu (21/10/2026), tingkat pengangguran penduduk berusia 16–24 tahun di wilayah perkotaan, tidak termasuk pelajar, turun 0,9 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Agustus, tingkat pengangguran kelompok tersebut mencapai 18,9%, level tertinggi dalam 12 bulan terakhir.

Sementara itu, tingkat pengangguran penduduk berusia 25–29 tahun turun tipis menjadi 7,4% pada September, dari 7,5% pada Agustus.

Adapun tingkat pengangguran untuk kelompok usia 30–59 tahun tidak berubah, yakni sebesar 3,9%, sama seperti bulan sebelumnya.

Perkembangan ini menunjukkan perbedaan kondisi pasar tenaga kerja antarkelompok usia di China.

Tingkat pengangguran kaum muda masih jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih matang, meskipun angkanya mulai menurun pada September.

Ekspor Jepang Naik 16,7% pada September, Permintaan Chip AI Menopang Perdagangan

Rabu, 21 Oktober 2026 09:26 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-jepang-naik-167-pada-september-permintaan-chip-ai-menopang-perdagangan>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Ekspor Jepang naik 16,7% pada bulan September dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Menurut data pemerintah yang dirilis pada Rabu (21/10/2026), kenaikan ekspor didukung kuatnya permintaan akan semikonduktor dan produk terkait kecerdasan buatan (AI) yang terus menopang pertumbuhan.

Mengutip Reuters, Rabu (21/10/2026), kenaikan ekspor yang terjadi selama 13 bulan berturut-turut ini menyusul lonjakan 19,3% pada bulan Agustus, sebagaimana ditunjukkan oleh data Kementerian Keuangan.

Investasi global dalam kecerdasan buatan terus mendukung ekspor semikonduktor dan peralatan terkait dari Jepang, dengan investasi dari produsen cip Korea Selatan turut meningkatkan permintaan terhadap perangkat pembuatan cip asal Jepang.

Ekspor otomotif juga tetap kuat, terutama ke Eropa, di mana pemulihan ekonomi telah membantu mendorong permintaan.

"Permintaan terkait AI diperkirakan akan terus menopang ekspor Jepang, namun risiko penurunan dari Timur Tengah tetap ada; konflik yang berkepanjangan berpotensi menekan permintaan global melalui harga energi yang terus tinggi," ujar ekonom Koki Akimoto dari Daiwa Institute of Research.

Akimoto menambahkan, potensi perlambatan investasi AI di Amerika Serikat merupakan risiko yang dapat menghambat ekspor Jepang dengan melemahnya permintaan terkait semikonduktor dari negara-negara Asia lain yang menjadi pemasok bagi AS.

Berdasarkan tujuan pengiriman, ekspor ke AS naik 22,9% pada bulan September dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pengiriman ke Tiongkok meningkat 8,6%.

Impor pada bulan September naik 18,9% secara tahunan, dibandingkan dengan perkiraan median para ekonom sebesar 19,6%. Pertumbuhan impor melambat dari 28% pada bulan Agustus akibat penurunan pasokan minyak mentah.

Hal ini terjadi setelah kapal-kapal tanker mengalihkan rute agar tidak melewati Selat Bab el-Mandeb, menyusul deklarasi blokade laut terhadap Arab Saudi oleh milisi Houthi yang berbasis di Yaman dan berafiliasi dengan Iran, yang menyebabkan tertundanya pengiriman ke Jepang.

Pemerintah menyatakan bahwa untuk bulan Oktober, pengadaan minyak mentah diperkirakan akan pulih hingga mencapai sekitar 100% dari tingkat yang tercatat pada bulan yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan tibanya kapal-kapal tanker yang melintasi Terusan Suez.

Melambatnya impor membantu memperkecil defisit perdagangan Jepang menjadi 536,6 miliar yen (\$3,39 miliar) pada bulan September, turun dari 1,1 triliun yen pada bulan sebelumnya.

Angka tersebut dibandingkan dengan perkiraan pasar yang memprediksi defisit sebesar 181 miliar yen.

Data ini menunjukkan bahwa permintaan eksternal masih mendukung perekonomian, meskipun ketidakpastian mengenai prospek global—yang dipicu oleh konflik serta sentimen yang fluktuatif terkait kecerdasan buatan (AI)—terus membayangi prospek para eksportir.

Bank of Japan akan mengadakan rapat kebijakan bulan ini, di mana mereka akan merilis prakiraan pertumbuhan dan inflasi kuartalan. Pasar akan mencermati data tersebut untuk mencari petunjuk mengenai waktu kenaikan suku bunga berikutnya.

(\$1 = 158,2600 yen)

Pemerintahan Trump Digugat atas Tarif Impor 50% untuk Kanada

Rabu, 21 Oktober 2026 11:20 WIB

Zoe Tillman

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125228/pemerintahan-trump-digugat-atas-tarif-impor-50-untuk-kanada/2>

Bloomberg, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump digugat atas pemberlakuan tarif sebesar 50% terhadap berbagai produk asal Kanada. Gugatan ini menjadi kasus terbaru dalam serangkaian tuntutan hukum yang secara luas menuduh Trump berupaya menjalankan agenda perdagangannya dengan menggunakan kewenangan pemungutan pajak yang seharusnya berada di tangan Kongres.

Gugatan yang diajukan pada Selasa (20/10) tersebut muncul di tengah perang dagang yang masih berlangsung antara AS dan salah satu mitra dagang terbesarnya. Perusahaan importir pangan yang mengajukan gugatan itu menilai Trump tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan salah satu pasal dalam undang-undang AS yang belum pernah diterapkan sebelumnya guna memberlakukan tarif terhadap Kanada. Perusahaan tersebut juga menilai kebijakan itu merupakan bagian dari pola tindakan pemerintah yang melanggar hukum dalam penerapan tarif.

Gugatan tersebut berfokus pada tarif yang diberlakukan berdasarkan Pasal 338 Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley 1930. Tarif itu mulai berlaku pada akhir Agustus, setelah berminggu-minggu negosiasi yang bertujuan meredakan ketegangan perdagangan antara AS dan Kanada. Para negosiator sempat terlihat menyepakati garis besar kesepakatan awal sebelum perundingan tersebut kandas.

Tarif awal sebesar 50% dikenakan terhadap produk-produk asal Kanada senilai sekitar US\$20 miliar. Kebijakan itu kemudian diikuti sejumlah keputusan presiden yang mengubah dan memperluas daftar produk yang terkena tarif. Perdana Menteri Kanada Mark Carney merespons dengan memberlakukan tarif balasan yang mulai berlaku pada 8 September. Pemerintahan Trump pada akhirnya juga melarang impor sejumlah produk Kanada ke AS, termasuk sepeda motor, minuman beralkohol, dan produk whey.

Pasal 338 dimaksudkan untuk mengatasi perlakuan diskriminatif terhadap perdagangan AS. Namun, pihak penggugat berpendapat bahwa Kongres telah “meninggalkan” ketentuan tersebut beberapa tahun kemudian demi menerapkan “kerangka aturan yang lebih komprehensif”. Mereka juga menyatakan bahwa tidak pernah ada presiden yang memberlakukan tarif berdasarkan pasal tersebut. Kalaupun ketentuan itu masih berlaku, gugatan tersebut menyebut alasan Trump mengenakan tarif terhadap Kanada tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Selain itu, besaran tarif 50% dinilai tidak memiliki dasar yang sesuai dengan ketentuan hukum yang mewajibkan tarif tersebut untuk “mengimbangi” beban atau kerugian yang sebenarnya.

Pihak penggugat, Gellert Global Group Corp, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor pangan, termasuk keju asal Kanada yang terkena tarif berdasarkan Pasal 338. Gugatan ini diajukan melalui Liberty Justice Center, organisasi nirlaba yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah perkara hukum terkait tarif Trump.

“Tidak ada presiden yang seharusnya memiliki kewenangan untuk mengambil ketentuan hukum yang sudah lama tidak digunakan, lalu memakainya untuk memberlakukan tarif besar-besaran atau larangan impor tanpa batasan yang telah ditetapkan Kongres,” kata Ketua Liberty Justice Center Sara Albrecht dalam sebuah pernyataan.

Setelah gugatan diajukan pada Selasa, seorang pejabat pemerintahan AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan melalui email bahwa Kanada masih mendiskriminasi industri AS, termasuk

sektor susu, minuman beralkohol, dan ekspor otomotif. Pejabat tersebut juga menyatakan bahwa pemerintahan Trump akan membela tindakan presiden di pengadilan.

Trump telah menghadapi serangkaian gugatan hukum terhadap kebijakan tarifnya. Mahkamah Agung AS tahun lalu membatalkan upaya pertamanya untuk memberlakukan tarif global berdasarkan undang-undang tentang kewenangan darurat ekonomi. Kekalahan tersebut memaksa otoritas bea cukai mengembalikan dana sebesar US\$166 miliar yang telah dipungut dari importir sebelum putusan hakim, ditambah bunga. Sementara itu, sengketa hukum terkait upaya kedua Trump untuk memberlakukan tarif terhadap banyak negara masih berlangsung ketika tarif tersebut berakhir pada Juli.

Pengadilan Perdagangan Internasional AS diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa pekan mendatang nasib putaran ketiga tarif global Trump terhadap puluhan negara dan perekonomian. Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan ketentuan hukum perdagangan AS yang dikenal sebagai Pasal 301, yang berkaitan dengan persoalan kerja paksa. Panel yang terdiri atas tiga hakim telah mendengarkan argumen para pihak pada akhir September.

BI: Ekonomi Global Masih Lesu, Suku Bunga AS Berpotensi Naik Lagi

Rabu, 21 Oktober 2026 14:55 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125306/bi-ekonomi-global-masih-lesu-suku-bunga-as-berpotensi-naik-lagi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memandang prospek perekonomian global masih lemah disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan kondisi itu dipengaruhi oleh makin kuatnya tensi perang di Timur Tengah, sehingga mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

"Pertumbuhan ekonomi global 2026 diperkirakan masih lemah sekitar 3% dan tekanan inflasi tetap tinggi sekitar 4,6%," ujar Destry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/10/2026).

Dia memperkirakan kebijakan moneter global ketat berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama atau *higher for longer*, termasuk besarnya peluang kenaikan kembali suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR).

Terkait hal itu, imbal hasil obligasi AS atau yield US Treasury juga tetap tinggi, sejalan dengan menguatnya ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter AS ke depan serta defisit anggaran pemerintah AS yang besar.

Di pasar keuangan global, preferensi investor terhadap aset portofolio di negara pasar berkembang masih terbatas dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang.

Kondisi ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Bank Sentral Tahan BI Rate Tetap 5,75%, Bunga Deposito Naik

Rabu, 21 Oktober 2026 13:56 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/125292/bank-sentral-tahan-bi-rate-tetap-5-75-bunga-deposito-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate tetap di level 5,75%. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan periode Oktober 2026 yang berlangsung pada 20-21 Oktober 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti menyebutkan, kendati menahan BI Rate, tetapi bank sentral meningkatkan suku bunga deposit facility 25 basis poin (bps) dari semula 4,75% menjadi 5%. Sementara itu, suku bunga lending facility tetap berada di angka 6,5%.

Kebijakan ini diambil setelah bank sentral menaikkan BI Rate yang cukup agresif 100 basis poin pada Mei dan Juni 2026 lalu.

"Keputusan ini diperkuat dengan peningkatan kebijakan insentif untuk instrumen domestik non-deliverable forward (DNDF) lindung nilai kepada BI guna menarik aliran modal asing guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas," ujar Destry dalam konferensi pers Hasil RDG BI hari ini, Rabu (21/10/2026).

Destry menegaskan kebijakan moneter ini akan tetap konsisten dengan strategi stabilisasi rupiah di tengah tekanan eksternal yang makin kuat juga untuk menjaga sasaran inflasi sesuai target pemerintah.

Sebelumnya, konsensus ekonom dan analis soal arah kebijakan moneter BI sempat terbelah. Makin banyak yang mengubah proyeksi suku bunga acuan BI Rate yang pengumumannya akan digelar siang ini, Rabu (21/10/2026).

Sebanyak 17 dari 38 ekonom/analis yang disurvei Bloomberg kini memperkirakan BI akan mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) jadi 6%. Sementara itu, dua ekonom (Bloomberg Economics dan Citigroup) memproyeksikan BI akan lebih agresif dengan menaikkan BI Rate sebanyak 50 bps jadi 6,25%.

Adapun 19 ekonom dan analis lainnya masih memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%.

Kelompok ekonom yang memperkirakan BI menahan suku bunga di 5,75% menilai bank sentral masih memiliki instrumen lain untuk menjaga stabilitas rupiah. Dari sisi inflasi, laju kenaikan harga konsumen pada September tercatat 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy), masih berada dalam sasaran BI sebesar 1,5-3,5%. Kondisi ini dianggap masih memberi ruang bagi BI tidak buru-buru menaikkan suku bunga.

Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi memperkirakan BI akan tetap menahan BI Rate di level sekarang.

"Kami memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%, setelah berhasil menjaga stabilitas rupiah. Di pasar spot rupiah kembali menguat dan berada di bawah level Rp18.000/US\$," sebut Lionel.

Data Bloomberg pagi ini menyebut rupiah kembali menguat ke kisaran Rp17.970/US\$, mempertahankan posisinya usai pelemahan terbatas dalam pembukaan pasar. Begitu juga dengan rupiah di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF), yang berhasil defensif di kisaran Rp17.998/US\$.

Sedangkan menurut kelompok yang berpandangan hawkish, BI perlu mengerek suku bunga acuan kali ini. Sebab, harga minyak dunia tetap menjulang tinggi yang berpotensi mengerek inflasi. Memang, inflasi September masih 3,28% dan berada di kisaran target BI di 1,5%-3,5%.

Kenaikan harga minyak itu masih dibayangi ketidakpastian resolusi konflik Timur Tengah berpotensi mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Kenaikan BI Rate jadi 6% pun bisa jadi sinyal lebih tegas tentang prioritas stabilitas moneter.

Selain itu, tekanan terhadap rupiah juga datang dari arus keluar modal asing di pasar saham setelah MSCI mengumumkan bahwa Indonesia sedang dipertimbangkan untuk turun status jadi Standalone Market.

BI Catat Arus Modal Asing Keluar Capai Rp1,44 T

Rabu, 21 Oktober 2026 19:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125332/bi-catat-arus-modal-asing-keluar-capai-rp1-44-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat arus modal asing di pasar keuangan domestik mengalami net outflow pada kuartal III-2026, mencerminkan lebih besarnya dana asing yang keluar dibandingkan dana yang masuk selama periode tersebut.

“Aliran investasi portofolio asing pada triwulan III-2026 mencatat net outflow sebesar US\$0,08 miliar (Rp 1,44 triliun dengan asumsi US\$1 sama dengan Rp18.006) terutama disebabkan outflow pada saham sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” kata Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Rabu (21/10/2026).

Secara rinci, keluarnya arus modal asing ini berasal dari saham yang terus berlanjut pada Oktober 2026.

Sementara itu, dana dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN masih mencatatkan inflows meski terus menurun.

“Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN mencatat inflow sehingga aliran investasi portofolio asing pada triwulan 4 2026 hingga 19 Oktober 2026 mencatat net inflow sebesar US\$0,66 miliar [Rp11,8 triliun],” kata Destry.

Sementara, BI juga menyebut bahwa Neraca perdagangan periode Agustus 2026 mencatat surplus sebesar US\$3,55 miliar (Rp63,9 triliun) meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya yang sebesar US\$12 juta miliar (Rp216 miliar)

“Neraca pembayaran Indonesia atau NPI perlu terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi,” sebut BI.

Sebelumnya, Goldman Sachs menyebut penghapusan Indonesia dari Indeks MSCI memicu arus dana keluar US\$5,6 miliar atau setara sekitar Rp100,8 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan volume perdagangan harian rata-rata selama 18 hari untuk saham-saham konstituen MSCI Indonesia Investable Market Index.

Tambahan dana sebesar US\$2,7 miliar juga berisiko keluar jika FTSE mengambil langkah serupa, menurut analis, termasuk Alvin So dan Timothy Moe, dalam sebuah catatan riset.

Rupiah Tutup Perdagangan di Atas Rp18.000/US\$

Rabu, 21 Oktober 2026 15:22 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125317/rupiah-tutup-perdagangan-di-atas-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup sesi perdagangan Rabu (21/10/2026) dengan depresiasi 0,1% ke Rp18.005/US\$, setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di 5,75%.

Rupiah sempat menguat kemarin, sehari sebelum pengumuman BI Rate. Namun setelah pengumuman, sepertinya pasar merespons lebih hati-hati sikap BI yang terlihat berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di pasar luar negeri, rupiah terdepresiasi 0,15% ke Rp18.052/US\$ dibayangi adanya kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia jadi standalone market oleh MSCI. Meskipun belum diputuskan dan masih menjadi pertimbangan MSCI, arus keluar modal asing dari pasar saham terjadi sejak akhir pekan lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg hingga pertengahan Oktober 2026, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatat arus masuk modal asing sekitar US\$2,4 miliar sepanjang tahun ini. Namun, arus modal yang keluar terlihat lebih besar, yakni sekitar US\$5,2 miliar.

Dengan mempertimbangkan tekanan yang ada, Bloomberg Economics memperkirakan rupiah di pasar spot akan bergerak di sekitar Rp18.000/US\$. Meski begitu, risiko pelemahan lebih lanjut tetap terbuka, termasuk kemungkinan kembali menguji area tertinggi intraday tahun ini di Rp18.190/US\$.

Mata Uang Asia

Dari sisi eksternal, indeks dolar AS menguat terbatas 0,05% ke 101,75 meski yield US Treasury terpankaskan jadi 5,11%. Sementara, harga minyak masih tinggi dan berada di kisaran US\$109/barel.

Namun, yield obligasi pemerintah AS yang terpankaskan membawa ruang penguatan bagi sebagian mata uang kawasan. Dolar Taiwan menguat, bersama rupee India, won Korea Selatan, baht Thailand, ringgit Malaysia, dolar Hong Kong, dan yen Jepang.

Sebaliknya, peso Filipina dan rupiah melemah pada sesi perdagangan hari ini.

Selain terpankaskannya yield US Treasury, ruang gerak mata uang kawasan juga ditopang oleh meredanya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR) bulan ini. Data Fedwatch memperkirakan probabilitas The Fed menahan suku bunga di level 3,75-4% sebesar 85,1%.

Daftar Bauran Kebijakan BI: GWM Turun ke 7%- Perpanjang LTV

Rabu, 21 Oktober 2026 19:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125345/daftar-bauran-kebijakan-bi-gwm-turun-ke-7-perpanjang-ltv/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memaparkan arah bauran kebijakan moneter terbaru usai melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Oktober 2026, dengan memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuan BI atau BI Rate di level 5,75%.

Sejalan dengan upaya menahan suku bunga acuan (BI Rate), bank sentral juga turut memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial.

Yang menarik, BI melakukan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan untuk memperkuat likuiditas rupiah sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

"Penurunan GWM dimaksud melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)," kata Gubernur BI Destry Damayanti dalam paparannya, Rabu (21/10/2026).

Jelasnya, GWM rata-rata bank umum konvensional (BUK) diturunkan dari 9% menjadi 7%. Sementara itu, GWM rata-rata bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) dipangkas dari 7,5% menjadi 5,5%.

Penurunan tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk BUK, GWM diturunkan menjadi 8% mulai 1 November 2026 dan kembali menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Adapun GWM BUS dan UUS turun menjadi 6,5% pada 1 November 2026 dan menjadi 5,5% pada 1 Desember 2026.

Di saat yang sama, BI turut melanjutkan insentif untuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan

BI juga mempertahankan sejumlah instrumen makroprudensial, termasuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84%–94%, rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4%.

Selain itu, BI memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti hingga 31 Desember 2027.

Kebijakan tersebut memungkinkan pembiayaan hingga 100% dari nilai properti bagi bank yang memenuhi kriteria kredit bermasalah tertentu.

Di sisi lain, BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Namun, suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5%.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Menkeu Pastikan Pemerintah Lanjutkan Efisiensi & Penghematan APBN di Sisa Tahun 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 20:32 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-pastikan-pemerintah-lanjutkan-efisiensi-penghematan-apbn-di-sisa-tahun-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah terus melakukan efisiensi dan penghematan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sisa tahun 2026

Langkah ini dilakukan agar anggaran negara dapat difokuskan untuk membiayai kebutuhan belanja yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Suahasil usai rapat kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).

Suahasil mengatakan, efisiensi dan penghematan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengelola APBN agar belanja negara dapat digunakan untuk membiayai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

"APBN itu terus kita melakukan upaya-upaya efisiensi dan penghematan, supaya kita bisa membiayai item-item belanja negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Suahasil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).

Di sisi lain, Suahasil juga menanggapi pertanyaan mengenai kondisi pasar modal Indonesia, termasuk persoalan yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ia menegaskan, persoalan tersebut menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Kementerian Keuangan mendukung langkah pengawasan yang dilakukan OJK terhadap pasar modal Indonesia.

Menurut Suahasil, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan integritas pasar modal menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan domestik.

"Kami di Kementerian Keuangan mendukung pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Bahwa OJK melakukan pengawasan atas perdagangan dan juga integritas dari pasar modal, itu yang jadi sangat penting. Kita mendukung itu," katanya.

Suahasil menyebut, pemerintah mendukung upaya OJK dalam memastikan aktivitas perdagangan di pasar modal berjalan dengan pengawasan yang memadai serta menjaga integritas pasar modal Indonesia.

BI Tarik Inflow Usai Pernyataan MSCI Soal Pasar Saham RI, Insentif Hedging Diperbesar

Rabu, 21 Oktober 2026 16:14 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tarik-inflow-usai-pernyataan-msci-soal-pasar-saham-ri-insentif-hedging-diperbesar>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkuat strategi untuk menarik kembali aliran modal asing (inflow) ke pasar keuangan domestik menyusul pernyataan Morgan Stanley Capital International (MSCI) soal pasar saham Indonesia yang turut menjadi perhatian otoritas.

Untuk diketahui, baru-baru ini MSCI membuka konsultasi untuk mengevaluasi klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market menjadi salah satu isu yang membayangi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, BI terus melakukan asesmen terhadap dampak perkembangan MSCI terhadap pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan arus modal asing.

Destry mengakui, rupiah memang sempat mengalami tekanan selama dua hari setelah perkembangan tersebut. Namun, BI menilai tekanan yang terjadi masih relatif normal, terlebih kondisi pasar keuangan regional juga sedang menghadapi tekanan.

“Kami masih melihat bahwa tekanannya masih relatif dalam batas yang cukup normal. Karena pada saat yang bersamaan juga regional kondisinya lagi tidak terlalu baik,” ujar Destry dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

Meski demikian, BI tetap mewaspadai perkembangan di pasar modal domestik dan memantau arus modal keluar (outflow) yang terjadi setelah isu MSCI mencuat. Menurut Destry, kondisi tersebut mendorong BI untuk mengoptimalkan kebijakan yang lebih terarah guna menarik kembali aliran modal asing.

Destry menegaskan, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama BI. Di sisi lain, BI juga berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berlanjut.

Untuk menjaga stabilitas, BI menilai tekanan inflasi saat ini terutama bersumber dari kelompok pangan bergejolak (volatile food). Sementara itu, inflasi inti masih terkendali pada level 2,84%.

Ia juga menyebutkan, kenaikan suku bunga sebesar total 100 basis poin pada Mei dan Juni telah membantu menjaga ekspektasi inflasi tetap berada dalam sasaran BI. Penyesuaian suku bunga tersebut juga telah mendorong penilaian ulang harga sejumlah aset keuangan domestik atau repricing.

Dengan kondisi tersebut, BI kini berfokus memperbesar daya tarik aset keuangan domestik agar dapat kembali menarik minat investor asing.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan insentif bagi investor yang menempatkan dana pada instrumen keuangan Indonesia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta instrumen investasi dan pendanaan lainnya.

Destry menjelaskan, BI memberikan insentif berupa pengurangan biaya lindung nilai (hedging) melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) hingga 45%.

Menurut dia, kebijakan insentif yang mulai diterapkan sejak Juni hingga Oktober, baik melalui instrumen swap maupun DNDF, telah berhasil mendatangkan aliran modal masuk sebesar US\$ 9,9 miliar hingga saat ini.

BI berharap, kombinasi penyesuaian harga aset keuangan domestik dan peningkatan insentif lindung nilai dapat membuat imbal hasil aset Indonesia relatif lebih menarik dibandingkan aset dalam denominasi dolar AS.

"Ini yang kami lakukan untuk saat ini. Kami fokus dan targeted bagaimana kita mendatangkan inflow tersebut," katanya.

Selain insentif lindung nilai, BI juga mengoptimalkan kebijakan likuiditas melalui penurunan giro wajib minimum (GWM) hingga 2%. Kebijakan tersebut diperkirakan memberikan tambahan likuiditas sekitar Rp 190 triliun.

Lebih rinci, BI menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk Bank Umum Konvensional (BUK) diturunkan dari 9% menjadi 7%, dengan tahapan, turun sebesar 1% dari 9% menjadi 8% berlaku mulai 1 November 2026. Kemudian, turun sebesar 1% dari 8% menjadi 7% berlaku mulai 1 Desember 2026.

Destry menambahkan, seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki BI akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Stabilitas itu tentunya yang utama. Kemudian yang kedua kita lihat juga di sini ada momentum pertumbuhan sehingga ini juga tentu harus bisa kita dorong juga," tandasnya.

BI Perkuat Insentif Lindung Nilai, Modal Asing Masuk US\$ 9,9 Miliar

Rabu, 21 Oktober 2026 16:04 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-perkuat-insentif-lindung-nilai-modal-asing-masuk-us-99-miliar>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkuat insentif instrumen lindung nilai untuk menarik aliran masuk modal asing di tengah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat gejolak global. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter, termasuk meningkatkan insentif bagi investor asing agar aliran modal masuk ke pasar keuangan domestik tetap terjaga.

"Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan ini berhasil menarik aliran masuk modal asing sebesar US\$ 9,9 miliar per 20 Oktober 2026," ujar Destry dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

BI mencatat, nilai tukar Rupiah pada 20 Oktober 2026 berada di level Rp 17.985 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,61% dibandingkan posisi akhir September 2026. Pelemahan tersebut terjadi setelah Rupiah sempat menguat hingga pertengahan September 2026.

Destry menjelaskan, perkembangan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS yang pengetat, serta sentimen investor asing di pasar saham.

Untuk menjaga stabilitas Rupiah sekaligus meningkatkan aliran modal asing, BI memperkuat insentif instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada BI. Insentif juga diberikan untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra.

Dalam kebijakan terbaru yang diputuskan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 20-21 Oktober 2026, BI meningkatkan pengurangan premi DNDF Lindung Nilai untuk transaksi yang mendasari pendanaan luar negeri, termasuk investasi portofolio asing, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung asing.

Untuk tenor enam bulan, pengurangan premi DNDF ditingkatkan dari 25% menjadi 40%. Sementara itu, untuk tenor 12 bulan, pengurangan premi naik dari 30% menjadi 45%.

BI juga melanjutkan insentif Swap Beli Lindung Nilai Konvensional dengan pengurangan premi sebesar 15% untuk tenor tiga bulan, 20% untuk tenor enam bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.

Selain itu, insentif transaksi LCT dengan negara mitra dipertahankan untuk mendorong diversifikasi transaksi valuta asing dalam perdagangan dan investasi internasional. Melalui berbagai insentif tersebut, BI berupaya menjaga imbal hasil aset Rupiah tetap menarik bagi investor.

Ke depan, BI memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil dengan ditopang komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, serta prospek perekonomian domestik yang tetap baik.

BI Prediksi Transaksi Berjalan 2026 Defisit hingga 2,4% dari PDB Akhir 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 15:09 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-prediksi-transaksi-berjalan-2026-defisit-hingga-24-dari-pdb-akhir-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkirakan transaksi berjalan Indonesia pada 2026 mencatat defisit dalam kisaran 1,6%-2,4% dari produk domestik bruto (PDB).

Proyeksi ini sejalan dengan upaya bank sentral menjaga ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga, ditopang oleh kinerja perdagangan yang positif dan posisi cadangan devisa yang memadai.

Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 mencatat surplus sebesar US\$ 3,55 miliar, meningkat dibandingkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar US\$ 120 juta.

Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 mencatat arus keluar bersih atau net outflows sebesar US\$ 80 juta. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh arus keluar dari pasar saham seiring tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Terutama disebabkan outflows pada saham sejalan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” tutur Destry dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

Tekanan arus keluar investasi portofolio asing dari pasar saham berlanjut pada Oktober 2026. Namun, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk.

Dengan perkembangan tersebut, investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 hingga 19 Oktober 2026 mencatat arus masuk bersih atau net inflows sebesar US\$ 660 juta.

Dari sisi cadangan devisa, posisi Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar US\$ 146,3 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional, yakni sekitar tiga bulan impor.

Ke depan, BI memperkirakan ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat dengan transaksi berjalan pada 2026 diperkirakan mengalami defisit dalam kisaran 1,6%-2,4% dari PDB.

Realisasi Investasi di Kawasan KEK Capai Rp 382 Triliun, Serap 302.000 Tenaga Kerja

Rabu, 21 Oktober 2026 11:58 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-di-kawasan-kek-capai-rp-382-triliun-serap-302000-tenaga-kerja>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia mencapai Rp 382,1 triliun secara kumulatif sejak kawasan tersebut dibentuk. Investasi itu juga telah menyerap sekitar 302.000 tenaga kerja hingga saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, KEK menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Secara kumulatif sejak dibentuk KEK, realisasi investasi senilai Rp 382,1 triliun dan serapan tenaga kerja sebesar 302.000,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Pengembangan KEK Triwulan III 2026, di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (21/10/2026).

Adapun sepanjang Januari-September 2026, investasi yang terealisasi di kawasan KEK mencapai Rp 46 triliun. Realisasi tersebut turut menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.000 orang.

Airlangga menyebut, saat ini Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah. Sebanyak tujuh kawasan berada di Pulau Jawa, sedangkan 18 kawasan lainnya berada di luar Jawa.

Berdasarkan bidang usaha, KEK tersebut terdiri dari 13 kawasan industri, enam kawasan pariwisata, dua kawasan kesehatan, satu kawasan digital, dua kawasan teknologi, serta satu kawasan untuk jasa lainnya. Jumlah badan usaha yang beroperasi di seluruh KEK tercatat sebanyak 509 badan usaha.

Menurut Airlangga, pengembangan KEK masih perlu dipercepat agar dapat memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian. Ia membandingkan luas kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang sekitar 24.000 hektare dengan sejumlah negara lain, seperti Vietnam dan Malaysia, yang memiliki kawasan ekonomi khusus dengan luas mencapai 1,8 juta hektare hingga 2 juta hektare.

"Nah padahal kalau kita lihat size dari negara kita jauh lebih besar. Dan tentunya ini yang menjadi kita untuk kawasan ekonomi khusus," lanjut Airlangga.

Pemerintah pun mendorong pengembangan KEK di sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pariwisata, industri, hingga digital dan teknologi. Pada sektor kesehatan, misalnya, pemerintah berupaya menarik masyarakat Indonesia yang selama ini memilih berobat ke luar negeri.

Airlangga memperkirakan sekitar dua juta warga Indonesia berobat ke luar negeri, termasuk ke Singapura dan Penang, dengan nilai pengeluaran yang mencapai sekitar Rp 200 triliun. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah mendorong pengembangan KEK kesehatan di Sanur, Bali, dan Batam.

Sementara itu, pada sektor pariwisata, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 16 juta hingga 17,6 juta orang pada 2026, dengan potensi devisa sekitar US\$ 24 miliar. KEK pariwisata diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi di daerah.

Di sektor industri, Airlangga menyoroti potensi investasi dan penyerapan tenaga kerja di sejumlah kawasan. Ia menyebut KEK Kendal memiliki potensi investasi Rp 370 triliun dengan potensi penyerapan 250.000 tenaga kerja. Sementara itu, KEK Gresik memiliki potensi investasi Rp 264 triliun dengan potensi penyerapan 200.000 tenaga kerja.

Airlangga mengatakan, dukungan perizinan dan perluasan kawasan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan kawasan industri lainnya agar dapat menarik tambahan investasi.

Sementara itu, pada sektor digital dan teknologi, pengembangan KEK Nongsa di Batam diharapkan dapat menopang pembangunan pusat data atau data center. Airlangga juga menyoroti potensi industri kreatif di KEK Singhasari dan Nongsa, termasuk produksi film dan animasi yang melibatkan lebih dari 1.000 animator di Nongsa.

Untuk memenuhi kebutuhan industri, pemerintah mendorong program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing kawasan. Dengan begitu, pengembangan KEK diharapkan tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Dari tenaga kerja kami harapkan negara ini terus mendorong program yang khusus sehingga bisa mengisi pelatihan vokasi sesuai kebutuhan kawasan," tegas Airlangga.

Belanja Negara Rp 1.300 Triliun di Kuartal IV-2026, Defisit APBN Mengintai

Rabu, 21 Oktober 2026 08:32 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-negara-rp-1300-triliun-di-kuartal-iv-2026-defisit-apbn-mengintai>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menggenjot belanja negara hingga Rp 1.300 triliun pada kuartal IV-2026 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun.

Namun, percepatan belanja tersebut berisiko memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai belum tentu signifikan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja negara pada kuartal IV-2026 akan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.

"Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure di perekonomian kita," kata Suahasil, Senin (19/10/2026).

Konsumsi pemerintah memang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan pada kuartal I-2026, tertinggi setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pada kuartal II-2026, pertumbuhannya masih mencapai 15,97% secara tahunan.

Meski tumbuh tinggi, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih di bawah 10%. Karena itu, peningkatan belanja negara belum tentu langsung mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, besarnya anggaran yang dibelanjakan tidak otomatis membuat pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat.

Pemerintah perlu mengarahkan belanja ke sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi lebih besar. "Agar berdampak ke ekonomi, perlu ada penajaman ke sektor-sektor yang berdampak besar," ujar David, Selasa (20/10/2026).

David memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2026 akan bertahan di kisaran 5%. Dengan demikian, peningkatan belanja pemerintah belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 6%.

Di sisi lain, rencana belanja Rp 1.300 triliun pada kuartal IV-2026 perlu mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah. Dari total pagu belanja negara 2026 sebesar Rp 3.842 triliun, sekitar 70% telah terserap.

Artinya, tersisa sekitar Rp 1.180 triliun, lebih rendah Rp 120 triliun dibandingkan target belanja pada kuartal terakhir.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengingatkan, pemerintah perlu menghitung kembali kemampuan fiskal sebelum merealisasikan target belanja tersebut.

Pasalnya, peningkatan belanja yang tidak diimbangi kapasitas penerimaan dapat menekan keseimbangan APBN. "Kalau dipaksakan sampai Rp 1.300 triliun, tentu suka tidak suka defisit akan naik," kata Juniman.

Menurut dia, apabila defisit APBN melampaui 3% terhadap PDB, kredibilitas fiskal Indonesia berisiko terganggu. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, percepatan belanja pada akhir tahun perlu memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran.

Pengeluaran yang dikejar dalam waktu singkat berisiko membuat pelaksanaan program kurang optimal.

Risiko lainnya muncul karena peningkatan belanja dilakukan ketika pasar saham, pasar surat utang, dan nilai tukar rupiah sedang berada dalam tekanan.

Jika defisit mendekati 3% terhadap PDB tanpa penjelasan terbuka mengenai sumber pendanaan tambahan, investor berpotensi menilainya sebagai pelemahan disiplin fiskal.

Persepsi tersebut dapat meningkatkan premi risiko dan menambah tekanan terhadap rupiah.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi risiko kenaikan biaya utang apabila perlu menerbitkan surat utang negara (SBN) tambahan ketika imbal hasil atau yield SBN sedang meningkat.

Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar mempercepat penyerapan anggaran, melainkan memastikan belanja memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan kualitas anggaran dan kredibilitas fiskal.

Investasi Jateng Capai Rp72,54 Triliun, Serap 340.334 Tenaga Kerja

Kamis, 21 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/investasi-jateng-capai-rp7254-triliun-serap-340-334-tenaga-kerja/>

SEMARANG – Kinerja investasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa positif. Hingga triwulan III 2026, telah membukukan realisasi investasi sebesar Rp72,54 triliun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang dengan capaian 82.420 proyek.

Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka acara Semarang Business Forum (Sembiz) ke-19 Tahun 2026, di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang, Rabu (21/10/2026).

Ditambahkan, capaian Rp72,54 triliun tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp31,77 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp40,77 triliun.

Lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Temanggung Rp5,05 triliun, dan Demak Rp4,29 triliun.

Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Dibutuhkan investasi swasta serta kerja sama antardaerah untuk memperluas kegiatan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan.

“Business forum ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama tourism (pariwisata), yang kedua trade (perdagangan), dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan,” kata Luthfi.

Karenanya, gubernur mendorong Kota Semarang menjadi pusat penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Melalui kolaborasi dengan daerah sekitarnya, potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi, diharapkan dapat dikembangkan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.

Dia menilai Kota Semarang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi yang dapat menghubungkan potensi daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga.

Melalui pembagian peran dan kerja sama tersebut, masing-masing daerah diharapkan dapat mengembangkan keunggulannya, sekaligus saling mendukung dalam menarik investasi.

Luthfi mengatakan, Jawa Tengah memiliki daya tarik investasi di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal. Selain iklim usaha yang kondusif, provinsi ini didukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang kompetitif, terutama untuk industri padat karya.

“Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita,” ungkapnya.

Gubernur berharap penyelenggaraan forum bisnis seperti Sembiz dapat menjadi pemicu bagi kabupaten/ kota lain, untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah masing-masing.

“Jadi business forum ini untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan dalam pengembangan investasi. Sebab, Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan kawasan industri berskala besar.

Karena itu, Kota Semarang lebih diarahkan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, dengan tetap mengandalkan dukungan daerah penyangga yang memiliki potensi industri maupun sumber daya lainnya.

“Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama, mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan,” ujarnya.

Agustina menambahkan, Sembiz yang telah diselenggarakan sebanyak 19 kali, menjadi sarana mempertemukan investor dengan berbagai peluang usaha. Pemerintah Kota Semarang juga terus mengevaluasi hasil penyelenggaraan sebelumnya, agar kerja sama yang terbangun dapat ditindaklanjuti.

Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo, dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya. Pengembangan tersebut diharapkan turut melibatkan pelaku UMKM, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Agustina, pemerintah berkewajiban memastikan investasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara bersama-sama. (Humas Jateng)*ul

Pemprov Jateng gelar 1.724 Gerakan Pangan Murah

Rabu, 21 Oktober 2026 21:48 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/649753/pemprov-jateng-gelar-1724-gerakan-pangan-murah>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 kabupaten/kota telah menggelar 1.724 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang 2026, untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Kabupaten Semarang, Rabu, mengatakan bahwa ketersediaan pangan yang melimpah harus diimbangi dengan keterjangkauan harga.

Karena itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan intervensi agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha petani dan peternak.

Hal itu disampaikannya saat membuka GPM serentak memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di Lapangan Tlogo Resort, Kabupaten Semarang.

"Ketersediaan stok saja tidak cukup, tanpa adanya keterjangkauan dari masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan GPM memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah sehingga pemerintah daerah perlu melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan lokasi dan komoditas yang paling dibutuhkan, sehingga intervensi harga tidak salah sasaran.

Dengan pendekatan tersebut, kata dia, komoditas yang dijual dalam GPM dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan dan kebutuhan masing-masing daerah, dan wilayah yang kekurangan komoditas tertentu menjadi prioritas intervensi.

Ia mengatakan, strategi tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta dinas terkait.

Selain menjaga keterjangkauan harga, GPM juga diharapkan membantu pengendalian inflasi di Jateng.

"Ketersediaan bahan pokok penting bagi masyarakat, begitu juga dengan keterjangkauan harga. Sehingga Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang inflasinya bisa terkendali," katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Widi Hartanto melaporkan sebanyak 1.724 kali GPM telah digelar di 35 kabupaten/kota sepanjang 2026, dengan total omzet Rp31.032.488.764.

Kegiatan tersebut melibatkan Bulog, BUMN, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, dan mitra swasta.

Khusus GPM di Kabupaten Semarang, disediakan 7,5 ton beras dengan harga mulai Rp57.000 per lima kilogram dan 2.000 liter minyak goreng seharga Rp15.500 per liter

Tersedia pula telur, daging ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, serta aneka buah dan sayuran.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng Mohamad Noor Nugroho menyebutkan inflasi Jateng berada di angka 3,18 persen, atau lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 3,28 persen.

Meski relatif terkendali, kata dia, stabilitas harga pangan masih menghadapi tantangan El Nino, serangan hama tikus, biaya distribusi, serta peningkatan permintaan pada waktu tertentu.

"Gerakan Pangan Murah seperti yang kita laksanakan hari ini, apalagi serentak, harapannya bisa mengendalikan inflasi secara keseluruhan di Jawa Tengah," katanya.

Pemkab Blora diproyeksikan menerima Rp71,4 miliar dari DBH Migas pada 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 12:54 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/649645/pemkab-blora-diproyeksikan-menerima-rp714-miliar-dari-dbh-migas-pada-2027>

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memproyeksikan penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) sebesar Rp71,4 miliar pada 2027 atau meningkat sebesar Rp8 miliar dibandingkan alokasi pada 2026 sebesar Rp63,4 miliar.

"Meskipun mengalami kenaikan, proyeksi penerimaan DBH Migas tersebut masih jauh di bawah target pada 2025 yang mencapai Rp130,06 miliar," kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Ahmad Nafik Udin di Blora, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan data alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027, total DBH yang dialokasikan untuk Kabupaten Blora mencapai Rp104,23 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas DBH sumber daya alam sebesar Rp76,92 miliar dan DBH pajak sebesar Rp27,31 miliar.

Dari alokasi DBH sumber daya alam tersebut, sektor migas menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp71,4 miliar. Selain itu, terdapat alokasi DBH kurang bayar sebesar Rp4,6 miliar.

proyeksi penerimaan DBH Migas tersebut masih jauh di bawah target pada 2025 yang mencapai Rp130,06 miliar.

“Alokasi DBH migas pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp71,4 miliar, naik dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp63,4 miliar. Namun, nilainya masih di bawah target penerimaan pada 2025,” katanya.

Berdasarkan data alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027, total DBH yang dialokasikan untuk Kabupaten Blora mencapai Rp104,23 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp76,92 miliar dan DBH Pajak sebesar Rp27,31 miliar.

Dari alokasi DBH Sumber Daya Alam tersebut, sektor migas menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp71,4 miliar. Selain itu, terdapat alokasi DBH Kurang Bayar sebesar Rp4,6 miliar.

Sementara itu, alokasi DBH Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp21,85 miliar serta DBH Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp5,47 miliar.

Nafik mengatakan alokasi transfer tersebut menjadi salah satu komponen pendapatan yang diperhitungkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora 2027.

"Ini menjadi bagian dari pendapatan daerah yang akan kami sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anggaran tahun 2027," ujarnya.

Utang Zona Euro Membengkak, Prancis dan Italia Tertekan

Kamis, 22 Oktober 2026 19:50 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/utang-zona-euro-membengkak-prancis-dan-italia-tertekan>

KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Beban utang negara-negara Eropa kian menggunung. Sejumlah negara ekonomi utama, seperti Italia dan Prancis, menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat di tengah kenaikan biaya pinjaman pemerintah.

Kantor statistik Uni Eropa atau Eurostat, melaporkan rasio utang pemerintah di 21 negara zona euro mencapai 88,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2026, naik dari 87,3% setahun sebelumnya. Secara nominal, total utangnya mencapai € 14,4 triliun.

Di seluruh kawasan Uni Eropa, rasio utang pemerintah meningkat menjadi 82,9% terhadap PDB, dari 81,4% setahun sebelumnya. Angka tersebut jauh melampaui batas utang Uni Eropa sebesar 60% terhadap PDB.

Yunani masih mencatat rasio utang tertinggi di Uni Eropa, yakni 140,8% terhadap PDB. Namun, Italia semakin mendekati posisi tersebut dengan rasio utang 139,9%. Dalam setahun terakhir, Yunani berhasil memangkas rasio utangnya sebesar 11,2 poin persentase, sementara Italia justru mencatat kenaikan.

Prancis menyusul di posisi ketiga dengan rasio utang mencapai 119,1% terhadap PDB, melonjak 3,7 poin persentase dalam setahun. Belgia dan Spanyol juga menanggung utang di atas 100% terhadap PDB, masing-masing sebesar 110,2% dan 101,4%.

Tekanan fiskal Prancis semakin berat setelah imbal hasil (yield) obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menembus 5% untuk pertama kalinya sejak 2002. Kenaikan ini mencerminkan tuntutan imbal hasil lebih tinggi dari investor sekaligus meningkatkan risiko pembengkakan biaya pinjaman pemerintah.

Di sisi lain, defisit anggaran Prancis mencapai 5,1% terhadap PDB pada 2025. Pemerintah menargetkan penurunan defisit menjadi 5% pada 2027, tetapi Perdana Menteri Sébastien Lecornu menghadapi hambatan politik karena belum mengantongi dukungan mayoritas parlemen untuk memangkas belanja.

Risiko Prancis juga bertambah menjelang peninjauan peringkat kredit oleh Moody's pada Jumat (23/10/2026). Sejumlah ekonom memperkirakan lembaga tersebut akan memangkas peringkat kredit Prancis, yang berpotensi mendorong biaya pinjaman semakin tinggi.

Sementara itu, Jerman mencatat kenaikan rasio utang menjadi 62,8% terhadap PDB, dari 61,4%. Defisit anggaran zona euro juga melebar menjadi 3,3% terhadap PDB pada kuartal II-2026. Kondisi ini memperlihatkan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah Eropa untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan beban utang.

Prada Catat Pertumbuhan Pendapatan 1% pada Kuartal III 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 18:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/prada-catat-pertumbuhan-pendapatan-1-pada-kuartal-iii-2026>

KONTAN.CO.ID – MILAN. Grup barang mewah asal Italia, Prada, mencatat pertumbuhan pendapatan organik sebesar 1% pada kuartal III 2026. Kinerja ini sesuai dengan ekspektasi pasar dan menunjukkan ketahanan perusahaan di tengah pelemahan industri barang mewah global, meskipun merek andalannya yang lebih kecil, Miu Miu, mengalami perlambatan penjualan.

Pada 2025, Miu Miu menjadi kontributor utama pertumbuhan bisnis grup Prada. Namun, pada kuartal III 2026, penjualan ritel merek tersebut justru turun 3%.

Prada menyatakan, kinerja organik tersebut belum memperhitungkan kontribusi Versace, merek yang diakuisisi perusahaan pada Desember 2025. Proses integrasi Versace disebut berjalan sesuai rencana, menjelang peluncuran koleksi pertama di bawah arahan direktur kreatif baru, Pieter Mulier, pada 2027.

Jika pendapatan Versace turut diperhitungkan, total pendapatan Prada mencapai 1,49 miliar euro atau sekitar US\$ 1,67 miliar pada kuartal III 2026. Angka tersebut sesuai dengan konsensus analis yang dihimpun Visible Alpha.

Dari sisi wilayah, kinerja pendapatan Prada masih ditopang oleh pertumbuhan di Amerika. Namun, laju pertumbuhan di kawasan tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sementara itu, penjualan di kawasan Asia Pasifik cenderung stabil. Prada menjelaskan, kondisi lalu lintas pengunjung yang masih lesu di China daratan diimbangi oleh tren positif yang berlanjut di sejumlah pasar lain di kawasan tersebut.

Adapun pendapatan Prada di Eropa masih menunjukkan kinerja yang lemah.

CEO Prada Andrea Guerra mengatakan, perusahaan menghadapi kondisi industri yang cukup menantang selama kuartal III 2026. Meski demikian, daya tarik merek dan pelaksanaan strategi ritel dinilai membantu perusahaan mempertahankan kinerjanya.

"Kuartal ketiga berlangsung di tengah kondisi industri yang sangat menantang. Dalam situasi ini, Grup menunjukkan ketahanan yang baik, didukung oleh daya tarik merek dan pelaksanaan strategi ritel yang kuat," kata Guerra dalam sebuah pernyataan.

Pound Menguat, Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Bank of England Jadi Penopang

Kamis, 22 Oktober 2026 17:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/pound-menguat-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-bank-of-england-jadi-penopang>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pound sterling menguat pada perdagangan Kamis (22/10/2026), didukung oleh pergeseran arus investasi dari aset zona euro ke pasar Inggris. Kondisi ini membuat saham, obligasi, dan mata uang Inggris menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah pasar lain di kawasan Eropa.

Penguatan pound juga ditopang oleh ekspektasi bahwa Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunga pada bulan depan. Prospek tersebut menguat setelah data inflasi Inggris yang dirilis pekan ini tercatat lebih tinggi dari perkiraan.

Pound sterling naik 0,1% ke level US\$ 1,34. Kinerja tersebut menjadikan pound sebagai salah satu mata uang dengan penguatan relatif baik, selain yen Jepang dan franc Swiss yang dikenal sebagai aset lindung nilai (safe haven).

Pelaku pasar memperkirakan BoE akan menaikkan suku bunga setidaknya tiga kali masing-masing sebesar 25 basis poin hingga April 2027. Kenaikan pertama telah diperhitungkan dalam ekspektasi pasar menjelang rapat kebijakan moneter pada 5 November 2026.

Sebagai perbandingan, pasar memperkirakan Bank Sentral Eropa (ECB) hanya akan menaikkan suku bunga sekitar dua kali dalam periode yang sama. Perbedaan prospek suku bunga tersebut memperlebar selisih imbal hasil antara Inggris dan zona euro, sehingga meningkatkan daya tarik pound dalam strategi perdagangan carry trade.

Strategi carry trade merupakan transaksi yang dilakukan dengan meminjam mata uang dengan suku bunga rendah, seperti euro, untuk kemudian menjualnya dan mendanai investasi dalam mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi, seperti pound sterling.

Aset Eropa Tertekan, Pound Relatif Diuntungkan

Di sisi lain, kekhawatiran investor terhadap tingginya harga minyak, besarnya biaya pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI), serta kemampuan pemerintah negara maju mengurangi beban utang yang besar telah menekan aset berisiko.

Tekanan tersebut terutama terlihat di Eropa. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis naik ke level tertinggi dalam 24 tahun, sementara saham-saham zona euro mengalami penurunan tajam.

Imbal hasil obligasi pemerintah Inggris atau gilts relatif tidak berubah pada perdagangan Kamis. Kondisi ini berbeda dengan kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah Prancis, Italia, dan Belgia.

Indeks saham FTSE 100 Inggris turun 0,6%. Meski demikian, penurunannya lebih terbatas dibandingkan indeks STOXX 600 yang melemah 1%.

Dalam sebulan terakhir, pound menjadi mata uang utama dengan kinerja terbaik terhadap dolar Amerika Serikat (AS), dengan kenaikan 0,3%. Sebaliknya, euro menjadi mata uang dengan kinerja terburuk terhadap dolar AS, setelah melemah 2% dalam periode yang sama.

Euro juga berada di jalur penurunan selama empat pekan berturut-turut terhadap pound sterling. Sepanjang pekan ini, euro telah melemah 0,5% terhadap pound, sehingga penurunannya sejak awal tahun mencapai 1,8%.

Jika tren tersebut bertahan hingga akhir bulan, euro berpotensi mencatat penurunan bulanan terbesar terhadap pound sejak Mei 2023. Kala itu, euro melemah 2% terhadap mata uang Inggris tersebut.

Prospek Suku Bunga Menopang Pound Sterling

Ahli strategi ING, Chris Turner, menilai penguatan pound dan pelemahan euro sama-sama berperan dalam pergerakan pasangan mata uang euro terhadap pound.

“Sepertinya ada penguatan pound sterling yang berdiri sendiri sekaligus pelemahan euro yang berdiri sendiri dalam pergerakan euro terhadap pound. Pada awal musim panas ini, kami menilai kenaikan pound tidak akan bertahan lama. Namun, meningkatnya kepercayaan pasar terhadap siklus pengetatan kebijakan Bank of England—kami memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Februari dan November—membuat pound menjadi mata uang Eropa dengan imbal hasil carry yang tinggi,” kata Turner.

Pengetatan kebijakan moneter mengacu pada langkah bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik mata uang suatu negara apabila imbal hasil aset domestiknya menjadi lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

Selain perbedaan prospek suku bunga, kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah Prancis mengatasi persoalan keuangan negara turut membebani euro. Kondisi tersebut mendorong pelaku pasar memperkirakan euro masih berpotensi melemah terhadap pound.

Data LSEG menunjukkan pasar opsi mencatat sentimen paling negatif terhadap prospek euro dibandingkan pound sejak pertengahan 2024.

Sementara itu, Menteri Keuangan Inggris John Healey dijadwalkan menyampaikan anggaran pertamanya pada 28 Oktober 2026. Investor besar memperkirakan pengumuman anggaran tersebut tidak akan memicu gejolak pasar yang berarti.

Bank Sentral Korea Selatan Tahan Bunga 3%, Kenaikan Lanjutan Masih Terbuka

Kamis, 22 Oktober 2026 08:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-korea-selatan-tahan-bunga-3-kenaikan-lanjutan-masih-terbuka>

KONTAN.CO.ID - Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea/BoK) mempertahankan suku bunga acuan pada Kamis (22/10/2026), setelah menaikkan suku bunga dua kali berturut-turut pada Juli dan Agustus.

Meski mengambil jeda, peluang pengetatan kebijakan moneter lanjutan masih terbuka di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang berada di atas target.

Mengutip Reuters, dewan kebijakan moneter BoK yang beranggotakan tujuh orang memutuskan mempertahankan suku bunga seven-day repurchase rate di level 3,00%. Keputusan tersebut sesuai dengan perkiraan seluruh 34 ekonom yang disurvei Reuters.

Pada Juli dan Agustus lalu, BoK masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Kenaikan beruntun tersebut menjadi yang pertama dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Gubernur BoK Shin Hyun Song sebelumnya menyatakan bahwa bank sentral cenderung memilih pengetatan kebijakan secara bertahap.

Namun, dalam acara Dana Moneter Internasional (IMF) pada 13 Oktober, Shin menegaskan bahwa kebijakan moneter akan tetap ketat hingga inflasi kembali mendekati target.

Analisis NH Investment & Securities Kang Seung-won menilai, keputusan mempertahankan suku bunga kali ini mencerminkan kebutuhan BoK untuk mengevaluasi dampak kenaikan sebelumnya sekaligus mencermati volatilitas pasar keuangan, terutama di pasar saham.

Menurut dia, jeda setelah dua kali kenaikan suku bunga beruntun dapat memperlambat laju pengetatan kebijakan moneter dan mengurangi kecenderungan bank sentral mengambil sikap yang lebih agresif.

Dari sisi inflasi, tekanan harga di Korea Selatan mulai mereda. Inflasi konsumen utama tercatat sebesar 2,9% secara tahunan pada September 2026, turun dari 3,1% pada Agustus. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas target inflasi BoK sebesar 2%.

Sementara itu, aktivitas ekspor Korea Selatan terus menguat seiring meningkatnya belanja global untuk teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Nilai pengiriman ekspor sepanjang Januari hingga September bahkan untuk pertama kalinya melampaui US\$ 800 miliar.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap solid dan inflasi yang masih di atas target menjadi alasan bagi BoK untuk tetap membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan.

Berdasarkan median perkiraan dalam survei Reuters, para ekonom memperkirakan BoK akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,25% pada pertemuan November.

Proyeksi tersebut sejalan dengan perkiraan suku bunga yang tercermin dalam dot plot BoK.

Shin dijadwalkan menggelar konferensi pers pada pukul 02.10 GMT untuk menjelaskan lebih lanjut keputusan kebijakan moneter tersebut.

Klaim Pengangguran AS Turun Dekati Level Terendah dalam 57 Tahun

Kamis, 22 Oktober 2026 19:57 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/klaim-pengangguran-as-turun-dekati-level-terendah-dalam-57-tahun>

KONTAN.CO.ID – WASHINGTON. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jumlah warga AS yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran turun ke level terendah dalam hampir 57 tahun pada pekan lalu, menandakan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih rendah.

Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis (22/10/2026) melaporkan, klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian turun 6.000 menjadi 194.000 klaim secara musiman pada pekan yang berakhir 17 Oktober 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan ekonom yang disurvei Reuters, yakni sebanyak 200.000 klaim.

Jumlah klaim tersebut mendekati level 189.000 yang tercatat pada pertengahan Juli lalu. Angka itu merupakan level terendah sejak 1969.

Para ekonom menilai, peningkatan keuntungan perusahaan di tengah kuatnya permintaan domestik membantu melindungi pekerja dari risiko PHK. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pengetatan kondisi keuangan dan kenaikan suku bunga akibat tekanan inflasi yang dipicu perang AS-Israel dengan Iran dapat melemahkan pasar tenaga kerja pada tahun depan.

Data klaim pengangguran tersebut mencakup periode ketika pemerintah melakukan survei terhadap perusahaan untuk menghitung komponen penggajian nonpertanian atau nonfarm payrolls dalam laporan ketenagakerjaan Oktober.

Pada September 2026, jumlah tenaga kerja nonpertanian AS bertambah 29.000 pekerjaan, setelah meningkat 133.000 pekerjaan pada Agustus. Pertumbuhan lapangan kerja cenderung lebih lemah ketika Hari Buruh AS (Labor Day) jatuh relatif lebih akhir dalam bulan tersebut, seperti yang terjadi pada September.

Meski demikian, para ekonom masih menilai pasar tenaga kerja AS berada dalam kondisi low-hire, low-fire, yakni perusahaan cenderung membatasi perekrutan sekaligus tidak banyak melakukan PHK.

Ketidakpastian akibat perang dan kebijakan tarif impor turut menghambat perekrutan tenaga kerja.

Klaim Berkelanjutan Pengangguran AS Meningkat

Laporan Departemen Tenaga Kerja AS juga menunjukkan peningkatan jumlah orang yang masih menerima tunjangan pengangguran setelah pekan pertama bantuan. Indikator yang dikenal sebagai klaim berkelanjutan (continuing claims) ini kerap digunakan untuk melihat kondisi perekrutan tenaga kerja.

Pada pekan yang berakhir 10 Oktober 2026, klaim berkelanjutan meningkat 25.000 menjadi 1,728 juta secara musiman.

Namun, indikator tersebut tidak mencakup lulusan perguruan tinggi baru dan kelompok lain yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan pengangguran karena memiliki sedikit atau tidak memiliki riwayat pekerjaan.

Selain itu, sebagian penganggur jangka panjang kemungkinan telah menghabiskan masa kelayakan menerima tunjangan. Di sebagian besar negara bagian AS, bantuan pengangguran dibatasi hingga 26 minggu. Kondisi tersebut turut menahan jumlah klaim berkelanjutan pada level yang relatif rendah.

Durasi median pengangguran pada September mencapai 11,5 minggu, mendekati level tertinggi dalam empat setengah tahun. Meski demikian, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,2% pada bulan tersebut, pasar tenaga kerja dinilai belum menjadi sumber tekanan inflasi.

Prospek Kebijakan Suku Bunga The Fed

Kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil mengurangi kebutuhan Federal Reserve (The Fed) untuk memperketat kebijakan moneter secara agresif dalam menghadapi dampak inflasi akibat konflik di Timur Tengah.

Pada September 2026, bank sentral AS telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 3,75%–4,00%.

Para ekonom memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan pekan depan. Namun, kenaikan biaya pinjaman kembali diperkirakan terjadi pada Desember.

Perkembangan pasar tenaga kerja dan tekanan inflasi akan menjadi faktor penting bagi arah kebijakan moneter AS selanjutnya. Klaim pengangguran yang rendah menunjukkan PHK masih terkendali, tetapi peningkatan durasi pengangguran dan lemahnya perekrutan mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja belum sepenuhnya terbebas dari tekanan.

Kombinasi antara risiko inflasi, ketidakpastian geopolitik, tarif impor, dan kebijakan suku bunga akan menentukan seberapa kuat pasar tenaga kerja AS mampu bertahan dalam beberapa bulan mendatang.

IMF Ramal Ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara Kontraksi 1,3% pada 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 13:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-ramal-ekonomi-timur-tengah-dan-afrika-utara-kontraksi-13-pada-2026>

KONTAN.CO.ID – DUBAI. Perang yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran diperkirakan menekan perekonomian Timur Tengah, Afrika Utara, dan Pakistan sepanjang 2026.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi kawasan tersebut mengalami kontraksi 1,3% tahun ini, sebelum kembali tumbuh 6,6% pada 2027.

Dalam laporan prospek ekonomi regional yang dirilis di Dubai pada Kamis (22/10/2026), IMF memperingatkan bahwa gangguan lebih lanjut terhadap produksi energi dan jalur perdagangan dapat memperburuk prospek ekonomi kawasan.

IMF menyebut dampak perang telah menekan berbagai sektor ekonomi, mulai dari produksi energi, pelayaran, pariwisata, perdagangan, hingga kepercayaan pelaku ekonomi. Meskipun diperkirakan pulih pada 2027, aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut secara umum masih akan berada di bawah proyeksi sebelum perang.

Dampak konflik juga tidak merata di seluruh kawasan. Menurut IMF, negara-negara pengeksport minyak menghadapi tekanan lebih besar akibat gangguan produksi energi dan pengiriman. Sementara itu, negara-negara pengimpor minyak menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik.

Dalam skenario dasar yang digunakan, IMF mengasumsikan konflik akan mereda pada awal 2027 dan aktivitas perdagangan berangsur kembali normal sepanjang tahun tersebut. Namun, lembaga tersebut menegaskan prospek ekonomi masih dibayangi ketidakpastian yang sangat tinggi.

"Risiko utama berasal dari gangguan lebih lanjut terhadap produksi energi dan jalur perdagangan yang dapat mendorong harga energi lebih tinggi," kata IMF dalam pernyataan yang merangkum pesan utama laporan tersebut.

IMF juga memperingatkan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan eksternal. Risiko ini dapat meningkat apabila investor mengevaluasi ulang potensi peningkatan produktivitas yang didorong oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sementara suku bunga naik lebih lanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi dan kondisi fiskal.

Di sisi lain, negara-negara pengimpor minyak dinilai lebih mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Permintaan domestik di negara-negara tersebut masih mendapat dukungan dari aliran remitansi dan pariwisata, kondisi keuangan yang menguntungkan, serta respons kebijakan yang cepat untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga komoditas.

Di luar kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Pakistan, IMF juga menyoroti perkembangan ekonomi Kaukasus dan Asia Tengah. Pertumbuhan di kawasan tersebut diperkirakan mulai melambat menuju tingkat yang lebih berkelanjutan.

IMF memproyeksikan ekonomi Kaukasus dan Asia Tengah tumbuh 5,2% pada 2026, kemudian melambat menjadi 5% pada 2027.

Menghadapi ketidakpastian global, IMF kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga didorong untuk mempertahankan independensi bank sentral serta menjalankan reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

Filipina Naikkan Suku Bunga Jadi 5,5% Demi Redam Lonjakan Inflasi

Kamis, 22 Oktober 2026 14:55 WIB

Cliff Venzon dan Ditas B Lopez

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125433/filipina-naikkan-suku-bunga-jadi-5-5-demi-redam-lonjakan-inflasi/2>

Bloomberg, Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga acuan untuk keempat kalinya secara berturut-turut guna menekan kembali inflasi yang meningkat dan menopang peso yang melemah hingga menyentuh rekor terendah.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) pada Kamis (22/10) menaikkan suku bunga target reverse repurchase sebesar 50 basis poin menjadi 5,50%. Keputusan ini sesuai dengan perkiraan hanya satu dari 25 ekonom yang disurvei Bloomberg News. Sebanyak 24 ekonom lainnya memperkirakan kenaikan yang lebih kecil, yakni 25 basis poin.

"Dewan Moneter menilai diperlukan respons kebijakan moneter yang kuat untuk menghadapi tekanan harga yang semakin meluas dan meningkatnya risiko kenaikan inflasi," kata BSP dalam pernyataannya.

“Respons tegas ini akan membuat kebijakan moneter cukup ketat. Langkah ini akan membatasi dampak lanjutan dari kenaikan harga dan menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.”

Keputusan tersebut menegaskan betapa persisten ancaman inflasi bagi negara Asia Tenggara itu. Filipina kini harus menghadapi kemungkinan kekeringan parah akibat El Niño, sementara dampak guncangan harga minyak global masih membebani perekonomian.

Peso Filipina juga kembali mencetak rekor terendah pada Kamis, setelah pekan lalu menembus level psikologis 63 peso per dolar AS untuk pertama kalinya. Pelemahan mata uang tersebut berisiko mendorong inflasi karena Filipina sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan pangan.

Indeks saham acuan Filipina turun 0,9% setelah pengumuman kenaikan suku bunga, sementara peso memangkas pelemahannya.

Otoritas moneter Filipina kini telah menaikkan biaya pinjaman dengan total 125 basis poin sejak perang Iran pecah pada awal tahun ini. Kenaikan tersebut berlangsung ketika perekonomian Filipina tumbuh pada laju paling lambat sejak pandemi.

“BSP siap mengambil langkah kebijakan moneter lebih lanjut jika diperlukan untuk memastikan inflasi kembali ke sasaran tepat waktu, sesuai dengan mandat kami untuk menjaga stabilitas harga,” kata bank sentral tersebut.

BSP memperkirakan inflasi umum akan kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang, tetap tinggi pada 2027, dan baru mendekati target 3% pada 2028. Inflasi inti juga diperkirakan terus meningkat.

BSP mengatakan risiko inflasi semakin besar karena kembali berkobarnya pertempuran di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak global, sementara tarif transportasi juga telah dinaikkan. Kekeringan parah akibat kemungkinan El Niño turut berisiko mengganggu produksi pertanian.

Indeks harga konsumen (IHK) Filipina telah melonjak 7,2% pada September dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, membalikkan tren perlambatan selama empat bulan berturut-turut. Dengan demikian, rata-rata inflasi sejak awal tahun mencapai 5,4%, jauh di atas target bank sentral sebesar 3%.

BI Beri Diskon Premi Hedging hingga 45%, Begini Mekanismenya

Kamis, 22 Oktober 2026 17:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125427/bi-beri-diskon-premi-hedging-hingga-45-begini-mekanismenya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif pengurangan premi untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai yang bertujuan untuk mendukung transaksi pendanaan luar negeri yang mencakup arus masuk investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh perbankan, serta investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Dalam pemaparannya, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut bahwa BI melakukan pengurangan premi dari semula 25% untuk tenor 6 bulan menjadi 40% untuk tenor 6 bulan.

“Sementara untuk tenor 12 bulan maka akan berubah premi pengurangan premi tersebut dari 30% menjadi 45%,” kata Destry dalam Rapat Dewan Gubernur, Rabu (21/10/2026).

Lalu Bagaimana Mekanisme Pemberian Diskon Premi Lindung Nilai untuk instrumen DNDF tersebut?

Sebelum membahas mekanismenya, perlu dipahami bahwa DNDF Lindung Nilai kepada BI adalah kontrak untuk melindungi risiko perubahan nilai tukar, dengan penyelesaian berdasarkan selisih kurs dalam rupiah tanpa penyerahan dolar AS secara fisik.

Instrumen ini dilakukan dengan transaksi underlying investasi portofolio asing di pasar keuangan Indonesia, pinjaman luar negeri oleh bank di Indonesia dan Foreign Direct Investment.

Sementara itu, premi DNDF adalah komponen yang ditambahkan ke kurs acuan untuk menentukan kurs dalam kontrak lindung nilai.

Mengutip penjelasan di laman BI, kurs DNDF ditentukan dari kurs JISDOR dolar AS terhadap rupiah pada saat transaksi, ditambah premi DNDF. Sementara itu, saat kontrak jatuh tempo, penyelesaian dihitung berdasarkan selisih antara kurs DNDF yang disepakati dan kurs JISDOR pada tanggal fixing.

Besaran premi DNDF tersebut dapat berubah sesuai tenor dan ketentuan yang ditetapkan BI. Karena itu, pelaku transaksi perlu merujuk pada pengumuman premi BI yang berlaku saat transaksi dilakukan.

Misalnya, sebuah bank di Indonesia memiliki transaksi pendanaan luar negeri sebesar US\$1 juta dan ingin melindungi risiko perubahan nilai tukar selama 12 bulan. Bank tersebut melakukan transaksi DNDF dengan BI sesuai persyaratan yang berlaku.

Pada saat transaksi, kurs JISDOR diasumsikan sebesar Rp17.800 per dolar AS. Jika premi awal diasumsikan Rp295 per dolar AS, kurs DNDF tanpa insentif menjadi Rp18.095 per dolar AS.

Namun, dengan insentif pengurangan premi sebesar 45%, premi berkurang Rp132,75 menjadi Rp162,25 per dolar AS. Dengan demikian, kurs DNDF setelah insentif menjadi Rp17.962,25 per dolar AS.

Setahun kemudian, pada tanggal fixing, kurs JISDOR diasumsikan mencapai Rp18.000 per dolar AS. Karena kurs tersebut lebih tinggi daripada kurs DNDF yang disepakati, terdapat selisih Rp37,75 per dolar AS.

Untuk nilai transaksi US\$1 juta, selisih tersebut setara dengan Rp37,75 juta yang dibayarkan BI kepada bank dalam ilustrasi ini.

Rupiah Tutup Perdagangan di Rp18.050/US\$

Kamis, 22 Oktober 2026 15:29 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125439/rupiah-tutup-perdagangan-di-rp18-050-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pasat spot dengan pelemahan 0,25% ke Rp18.050/US\$, seiring harga minyak Brent yang melejit 2,98% ke US\$112,25/barel. Tekanan itu kian terasa di pasar luar negeri. Rupiah di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) sore ini bergerak di Rp18.093/US\$.

Sementara, gerak mata uang Asia relatif beragam ditopang meredanya tekanan dolar Amerika Serikat (AS), dengan indeks dolar terpangkas 0,22% ke 101,55. Yen Jepang menguat paling tajam, disusul won Korea Selatan, dolar Hong Kong, yuan China, dolar Singapura dan yuan offshore.

Sebaliknya, mata uang lainnya masih mencatat pelemahan. Seperti rupee India, peso Filipina, rupiah, dolar Taiwan, baht Thailand, dan ringgit Malaysia.

Dari pasar obligasi global, tekanan juga melandai. Yield US Treasury turun 3,8 basis poin (bps) jadi 5,08% seiring meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan oleh Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat (AS). Gubernur Kevin Warsh dan kolega diperkirakan menahan suku bunga di 3,75-4% dalam pertemuan bulan ini.

Penurunan yield US Treasury diikuti obligasi Jepang 1,7 bps ke 2,85%, obligasi Australia 2,9 bps jadi 5,24%, Selandia Baru juga turun 4,8 bps jadi 4,96%.

Meskipun pasar obligasi domestik mencatat aksi beli di sebagian tenor, tetapi belum cukup menopang laju rupiah hari ini. Sebagian tenor yang tadi siang memangkas yield kini kembali naik. Tenor 5 tahun yang tadi sempat menguat, kini mencatat kenaikan yield 0,2 bps jadi 7,22%, disusul tenor 6 tahun 0,7 bps jadi 7,28%.

Tenor 1 tahun konsisten mengalami penurunan yield yaitu 3,4 bps jadi 6,78%. Diikuti tenor 3 tahun turun 2,6 bps jadi 7,06%, tenor 4 tahun turun 1,2 bps jadi 7,17%. Sementara yield tenor acuan 10 tahun berkurang 0,9 bps jadi 7,41%.

Ke depan, tekanan rupiah diperkirakan masih akan berlanjut di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan perang di Timur Tengah. Ditambah, sentimen domestik belum sepenuhnya pulih.

Kemarin, Bank Indonesia (BI) memilih menahan BI Rate di 5,75% di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga untuk menahan guncangan outflow akibat sentimen MSCI. Meski begitu, BI tetap menaikkan deposit facility rate 25 bps menjadi 5%, demi menjaga daya tarik aset rupiah.

Arah Kebijakan BI: Fokus Tarik Modal Asing Kembali ke RI

Kamis, 22 Oktober 2026 11:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125368/arrah-kebijakan-bi-fokus-tarik-modal-asing-kembali-ke-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan arah kebijakan BI akan bergantung pada perkembangan data ekonomi di masa mendatang.

Namun, bank sentral akan tetap berfokus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi melalui sejumlah strategi untuk menarik aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini dilakukan ketika aliran modal asing sempat keluar setelah munculnya penilaian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

"Jadi terkait dengan stance BI terhadap suku bunga ke depan, tentu kita akan lihat nanti data dependent, kita lihat bagaimana perkembangan ke depan," ujar Destry dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur BI, dikutip Kamis (22/10/2026).

Destry menyebutkan salah satu strategi menarik modal asing ialah melalui optimalisasi insentif bagi investor yang menempatkan dana pada aset domestik.

"Hal yang menjadi fokus kami adalah bagaimana kita bisa mendatangkan inflow itu kembali. Jadi lebih targeted," kata Destry dalam Rapat Dewan Gubernur BI secara hybrid, Rabu (21/10/2026).

Destry menjelaskan, insentif tersebut nantinya mencakup investasi pada surat berharga negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta instrumen dan pembiayaan lainnya.

Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), yakni kontrak derivatif valuta asing untuk membantu investor mengelola risiko nilai tukar. BI memberikan insentif berupa pengurangan biaya premi lindung nilai hingga 45% untuk tenor 12 bulan.

Di sisi lain, BI juga mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung likuiditas dan pertumbuhan ekonomi. Destry menyebut penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 2% diperkirakan dapat menambah likuiditas perbankan sekitar Rp190 triliun.

Kendati demikian, Destry tak menampik jika pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini karena terpengaruh sentimen MSCI.

BI mencatat bahwa Rupiah sempat menguat hingga pertengahan September 2026, hingga nilai tukar rupiah pada 20 Oktober 2026 tercatat Rp17.985/US\$ melemah sebesar 0,61% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir September 2026.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS yang pengetat, serta sentimen investor asing di pasar saham," tegasnya.

Sehingga lewat tekanan tersebut, kembali Destry menekankan akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi instrumen moneter dan penguatan insentif guna mendorong aliran masuk investasi portofolio asing.

BI juga mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA). Insentif diberikan untuk instrumen swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) beli lindung nilai konvensional kepada BI, serta transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra.

Sebagai catatan, rupiah menutup sesi perdagangan Rabu (21/10/2026) dengan depresiasi 0,1% ke Rp18.005/US\$, setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di 5,75%.

Rupiah sempat menguat kemarin, sehari sebelum pengumuman BI Rate. Namun setelah pengumuman, sepertinya pasar merespons lebih hati-hati sikap BI yang terlihat berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di pasar luar negeri, rupiah terdepresiasi 0,15% ke Rp18.052/US\$ dibayangi adanya kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia jadi standalone market oleh MSCI. Meskipun belum diputuskan dan masih menjadi pertimbangan MSCI, arus keluar modal asing dari pasar saham terjadi sejak akhir pekan lalu.

BI Klaim Insentif Moneter Mampu Tarik Modal Asing US\$9,9 Miliar

Kamis, 22 Oktober 2026 09:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125372/bi-klaim-insentif-moneter-mampu-tarik-modal-asing-us-9-9-miliar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengklaim insentif instrumen moneter telah berhasil menarik aliran modal asing masuk ke Indonesia sebesar US\$9,9 miliar sejak diberlakukan pada Juni hingga 20 Oktober 2026.

Insentif tersebut tidak hanya terkait instrumen Swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Beli Lindung Nilai Konvensional kepada BI, tetapi juga untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra sehingga imbal hasil aset rupiah menjadi tetap menarik.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bank sentral berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter.

"Termasuk memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas," ujar Destry dalam keterangan tertulis hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, dikutip Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data BI, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat melemah 0,61% sepanjang Oktober 2026, dipengaruhi kondisi ekonomi dan geopolitik global yang bergejolak.

Destry menjelaskan nilai tukar rupiah pada 20 Oktober 2026 tercatat Rp17.985/US\$ atau melemah sebesar 0,61% (point-to-point/ptp) dibandingkan dengan posisi akhir September 2026. Hal itu terjadi setelah sempat menguat hingga pertengahan September 2026.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS yang menegat, serta sentimen investor asing di pasar saham," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/10/2026).

Ke depan, BI memprakirakan nilai tukar rupiah bergerak stabil didukung komitmen bank sentral, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik.

Rupiah Tertekan Hingga CDS Naik Membayangi Ruang Pembiayaan Fiskal Pemerintah

Kamis, 22 Oktober 2026 21:05 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-tertekan-hingga-cds-naik-membayangi-ruang-pembiayaan-fiskal-pemerintah>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom David Sumual mengatakan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) hingga akhir tahun 2026.

Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, CDS Indonesia tenor lima tahun mencapai 100,26 basis poin, sedangkan tenor 10 tahun berada di level 150,14 basis poin.

Sementara mengutip data Bloomberg pada Kamis (22/10/2026), rupiah ditutup melemah 38 poin atau 0,21% ke level Rp 18.060 per dolar AS

David menilai, arus modal keluar atau capital outflow akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) berpotensi menahan rupiah di level Rp 18.000 per dollar AS.

"Pelemahan Rupiah meningkatkan beban subsidi dan ketahanan fiskal pemerintah, sehingga persepsi risiko meningkat dan premi CDS naik," ujar David kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Menurut David, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada stabilitas nilai tukar, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketahanan fiskal sekaligus meningkatkan persepsi risiko investor terhadap Indonesia, yang tercermin dari kenaikan premi CDS.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah perlu mengelola penerbitan SBN, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing (valas), secara terukur dan sesuai kebutuhan pembiayaan.

"Penerbitan SBN Rupiah dan Valas perlu dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi likuiditas domestik dan ekspektasi kebijakan moneter global," ujar David

Meski demikian, David menilai kondisi likuiditas domestik yang mulai membaik dapat menjadi penopang bagi pasar SBN. Hal ini tercermin dari suku bunga IndONIA yang sempat turun di bawah 5%.

"Benchmark yield kemungkinan akan bergerak terbatas, didukung oleh kondisi likuiditas domestik yang saat ini membaik," ujar David.

Selain perbaikan likuiditas, pemberian diskon biaya lindung nilai atau hedging dinilai dapat menjaga aliran dana asing ke pasar SBN.

Di sisi lain, jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penurunan giro wajib minimum (GWM) juga berpotensi mendorong perbankan mengalihkan penempatan dananya dari SRBI ke SBN.

Namun, risiko dari eksternal masih membayangi pergerakan imbal hasil SBN. Salah satunya berasal dari ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

David menilai, meskipun ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada akhir Oktober mulai melemah, risiko tetap perlu diwaspadai apabila arah kebijakan bank sentral AS tersebut lebih hawkish dibandingkan ekspektasi pasar. Jika kondisi tersebut terjadi, selisih imbal hasil atau spread antara US Treasury (UST) dan SBN berpotensi mengalami normalisasi.

"Ini dapat mendorong yield SBN ke rentang 7%-7,5%," ujar David

Untuk itu, David menyebut perbaikan likuiditas domestik dan potensi masuknya dana ke pasar SBN dapat menjadi penyangga imbal hasil obligasi pemerintah. Namun, tekanan terhadap rupiah, kenaikan premi risiko, serta perubahan ekspektasi kebijakan moneter AS tetap menjadi faktor yang perlu dicermati pemerintah dalam mengelola pembiayaan melalui penerbitan SBN.

Prabowo Bidik Kredit Rakyat Rp 400 Triliun pada 2027, Sasar 28 Juta Keluarga

Kamis, 22 Oktober 2026 20:23 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-bidik-kredit-rakyat-rp-400-triliun-pada-2027-sasar-28-juta-keluarga>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat mencapai Rp 400 triliun pada 2027.

Pembiayaan ini ditujukan kepada sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan dan daerah terpencil, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10/2026). Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang, program ini diperkirakan menjangkau sekitar 100 juta orang.

"Tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud. Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun," kata Prabowo.

Prabowo menyebut, penyaluran pembiayaan untuk rakyat yang telah berjalan mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta orang.

Pemerintah berencana meningkatkan penyaluran tersebut agar akses pembiayaan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Menurut Prabowo, perluasan akses kredit diharapkan membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Pemerintah juga ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok usaha besar, tetapi turut dirasakan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu tercermin dari kenaikan pendapatan riil dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi dari tingkat masyarakat dan daerah.

"Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun," ujar Prabowo.

Pemerintah Tutup 364 BUMN, Target 700 Perusahaan hingga Akhir Tahun 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 17:48 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tutup-364-bumn-target-700-perusahaan-hingga-akhir-tahun-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus melanjutkan upaya efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Prabowo Subianto mencatat hingga Rabu (21/10/2026), sebanyak 364 BUMN telah ditutup. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan pelat merah.

"Dari 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364, ya, sampai tadi malam," kata Prabowo dalam Rakortas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menambahkan, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dikonsolidasi, ditutup, atau dirampingkan mencapai 700 perusahaan hingga Desember 2026. Penataan tersebut akan menyasar perusahaan yang tidak efisien, mengalami kerugian, maupun memiliki persoalan dalam pelaporan keuangan.

"Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup, yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini membuat laporan keuangan palsu, kita tutup," ujarnya.

Menurut Prabowo, pembenahan perusahaan negara merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perekonomian nasional. Dia menilai, perusahaan yang terus merugi perlu dievaluasi agar tidak membebani pengelolaan kekayaan negara.

Dia juga mengklaim sejumlah BUMN yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan keuntungan kini telah mencatatkan kinerja positif setelah dilakukan pembenahan. Prabowo menyebut ada perusahaan yang mencatatkan peningkatan keuntungan hingga ratusan persen.

"BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen," katanya.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan melanjutkan langkah efisiensi dengan mengarahkan pengelolaan BUMN pada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan bagi negara. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Dia juga mengaitkan pembenahan BUMN dengan upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan kekayaan nasional. Menurutnya, pengelolaan aset negara harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan keberadaan perusahaan yang tidak produktif.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus melakukan perbaikan terhadap sistem ekonomi nasional agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dia menekankan pentingnya mengarahkan pengelolaan kekayaan negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

"Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," kata Prabowo.

BI Berpeluang Naikkan Suku Bunga 25 Bps pada Kuartal IV-2026

Kamis, 22 Oktober 2026 14:22 WIB

Reporter: Amalia Nur Fitri, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-berpeluang-naikkan-suku-bunga-25-bps-pada-kuartal-iv-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% di tengah tekanan terhadap rupiah dan volatilitas pasar keuangan domestik akibat persoalan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menanggapi keputusan tersebut, Bank DBS memperkirakan BI masih berpeluang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada kuartal IV-2026 untuk mengantisipasi risiko terhadap stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menilai keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini belum dinilai cukup mengganggu untuk mendorong respons melalui kenaikan suku bunga.

"Fokus kebijakan BI masih tertuju pada pengelolaan volatilitas arus modal melalui berbagai instrumen yang mendukung aliran modal masuk, sembari menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik," paparnya dalam riset DBS Bank terbaru yang diterima KONTAN, Kamis (22/10/2026).

BI juga mempersempit koridor suku bunga kebijakan dengan menaikkan suku bunga deposit facility dari 4,75% menjadi 5%.

Dengan perubahan tersebut, selisih antara suku bunga acuan dan deposit facility menyempit menjadi 75 bps, sedangkan koridor kebijakan secara keseluruhan menjadi 150 bps, dari sebelumnya 175 bps.

Radhika menilai, penyesuaian tersebut diharapkan dapat membantu menjaga suku bunga kredit agar tidak meningkat lebih lanjut, sekaligus meningkatkan imbal hasil atas likuiditas berlebih yang ditempatkan perbankan di BI.

"Langkah ini juga diharapkan memperbaiki transmisi kebijakan moneter," imbuh Radhika.

Di tengah tekanan eksternal, BI juga memperkuat insentif lindung nilai atau hedging untuk menopang stabilitas rupiah dan mendorong aliran modal portofolio masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Sebagaimana diketahui, rupiah sempat melemah hingga menembus level Rp 18.000 per dollar AS pada awal pekan ini sebelum kembali stabil di sekitar level tersebut. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi domestik meningkat sekitar 10 bps hingga 20 bps sepanjang pekan.

Menurut Radhika, walaupun aksi beli saat harga murah atau bargain hunting membantu mengangkat pasar saham domestik dari level terendah dalam enam tahun, kekhawatiran yang telah berlangsung lama masih akan membebani pergerakan bursa dalam beberapa pekan ke depan.

Sejumlah langkah perbaikan transparansi pasar modal juga telah diumumkan regulator, termasuk pengecualian saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi pada satu orang atau entitas dari indeks utama.

Kebijakan tersebut diharapkan membantu memulihkan sentimen pasar.

Langkah ini menyusul usaha lain, seperti peningkatan keterbukaan informasi mengenai pola kepemilikan saham, kenaikan bertahap ketentuan minimum free float selama tiga tahun ke depan, serta penyediaan data klasifikasi investor yang lebih terperinci.

"Perhatian utama MSCI mencakup peningkatan transparansi mengenai free float aktual, keterbukaan informasi, serta pengurangan ruang bagi distorsi harga saham. Konsultasi lebih lanjut antara regulator dan MSCI diharapkan dapat membantu meredam dampak lanjutan terhadap pasar valuta asing, obligasi, dan kredit dalam jangka pendek," urai Radhika.

Sementara dari sisi moneter, BI juga akan melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) perbankan secara bertahap mulai November 2026.

Kebijakan ini diperkirakan membebaskan likuiditas sekitar Rp 190 triliun.

Untuk bank konvensional, GWM akan diturunkan dari 9% menjadi 8% mulai 1 November, kemudian menjadi 7% pada Desember.

Sementara GWM bank syariah dipangkas dari 7,5% menjadi 6,5% pada November dan kembali turun menjadi 5,5% pada Desember.

BI juga memperpanjang insentif untuk sektor properti dan otomotif hingga Desember 2027 guna mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan kredit.

Melihat kebijakan tersebut, Bank DBS memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%, dengan proyeksi internal sebesar 5,3%.

Sementara itu, pertumbuhan kredit pada September 2026 tercatat mencapai 13,3% yoy, melampaui kisaran target pertumbuhan kredit BI sebesar 8% hingga 12% yoy untuk sepanjang 2026.

Lalu dari sisi inflasi, BI mempertahankan kisaran sasaran sebesar 1,5% hingga 3,5% untuk periode 2026–2027. Adapun defisit transaksi berjalan diperkirakan berada di kisaran 1,6% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan proyeksi DBS Bank sebesar 1,8% hingga 2%.

Meski berbagai langkah pelonggaran likuiditas dan insentif sektoral ditempuh untuk menopang pertumbuhan, Bank DBS masih mempertahankan proyeksi kenaikan suku bunga sebesar 25 bps pada kuartal IV-2026.

Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengantisipasi risiko baru terhadap nilai tukar dan stabilitas keuangan.

"Di tengah lingkungan suku bunga global yang diperkirakan bertahan tinggi lebih lama, serta potensi kenaikan suku bunga Federal Reserve AS lebih lanjut, ruang kebijakan BI akan tetap dipengaruhi oleh keseimbangan antara menjaga stabilitas rupiah dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik," tandas Radhika.

Pemkab Batang melanjutkan GPM jaga stabilisasi pasokan dan harga pangan

Kamis, 22 Oktober 2026 08:44 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/649801/pemkab-batang-melanjutkan-gpm-jaga-stabilisasi-pasokan-dan-harga-pangan>

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melanjutkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah, Rabu.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Sutadi Ronodipuro di Batang, mengatakan kegiatan ini sebagai langkah nyata menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat sekaligus memperingati momentum penting sektor pangan.

"Dari Bapanas, penugasan seluruh Indonesia, kami ditugaskan melakukan GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, serta memperingati Hari Pangan Sedunia," katanya.

Menurut dia, Gerakan pangan Murah 2026 menghadirkan sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Komoditas yang biasanya disediakan meliputi minyak goreng, telur ayam, gula pasir, hingga beras bersubsidi.

"Program ini hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan pasokan dan harga pangan di daerah," katanya.

Ia mengatakan hadirnya program GPM menjadi pendorong utama untuk membentengi kondisi ekonomi warga di tengah merangkaknya harga-harga sejumlah kebutuhan pokok.

"Hal ini juga upaya kita dalam meningkatkan daya beli masyarakat dalam kondisi inflasi atau ada kenaikan-kenaikan harga pangan sektoral. Daya pikat utama dari gelaran ini tak lain adalah jarak harga yang cukup jauh dari pasar bersaing," katanya.

Ia mengatakan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipatok Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp15.500 per kilogram, dan telur ayam Rp22 ribu per kilogram.

"Alhamdulillah sebagian besar komoditas sudah terserap habis seperti minyak goreng, telur, dan gula. Ini tentunya juga menjadi barometer bahwa masyarakat masih membutuhkan komoditas-komoditas itu dan nanti kita persiapkan lebih baik lagi," katanya.

Bank Jateng siap jadi mitra strategis investor di Semarang

Kamis, 22 Oktober 2026 18:19 WIB

Pewarta : N008, Editor: Nur Istibsaroh

<https://jogja.antaranews.com/berita/862123/bank-jateng-siap-jadi-mitra-strategis-investor-di-semarang>

Yogyakarta (ANTARA) - Bank Jateng menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan investasi dan pengembangan dunia usaha di Jawa Tengah melalui layanan perbankan terintegrasi bagi investor dan pelaku usaha. Komitmen tersebut disampaikan dalam Semarang Business Forum (SEMBIZ) 2026 yang digelar di The Suri Ballroom Semarang, Rabu (21/10/2026).

Mengusung tema “Connecting Sustainable Investment, Logistics, Tourism and Local Products to Global Markets”, forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, regulator, investor, dan pelaku usaha guna memperkuat kolaborasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat iklim investasi yang kondusif melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, memperluas peluang investasi, serta menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan Kota Semarang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat investasi dan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah yang perlu dioptimalkan melalui kolaborasi berbagai pihak, terutama dalam mendukung infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, logistik, serta produk unggulan daerah.

Menurutnya penyelenggaraan SEMBIZ 2026 diharapkan dapat mempertemukan potensi daerah dengan kebutuhan investor, sekaligus mendorong realisasi investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan membuka lapangan kerja.

Pada acara tersebut, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa Bank Jateng siap mengambil peran sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dan investor melalui dukungan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

“Bank Jateng berkomitmen untuk terus mendukung iklim investasi dan pengembangan usaha di Jawa Tengah melalui layanan perbankan yang komprehensif. Kami ingin menjadi mitra bagi investor, tidak hanya dalam pengelolaan dana, tetapi juga dalam mendukung aktivitas bisnis, transaksi keuangan, serta kebutuhan pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan perkembangan investasi di Jawa Tengah membuka peluang bagi Bank Jateng untuk memperluas sinergi dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui potensi kerja sama yang mencakup pengelolaan dana perusahaan, layanan pembayaran gaji karyawan (payroll), cash management, transaksi valuta asing, hingga pembiayaan investasi dan modal kerja sesuai kebutuhan serta kelayakan usaha.

Dalam rangkaian kegiatan SEMBIZ 2026, Bank Jateng juga melaksanakan penandatanganan Letter of Intent (LOI) dan PT Wadou Creative Art Indonesia yang dilakukan Pimpinan Cabang Koordinator Semarang Bank Jateng Sandi Ahmad, sebagai bagian dari upaya memperluas peluang kolaborasi bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelaku usaha.

Selain agenda tersebut, forum ini menghadirkan pembahasan mengenai peluang investasi berkelanjutan, pengembangan sektor logistik dan pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan bagi investor.

Melalui partisipasi dalam SEMBIZ 2026, Bank Jateng akan menindaklanjuti peluang bisnis yang teridentifikasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan perbankan investor, memperkuat komunikasi dengan perusahaan potensial, serta mengoptimalkan peran jaringan kantor cabang dalam membangun hubungan bisnis jangka panjang.

Bank Jateng berharap sinergi yang terbangun melalui forum ini dapat mendorong peningkatan investasi, memperkuat daya saing pelaku usaha, dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” tambah Bambang

Kemiskinan Kendal Turun, 3.450 Orang Keluar dari Kemiskinan

Kamis, 22 Oktober 2026

Penulis : Rbn, Editor : Arifin Zaenul

<https://radarbangsa.co.id/kemiskinan-kendal-turun-3-450-orang-keluar-dari-kemiskinan/>

KENDAL,RadarBangsa.co.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, turun menjadi 8,07 persen pada 2026. Jumlah penduduk miskin berkurang 3.450 orang, dari 83.730 orang pada 2025 menjadi 80.280 orang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal menunjukkan, persentase kemiskinan turun 0,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan rata-rata nasional sebesar 8,07 persen dan lebih rendah dari Jawa Tengah yang mencapai 9,21 persen.

Data tersebut dipaparkan, pada Kamis 22/10/2026, dalam Statistical Coaching Clinic (SCC) bertema Sosialisasi DTSEN dan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2026 di Ruang Ngesti Widhi, Kendal, dalam rangka Hari Statistik Nasional (HSN) 2026.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menegaskan, penurunan kemiskinan harus diiringi kebijakan yang tepat sasaran dan kolaborasi lintas sektor.

Pemahaman terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dinilai penting untuk memastikan program pembangunan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 7,99 persen pada 2025, tertinggi di Jawa Tengah. Investasi juga meningkat menjadi Rp 15,86 triliun dari Rp 14,21 triliun pada tahun sebelumnya,”ujarnya.

Namun, pertumbuhan ekonomi dan investasi harus berdampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan UMKM.

Penurunan kemiskinan menjadi sinyal positif bagi Kendal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.